



# STUDI KOMPARATIF INKLUSI KEUANGAN

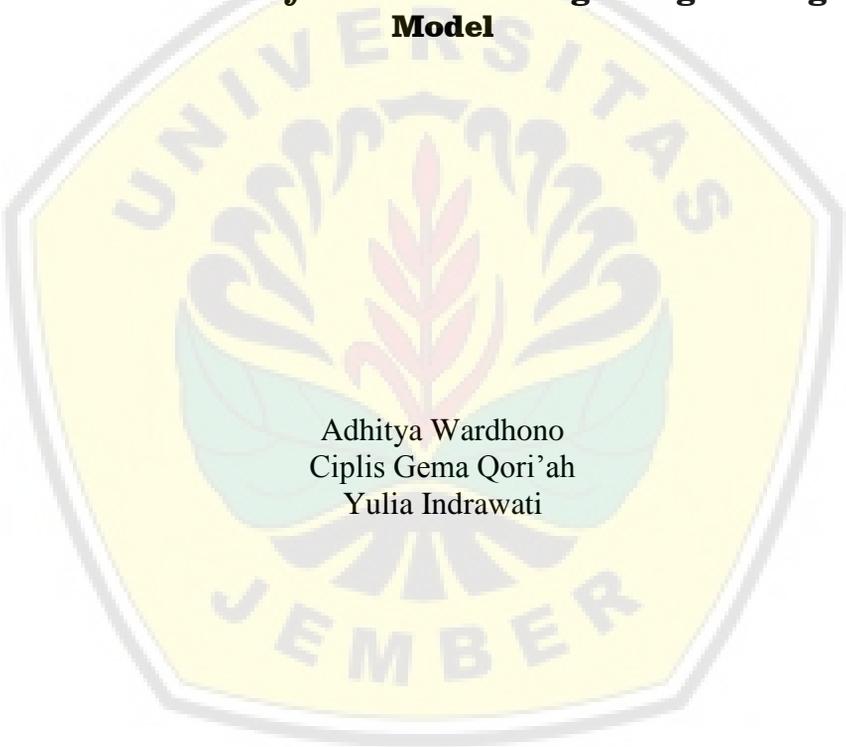
DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO

IDENTIFIKASI PENYEBAB  
DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Adhitya Wardhono  
Ciplis Gema Qori'ah  
Yulia Indrawati

EDISI 1  
2015

**STUDI KOMPARATIF INKLUSI KEUANGAN DI  
KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO  
Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan  
Model**



Adhitya Wardhono  
Ciplis Gema Qori'ah  
Yulia Indrawati

**UPT PENERBITAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**STUDI KOMPARATIF INKLUSI KEUANGAN DI  
KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO**  
**Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan  
Model**

**Penulis:**

Adhitya Wardhono  
Ciplis Gema Qori'ah  
Yulia Indrawati

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Noerkoentoro W.D.  
Fatkhur Rokhim

**ISBN:** 978-602-61803-9-1

Cetakan pertama 2017

**Penerbit:**

UPT Penerbitan Universitas Jember

**Redaksi:**

Jl. Kalimantan 37  
Jember 68121  
Telp. 0331-330224, Voip. 00319  
*e-mail:* [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

**330.072**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kami diberi kekuatan, kesabaran, serta ketekunan dalam menyelesaikan buku yang berjudul “Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model”. Ucapan terimakasih juga kami lantunkan untuk pihak terkait, yang telah membantu dan memberi masukan mengenai wacana Inklusi Keuangan.

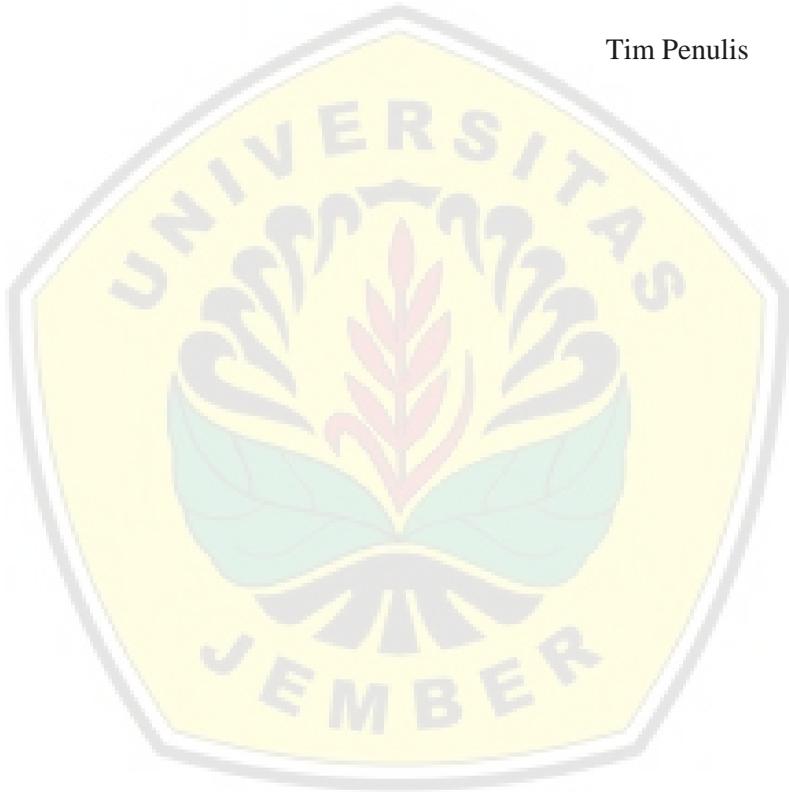
Istilah inklusi keuangan menjadi topik menarik setelah terjadinya krisis ekonomi 2008, dimana krisis ekonomi 2008 berdampak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tinggal didaerah terpencil, orang cacat, buruh ilegal, dan masyarakat pinggiran yang secara umum tidak memiliki rekening bank.

Kesulitan masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan akan menghambat perputaran modal, yang pada akhirnya menghambat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan inklusi keuangan di Indonesia juga memerlukan peran masyarakat dalam semua kalangan, untuk itu pemahaman mengenai inklusi keuangan yang lebih mendalam juga diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sejalan dengan topik tersebut, buku ini memberikan gambaran mengenai inklusi keuangan di Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso tahun 2015. Pemilihan wilayah tersebut karena kedua wilayah tersebut menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Akhir kata, besar harapan kami agar tulisan ini memberikan manfaat yang optimal serta memberikan wawasan baru dan pandangan yang berbeda, karena membaca adalah jendela dunia, dan menulis adalah penyambung nyawa.

Tim Penulis



## DAFTAR ISI

Prakata	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	ix	
Daftar Gambar	xiii	
<b>BAB 1</b>	<b>INKLUSI KEUANGAN GLOBAL.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Pendahuluan.....	1
	1.2 Definisi Inklusi Keuangan .....	3
	1.3 Beberapa Studi Empiris Inklusi Keuangan.....	6
	1.4 Perkembangan Inklusi Keuangan Global..	8
	1.5 Perkembangan Inklusi Keuangan di Indonesia.....	11
<b>BAB II</b>	<b>KONFIGURASI PERKEMBANGAN SISTEM KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
	2.1 Sistem Keuangan di Indonesia.....	17
	2.2. Interaksi Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi.....	22
	2.3 Karakteristik Lembaga Keuangan di Indonesia.....	24
	2.4 Kedalaman Sistem Keuangan ( <i>Financial deepening</i> ).....	26
	2.5 Bank Sebagai <i>Financial Intermediaries</i> .....	29
	2.6 Inklusi Keuangan Nasional.....	33

<b>BAB III</b>	<b>KONDISI SOSIAL DEMOGRAFI DAN MAKROEKONOMI REGIONAL KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO.....</b>	<b>39</b>
	3.1 Profil Sosial Demografi Kabupaten Jember.....	39
	3.2 Kondisi Makroekonomi Regional di Kabupaten Jember.....	41
	3.3 Profil Sosial Demografi Kabupaten Bondowoso.....	43
	3.4 Kondisi Makroekonomi Regional Kabupaten Bondowoso.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>INKLUSI KEUANGAN DAERAH DI DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO.....</b>	<b>47</b>
	4.1 Sosial Demografis Responden.....	49
	4.1.1 Sosial Demografis Responden Kabupaten Jember.....	49
	4.1.2 Sosial Demografis Responden Kabupaten Bondowoso.....	52
	4.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat.....	56
	4.2.1 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Jember.....	56
	4.2.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Bondowoso.....	65
	4.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat.....	73
	4.3.1 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember...	74
	4.3.2 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso.....	76
	4.3.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.....	78

BAB V	LITERASI KEUANGAN DAERAH: STUDI DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO.....	85
	5.1 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Jember.....	85
	5.1.1 <i>Basic Financial Literacy</i> Kabupaten Jember.....	92
	5.1.2 <i>Advanced Financial Literacy</i> Kabupaten Jember.....	94
	5.1.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat Kabupaten Jember.....	96
	5.2 Studi Literasi Keuangan Kabupaten Bondowoso.....	106
	5.2.1 <i>Basic Financial Literacy</i> Kabupaten Bondowoso.....	110
	5.2.2. <i>Advanced Financial Literacy</i> Kabupaten Bondowoso.....	112
	5.2.3. Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso.....	114
BAB VI	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO.....	125
	6.1 Pengembangan Kebijakan Inklusi Keuangan di Indonesia.....	125
	6.2 Kebijakan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.....	126
	6.3 Strategi Peningkatan Literasi Keuangan.....	131

BAB VII	STRATEGI INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO.....	133
	7.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.....	133
	7.1.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember.....	137
	7.1.2 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso.....	140
	7.1.3 Strategi Inklusi Keuangan Lembaga Perbankan.....	144
BAB VIII	PENUTUP.....	149
	DAFTAR PUSTAKA.....	151
	INDEKS NAMA.....	161
	INDEKS SUBYEK.....	167

## DAFTAR TABEL

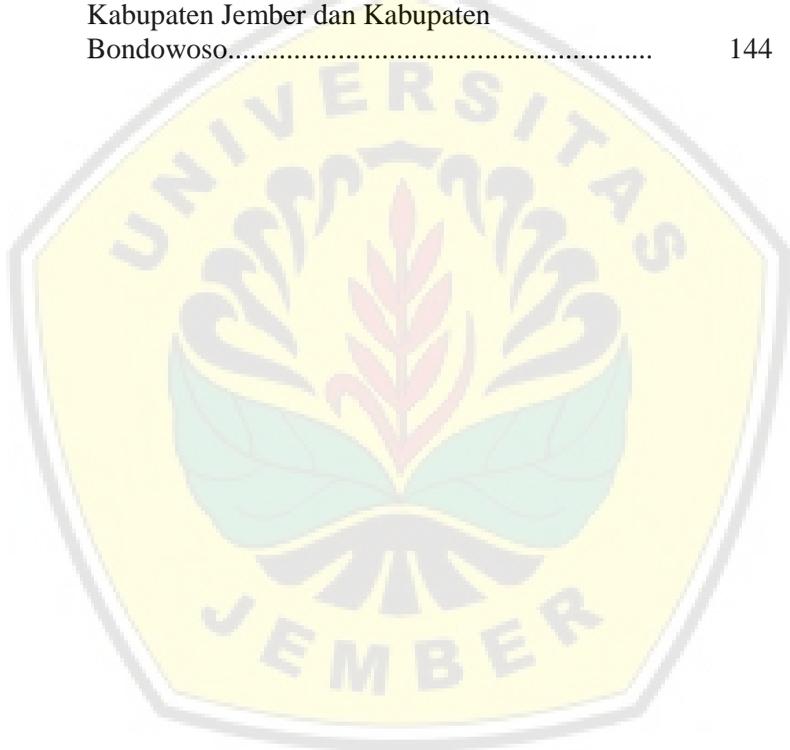
No.	Nama Tabel	Hal
1.1	Komparasi Kepemilikan dan Akses Layanan Keuangan Indonesia dan Negara-Negara Asia dan Pasifik Tahun 2014.....	12
2.1	Perkembangan Jumlah Bank Pada Industri Perbankan Nasional Tahun 2003-2011.....	20
2.2	Dinamika Kinerja Perbankan Indonesia.....	21
2.3	Pangsa Kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Pulau di Indonesia 2011-2013 (%).....	25
3.1	PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2014.....	42
3.2	Distribusi PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2014 Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha .....	45
4.1	Hasil Estimasi Determinan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember .....	74
4.2	Hasil Estimasi Determinan Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso .....	76
4.3	Hasil Estimasi Model Logit Determinasi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.....	79
4.4	Hasil Estimasi Model Probit Determinasi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.....	81
5.1	Indikator Penilaian Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat.....	90
5.2	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	91
5.3	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	92
5.4	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Jenis Kelamin .....	92

5.5	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan .....	93
5.6	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	94
5.7	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	94
5.8	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Jenis Kelamin.....	93
5.9	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan.....	95
5.10	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Frekuensi <i>Checking Saldo</i> Sebelum Penarikan.....	96
5.11	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Frekuensi <i>Checking Saldo</i> Sebelum Penarikan...	96
5.12	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.....	97
5.13	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.....	97
5.14	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis.....	98
5.15	<i>Advanced Financial Literacy</i> Penyelesaian Keuangan Bisnis.....	99
5.16	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Keuangan Harian.....	99
5.17	<i>Advanced Financial Literacy</i> Penyelesaian Keuangan Harian.....	100
5.18	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Alokasi Uang.....	100
5.19	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Alokasi Uang.....	101
5.20	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun.....	101
5.21	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun.....	102

5.22	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi.....	103
5.23	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi.....	104
5.24	Tipen Informasi yang Diikuti Responden.....	104
5.25	Indikator Penilaian Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat.....	108
5.26	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	109
5.27	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Tingkat Pendidikan.....	110
5.28	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Jenis Kelamin.....	110
5.29	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan.....	111
5.30	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	112
5.31	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	112
5.32	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Jenis Kelamin.....	113
5.33	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan.....	113
5.34	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Frekuensi <i>Checking Saldo</i> Sebelum Penarikan.....	114
5.35	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Frekuensi <i>Checking Saldo</i> Sebelum Penarikan.....	114
5.36	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.....	115
5.37	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.....	115
5.38	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis.....	116

5.39	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis.....	116
5.40	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Harian.....	117
5.41	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Harian.....	117
5.42	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Alokasi Uang.....	118
5.43	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Alokasi Uang.....	118
5.44	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Dana.....	119
5.45	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun.....	119
5.46	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi.....	120
5.47	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi.....	121
5.48	<i>Basic Financial Literacy</i> Berdasarkan Tipe Informasi yang Diikuti Responden.....	121
5.49	<i>Advanced Financial Literacy</i> Berdasarkan Tipe Informasi yang diikuti Responden.....	122
7.1	Diagram SWOT Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.....	133
7.2	Hasil Pemetaan Faktor Internal Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember.....	135
7.3	Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember.....	136
7.4	Hasil Pemetaan Faktor Internal Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso.....	139
7.5	Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso.....	140

7.6	Hasil Pemetaan Faktor Internal Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.....	143
7.7	Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.....	144



## DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Hal
1.1	Persentase Total Masyarakat Dewasa Yang Belum Menggunakan Jasa Keuangan Formal Atau Semi Formal.....	8
1.2	Peneterasi Layanan Keuangan Global Tahun 2014.....	9
1.3	Peneterasi Layanan Keuangan Global Berdasarkan Gender.....	10
1.4	Keterkaitan Keuangan Inklusif dan Makroprudensial.....	14
2.1	Perkembangan Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi 2004-2013 di Indonesia.....	24
2.2	Komposisi Aset Lembaga Keuangan di Indonesia.....	26
2.3	Perkembangan Jumlah Bank Umum di Indonesia .....	27
2.4	Transmisi Dana Dalam Sistem Keuangan.....	32
2.5	Karakteristik Sistem Keuangan Indonesia 2012 di Institusi Keuangan .....	37
2.6	Karakteristik Sistem Keuangan Indonesia 2012 di Pasar Keuangan.....	38
3.1	Struktur Lapangan Usaha Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Jember.....	40
3.2	Struktur Lapangan Usaha Penduduk di Kabupaten Bondowoso.....	44
4.1	Komposisi Pekerjaan Responden di Kabupaten Jember.....	48
4.2	Distribusi Pendapatan Responden di Kabupaten Jember.....	49
4.3	Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Kabupaten Jember.....	50

4.4	Komponen Pengeluaran Responden di Kabupaten Jember.....	50
4.5	Komposisi Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Jember.....	51
4.6	Komposisi Pekerjaan Responden di Kabupaten Bondowoso.....	52
4.7	Distribusi Pendapatan Responden di Kabupaten Bondowoso.....	53
4.8	Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Kabupaten Bondowoso.....	54
4.9	Komponen Pengeluaran Responden di Kabupaten Bondowoso.....	55
4.10	Komposisi Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Bondowoso.....	55
4.11	Keengganan Masyarakat Mengakses Perbankan di Kabupaten Jember.....	57
4.12	Persepsi Terhadap Tingkat Pelayanan Bank di Kabupaten Jember.....	58
4.13	Intensitas Menabung Masyarakat di Kabupaten Jember.....	59
4.14	Intensitas <i>Checking</i> Rekening di Kabupaten Jember.....	60
4.15	Intensitas Penarikan Tunai.....	61
4.16	Intensitas Penggunaan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM).....	61
4.17	Tujuan Penggunaan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM).....	62
4.18	Masalah Penggunaan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM).....	63
4.19	Jenis Pengajuan Kredit Perbankan.....	64
4.20	Keengganan Masyarakat Mengakses Perbankan di Kabupaten Bondowoso.....	66
4.21	Persepsi Terhadap Tingkat Pelayanan Bank.....	67
4.22	Intensitas Menabung Masyarakat.....	68
4.23	Intensitas <i>Checking</i> Rekening.....	69

4.24	Intensitas Penarikan Tunai.....	69
4.25	Intensitas Penggunaan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM).....	70
4.26	Tujuan Penggunaan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM).....	71
4.27	Masalah Penggunaan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM).....	72
4.28	Jenis Pengajuan Kredit Perbankan.....	72
5.1	Komposisi Pekerjaan Responden.....	86
5.2	Distribusi Pendapatan Responden.....	87
5.3	Komposisi Tingkat Pendidikan Responden.....	88
5.4	Komposisi Alasan Kepemilikan Produk Dana Pensiun.....	102
5.5	Determinan Pemilihan Produk Keuangan.....	103
5.6	Komposisi Pekerjaan Responden.....	105
5.7	Distribusi Pendapatan Responden.....	106
5.8	Komposisi Tingkat Pendidikan Responden.....	107
5.9	Determinan Pemilihan Produk Keuangan.....	120
6.1	Pilar Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.....	128
7.1	Posisi Strategis Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember.....	137
7.2	Posisi Strategis Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso.....	141
7.3	Posisi Strategis Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.....	145

## BAB SATU INKLUSI KEUANGAN GLOBAL

### 1.1 Pendahuluan

Pasca fenomena krisis keuangan global tahun 2008 yang dialami sebagian negara-negara di dunia, isu mengenai inklusi keuangan (*financial inclusion*) menjadi diskusi menarik dalam banyak forum internasional seperti G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Alliance for Financial Inclusion* (AFI). Hal ini mengingat fenomena krisis keuangan global memberikan pelajaran berharga bagi banyak negara dalam menjaga pentingnya stabilitas sistem keuangan untuk mencapai stabilitas makroekonomi.

Pada forum G20 yang diadakan pada tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, terminologi inklusi keuangan menjadi salah satu topik kajian menarik kedepan. Topik tersebut diangkat didasarkan pada dampak krisis 2008 yang dialami oleh beberapa negara yang termasuk pada negara dengan kondisi pendapatan perkapita rendah, tinggal di daerah terpencil, dan banyaknya masyarakat pinggiran (Park & Mercado, 2015; Bank Indonesia, 2015). Forum G20 menghasilkan kesepakatan bersama mengenai upaya-upaya dalam menghadapi kondisi inklusi keuangan dengan menyusun pedoman pengembangan keuangan inklusif yaitu “*The 9 Principles for Innovative Financial Inclusion*” yang di dalamnya memuat beberapa prinsip yang meliputi *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework* (*Alliance for Financial Inclusion*, 2011). Hasil kesepakatan forum G20 mendorong banyak forum internasional untuk menitikberatkan pentingnya menjaga stabilitas keuangan yang terintegrasi dalam program kegiatan terkait keuangan inklusif seperti CGAP, *World Bank*, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Asian Development Bank* (ADB), *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), termasuk *standard body* seperti *Bank for International Settlements* (BIS) dan *Financial Action Task Force* (FATF), dan juga negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia.

Prinsip keuangan inklusif telah menjadi bagian penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Keuangan inklusif membantu masyarakat dalam mengelola keuangan yang dimiliki dan memberikan kemudahan dalam mengakses jasa lembaga keuangan untuk memperlancar aktifitas sosial ekonomi. Tak dapat dipungkiri, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan atau *unbanked*. Terdapat berbagai motivasi yang menyebabkan masyarakat

menjadi *unbanked* atau tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi *supply* atau penyedia jasa, dalam kondisi ini perbankan dan baik dalam sisi *demand* atau masyarakat itu sendiri (Bank Indonesia, 2015). Salah satu alasan utama masyarakat menjadi *unbanked* adalah terbatasnya informasi (*lack of access to information*) yang diterima oleh masyarakat terkait akses keuangan (*information barrier*) serta mahalnya administrasi untuk akses keuangan tersebut (*price barrier*) (Shankar, 2013; Rowlingson & McKay, 2014). Sehingga dari kondisi tersebut keuangan inklusif diyakini mampu memberikan jawaban atas kondisi *unbanked* dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati baik oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yaitu antara lain sebagai berikut (Bank Indonesia, 2015): (a) meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung stabilitas sistem keuangan; (b) mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*; (c) mendukung pendalaman pasar keuangan; (d) memberikan potensi pasar baru bagi perbankan; (e) mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI); (f) berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan; dan mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*.

Pada aras kebijakan, implementasi keuangan inklusif antara negara satu dengan negara lainnya memiliki variasi, pola dan inovasi yang berbeda-beda, namun secara umum dimaksudkan untuk menurunkan eksklusi keuangan yang dapat dilakukan paling tidak melalui dua pendekatan strategis, baik pendekatan secara komprehensif maupun pendekatan secara umum (Shankar, 2013; Muniyandi, 2014; Cull *et al.*, 2014). Pendekatan secara komprehensif dilakukan dengan menyusun suatu strategi nasional melalui program terpisah, salah satunya contohnya yakni memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Pada aplikasinya pendekatan komprehensif, lebih banyak diterapkan kepada negara sedang berkembang. Selain pendekatan komprehensif juga dikenal pendekatan umum yang dijabarkan melalui strategi nasional dengan mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas serta dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Paparan konsepsional dari Beck, Demircuc-Kunt (2007) menjelaskan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sektor keuangan tidak hanya *pro growth* tetapi juga *pro poor*, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Secara empiris paling tidak diyakinkan dengan hadirnya studi di beberapa negara menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem keuangan formal yang kuat dan efisien mampu menurunkan tingkat

kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan relatif lebih cepat. Sehingga pada titik ini dapat dikatakan bahwa derajat *financial inclusion* di sebuah negara mencerminkan kompleksitas antara *demand and supply* di pasar keuangan negara tersebut. Dalam rangka membentuk sektor keuangan yang sesuai dengan permintaan, setidaknya dibutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat tersebut, inovasi yang tepat guna dan tepat sasaran, serta regulasi yang kuat.

Berangkat dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa kerangka besar kebijakan keuangan inklusif yang diterapkan di berbagai negara dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan tidak saja ekonomi tetapi juga kondisi sosial, budaya, teknologi, geografi dan kondisi politik masing-masing negara di dalam upaya menanggulangi kemiskinan menuju kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

## 1.2 Definisi Inklusi Keuangan

Secara definisi, inklusi keuangan telah menjadi diskusi menarik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah rekening tabungan di dunia lebih besar dari jumlah penduduk dunia namun 2,5 juta masyarakat atau separuh dari masyarakat dewasa masih belum memiliki tabungan atau *unbanked*. Dalam tataran makro, perkembangan keuangan adalah mengukur kedalaman jasa keuangan seperti proporsi jumlah kredit sektor swasta terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Oleh karena itu inklusi keuangan terkait langsung dengan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan suatu negara. Penjabaran atas konsepsi inklusi keuangan dapat mengarah pada peran pentingnya terhadap pembangunan kualitas manusia. Sementara pada tataran mikro, dapat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat terhadap jasa keuangan sehingga memiliki peran sebagai mitigasi risiko pada saat terjadi kejutan perekonomian. Adanya kejutan dapat menjadi *catastrophic*. Jasa keuangan membantu masyarakat dalam menabung dan mendapatkan keuntungan berupa bunga sehingga menjadi modal produktif dan nantinya memberikan implikasi bagi stabilitas keuangan secara keseluruhan (Beck, *et al.*, 2006).

Inklusi keuangan secara umum memberikan gambaran *unbanked population*, terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal baik dalam aktifitas menabung, pembayaran, kredit dan asuransi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang secara afirmatif didesain untuk mengeliminir berbagai kendala terhadap akses keuangan (Hannig dan Jansen, 2010). Secara khusus, definisi inklusi keuangan terfokus pada tiga aspek kunci: (1) akses ke produk dan jasa keuangan; (2) kemampuan keuangan (mengelola uang secara efektif, perencanaan untuk masa depan dan mengatasi kesulitan keuangan); dan 3) melek finansial.

## 4 | INKLUSI KEUANGAN

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan jasa keuangan. Kurangnya penggunaan tidak berarti kurangnya akses. Sementara definisi yang sebangun dikembangkan oleh Sarma (2012) yang menekankan bahwa inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi.

Sebagian masyarakat mungkin memiliki akses ke layanan keuangan dengan harga terjangkau, tetapi memilih untuk tidak menggunakan jasa keuangan tertentu. Sementara banyak orang lain mungkin tidak memiliki akses dalam arti biaya layanan yang sangat tinggi atau layanan hanya tersedia karena terkendala peraturan, hukum, atau pasar dan budaya fenomena. Namun masalah utama inklusi keuangan adalah sejauh mana kurangnya inklusi berasal dari kurangnya permintaan untuk jasa keuangan atau kendala yang menimbulkan masalah individu dan perusahaan dari mengakses layanan. Inklusi keuangan bukan hanya sekedar tujuan namun lebih daripada itu adalah adanya pemerataan dari pertumbuhan yang inklusif. Pencapaian inklusi keuangan adalah apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi. Makna penting inklusi keuangan adalah memberikan jasa keuangan yang tepat pada tiap individu dan memberikan pemahaman dan akses terhadap jasa keuangan. Inklusi keuangan memberikan ruang gerak bagi jalannya intermediasi keuangan termasuk diantaranya dalam transaksi pembayaran, produk keuangan yang sesuai dengan kemampuan keuangan rumah tangga miskin, fasilitas transfer uang, kredit mikro dan jasa keuangan lainnya termasuk asuransi. Inklusi keuangan dapat diukur melalui tiga cara yaitu: (1) akses pelayanan keuangan, (2) penggunaan pelayanan keuangan, dan (3) pelayanan kualitas produk dan pelayanan pengiriman.

Belum ada definisi baku dari keuangan inklusi, berbagai institusi memiliki definisi beragam, sebagai berikut:

*“Full financial inclusion is a state in which all people who can use them (including disabled, poor and rural populations), have access to a suite of quality financial services provided at affordable prices, in a convenient manner, and with dignity for the clients. Financial services are delivered by a range of providers, most of them private, to a financially literate and capable market”* (The Financial Inclusion 2020 Project).

*“...state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with*

*the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”*(CGAP-GPFI).

*“... financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”*(FATF).

*“... process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”*(RBI/Reserve Bank of India).

*“.... keuangan inklusi (financial inclusion) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2013)*

Lebih jauh melihat konteks paradigma perkembangan inklusi di suatu negara studi Hanning dan Jensen (2010) membagi empat faktor penting dalam mengukur perkembangan inklusi keuangan di suatu negara. Faktor-faktor tersebut meliputi aksesibilitas, kualitas, pemanfaatan dan dampak. Faktor pertama pada intinya adalah bahwa akses dan ketersediaan lebih memberi artikulasi pada mengukur akses masyarakat pada lembaga keuangan formal. Hal ini mencakup sisi penawaran dari jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran dan sistem kliring dan sebagainya. Oleh karenanya untuk mengevaluasi akses dan ketersediaan, potensi kendala seperti geografis dan infrastruktur harus diidentifikasi secara cermat. Penentuan tingkat aksesibilitas memberi pemahaman pada bagaimana determinan utama diestimasi sebagai proporsi terhadap jumlah penduduk yang dapat mengakses atau memiliki akses pada jasa keuangan.

Selanjutnya adalah faktor kualitas. Pada faktor kualitas, prinsipnya adalah proksi variabel yang memiliki relevansi jasa atau produk keuangan dalam menjaga kebutuhan gaya hidup masyarakat. Indikator faktor kualitas diantaranya adalah pilihan konsumen dan literasi keuangan terhadap pilihan. Sementara faktor manfaat adalah frekuensi aktual dan kedalaman dalam penggunaan produk keuangan sepanjang waktu. Terakhir faktor yang dipertimbangkan adalah faktor dampak yang dimaknai sebagai pemahaman

lebih jauh mengenai konsep kepuasan atas dampak keberadaan inklusi keuangan bagi konteks pembangunan kualitas manusia.

### 1.3 Beberapa Studi Empiris Inklusi Keuangan

Pergulatan wacana inklusi keuangan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemikir dan praktisi ekonomi yang terlihat dari banyaknya kajian empiris yang dilakukan. Paling tidak Wachira dan Kihiu (2012) telah melakukan studi tentang pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata akses terhadap jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan.

Sebelumnya wacana yang serupa juga ditandaskan oleh Sarma dan Pais (2008) dalam kajiannya terkait hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan. Dengan menggunakan indeks inklusi keuangan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan memengaruhi inklusi keuangan. Tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan memiliki korelasi yang besar. Sementara faktor sosial ekonomi seperti pendapatan memiliki hubungan positif dengan inklusi keuangan. Begitu halnya dengan pentingnya faktor lain seperti ketidakmerataan, literasi dan urbanisasi. Infrastruktur fisik memiliki hubungan yang signifikan dengan inklusi keuangan. Sementara untuk variabel perbankan NPA dan CAR memiliki hubungan negatif dengan inklusi keuangan.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Ummah (2012) dikatakan bahwa diantara negara-negara di Asia ternyata hanya Jepang dan Korea Selatan merupakan negara dengan nilai indeks inklusif tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jepang memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,9 dan Korea Selatan memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,5. Temuan ini dapat diartikan bahwa pada dua negara tersebut memiliki akses pada sektor keuangan yang relatif merata dan pelayanan keuangan yang lebih baik dengan kurun waktu pengamatan kurang lebih 8 tahun mulai tahun 2004 sampai tahun 2011.

Pada tataran wilayah yang lebih kecil ilustrasi dari studi Chattopadhyay (2011) yang meneliti inklusi keuangan di West Bengal dengan menggunakan dimensi dalam indeks inklusi keuangan dapat menjadi representasi yang memadai. Studi ini menggaris bawahi bahwa ternyata Kolkata memiliki nilai indeks inklusi tertinggi dan diikuti Darjeeling. Berdasarkan hasil survey bahwa sekitar 38 persen responden merasa belum memiliki pendapatan cukup untuk membuka rekening di bank dan rata-rata rentenir masih mendominasi sebagai sumber pembiayaan di masyarakat pedesaan dibandingkan lembaga keuangan formal.

Terkait dengan kualitas manusia, penekanan studi empiris Jaising (2013) untuk inklusi keuangan di Ghana perlu mendapat perhatian seksama. Hasil studi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki korelasi yang signifikan dengan inklusi keuangan di Ghana. Meski demikian kendala dalam inklusi keuangan relatif masih tingginya melalui deerminan biaya transaksi dan infrastruktur. Senyatanya pada ruang dan waktu juga secara berhimpit pemerintah memberikan regulasi pengawasan dan perijinan, namun lembaga yang ada tidak mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang jelas terhadap lembaga keuangan yang informal sehingga masyarakat dapat mengakses keuangan dengan biaya rendah dengan persyaratan minimum.

Adapun studi Beck *et al.*, (2007) di 99 negara pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diprosikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diprosikan dengan *governance index*, serta infromasi kredit yang diprosikan dengan *credit information index*.

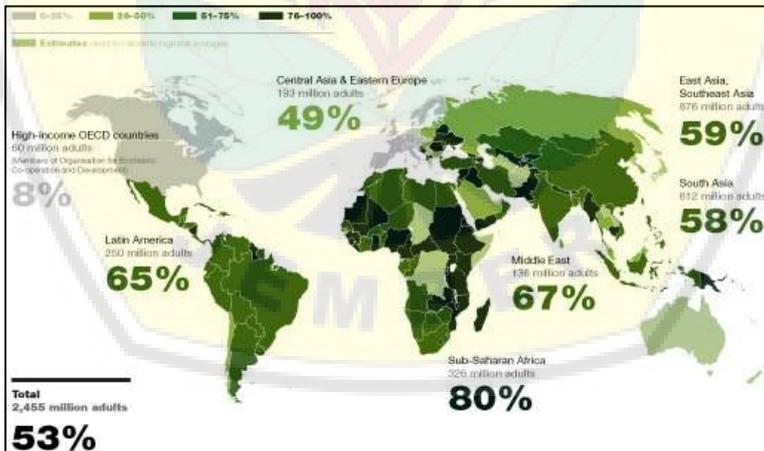
Kharchenko (2011) meneliti determinan literasi keuangan dan implikasinya terhadap perilaku menabung di Ukraina. Dengan menggunakan data survei *Financial Literacy and Awareness in Ukraine* dari *Financial Sector Development Project (FINREP)* dan USAID tahun 2010. Hasil studi menunjukkan determinan utama yang mempengaruhi literasi keuangan di Ukraina adalah *gender*, tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah dan kekayaan. Usia dan tempat tinggal tidak signifikan mempengaruhi literasi keuangan. Implikasi literasi keuangan terhadap perilaku menabung tidak memiliki pengaruh langsung pada saat kekayaan dapat dikontrol. Sehingga literasi keuangan dan kekayaan saling berkorelasi.

Dalam studinya di 31 negara OECD tahun 2011, Van der Werff *et al.*, (2012), menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi proporsi populasi yang mengakses perbankan adalah ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diprosikan dengan *corruption index* dan GNI per kapita. Inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Andrianaivo dan Kpodar (2012) menganalisis 44 negara di benua Afrika dengan menggunakan data tahun 1988-2007 terkait hubungan telepon seluler, inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa pengembangan telepon seluler berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Selain itu, inklusi keuangan yang diukur dengan jumlah tabungan dan pinjaman per kapita menjadi salah satu jalur transmisi dari perkembangan telepon seluler terhadap pertumbuhan.

### 1.4 Perkembangan Inklusi Keuangan Global

Inklusi keuangan berkembang sebagai kritik terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif. World Bank melalui *The Commission on Growth and Development* (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang fokus pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses aset perekonomian dan pasar yang pada akhirnya menciptakan pemerataan peluang bagi generasi selanjutnya. Pertumbuhan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan (miskin) dapat terlibat dalam proses pembangunan (Samans *et al.*, 2015). Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok/kaum yang termarginalkan di dalam proses pembangunan. Pertumbuhan dianggap sebagai pertumbuhan yang pro-kemiskinan apabila masyarakat miskin diuntungkan yang tercermin dari beberapa ukuran kemiskinan yang disepakati secara luas (Ravallion & Chen, 2002). Terkait dengan realitas empiris ini mendapat rujukan berarti dari Kraay (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dikatakan pro-kemiskinan jika pendapatan dari masyarakat miskin tumbuh lebih cepat daripada pendapatan masyarakat secara keseluruhan.



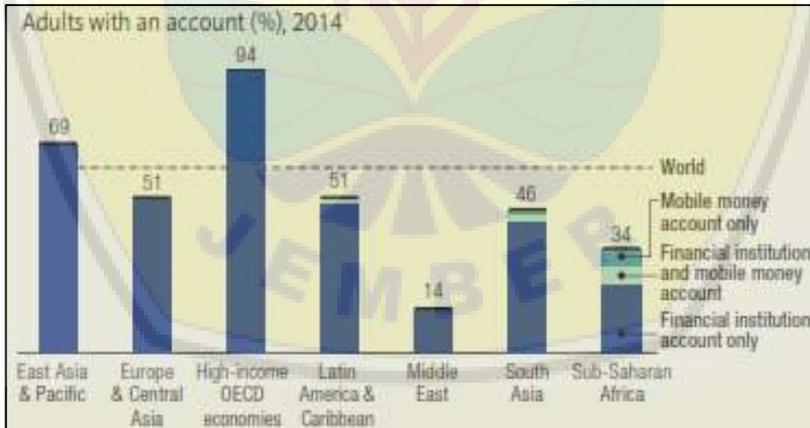
Sumber: World Bank

**Gambar 1.1** Persentase Total Masyarakat Dewasa yang Belum menggunakan Jasa Keuangan Formal atau Semi Formal

Sebagian besar masyarakat di dunia, khususnya kelompok miskin dan rentan, tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (*financial services*). Sebanyak 53 persen atau 2,455 juta orang dewasa belum menggunakan jasa keuangan baik formal maupun semi formal. Negara-

negara di Sub-Saharan Afrika adalah negara yang memiliki jumlah masyarakat *unbanked* tertinggi yaitu 80 persen atau 326 juta dan negara dengan masyarakat *unbanked* terendah adalah negara-negara dengan pendapatan tinggi OECD yakni sebesar 8 persen atau 6 juta penduduk. Sementara negara-negara di *South Asia* 58 persen dan *Southeast Asia* 59 persen.

*The Global Findex Database* merilis data antara tahun 2011 dan 2014, terdapat 700 juta atau 62 persen orang dewasa telah memiliki tabungan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 51 persen. Untuk negara dengan pendapatan tinggi OECD rata-rata penetrasi layanan lembaga keuangan sebesar 94 persen masyarakat dewasa yang telah memiliki tabungan, sementara untuk negara berkembang hanya sebesar 54 persen. Terdapat kesenjangan yang lebar antar negara berkembang dimana penetrasi tabungan dari 14 persen untuk negara-negara *Middle East* hingga 69 persen untuk negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Komposisi kepemilikan layanan keuangan masyarakat sebanyak 60 persentelah memiliki tabungan, 1 persen memiliki tabungan dan *mobile money account* dan 1 persen yang hanya memiliki *mobile money account* pada tahun 2014.



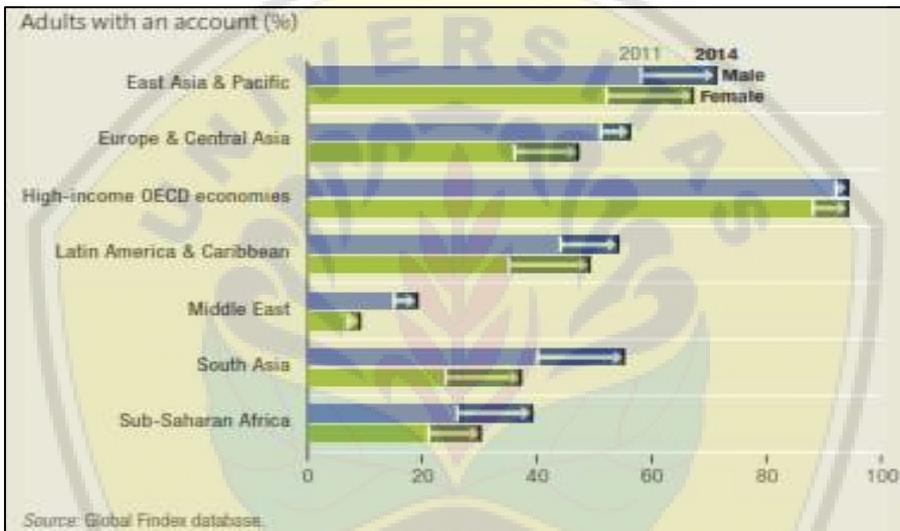
Sumber : *Global Findex database*, 2014

### Gambar 1.2 Penetrasi Layanan Keuangan Global Tahun 2014

Sementara perkembangan inklusi keuangan dilihat dari gender berdasarkan data dari *Global Findex Database* menunjukkan adanya perkembangan yang pesat. Namun kesenjangan masih terjadi diantara masyarakat perempuan dan miskin yang tidak memiliki tabungan. Kesenjangan gender yang tinggi dalam kepemilikan tabungan pada tahun

## 10 | INKLUSI KEUANGAN

2011 menunjukkan 47 persen wanita memiliki tabungan sementara laki-laki 54 persen. Namun pada tahun 2014 kepemilikan tabungan pada perempuan 58 persen dan laki-laki 65 persen. Sehingga kesenjangan gender secara keseluruhan adalah 7 persen dan untuk negara-negara berkembang sebesar 9 persen. Diantara negara-negara berkembang, *Middle East* memiliki kesenjangan gender yang relatif lebar dan *South Asia* yang terbesar secara absolut yaitu 18 persen.



Sumber: *Global Findex database*, 2014

### Gambar 1.3 Penetrasi Layanan Keuangan Global Berdasarkan Gender

Selain gender, karakteristik umur juga menentukan kepemilikan tabungan masyarakat. Di antara negara-negara di dunia, kelompok umur 15-24 tahun yang paling banyak memiliki tabungan dibandingkan kelompok umur di atas 25 tahun. Perbedaan kepemilikan tabungan antara kedua kelompok umur sebesar 10 persen hingga 20 persen. Perbedaan terkecil terdapat di negara-negara OECD dan *East Asia* dan Pasifik yakni kurang dari 15 persen dan terbesar di negara-negara *Middle East* dimana kepemilikan tabungan kelompok umur 15-24 tahun kurang dari separuh kelompok usia 25 tahun ke atas. Selama tahun 2011 dan 2014, perbedaan dalam kepemilikan tabungan antar kelompok umur cenderung melebar secara absolut karena kelompok umur di atas 25 tahun di *East Asia* dan Pasifik dan Eropa dan Asia sekitar 5 persen dari usia muda. Sementara di negara OECD memiliki

perbedaan yang semakin kecil dimana kepemilikan tabungan di usia muda meningkat dan usia tua secara umum siap memiliki tabungan.

## 1.5 Perkembangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Inklusi keuangan telah menjadi program pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan masyarakat. Bahkan pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meresmikan peluncuran cetak biru literasi keuangan dengan misi adalah untuk memberikan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan.

Program inklusi keuangan didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Bank Indonesia yang menunjukkan rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan. Berdasarkan survei Bank Dunia (2011) bahwa di Indonesia hanya 19,6 persen orang dewasa (*adult*) yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka tersebut di bawah Vietnam 21,4 persen, Filipina 26,5 persen, India 35,2 persen, Malaysia 66,7 persen dan Thailand 77,7 persen. Sementara berdasarkan hasil survey Neraca Rumah Tangga dari Bank Indonesia (2010) bahwa 62 persen rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Indonesia masih berada pada posisi terendah dalam inklusi keuangan dibandingkan dengan negara ASEAN. Tercatat hanya 18,2 persen perusahaan di Indonesia yang memperoleh kredit dari bank dan hanya 8,5 persen masyarakat yang memperoleh kredit dari bank. Bahkan dalam peringkat *Ease of Doing Business* dan *Getting Credit*, Indonesia masih relatif kecil yaitu peringkat tujuh di ASEAN dan hanya lebih tinggi dari Kamboja, Laos dan Myanmar.

Kesenjangan sektor keuangan di Indonesia tidak hanya menyangkut keterjangkauan atau inklusi, tetapi juga tentang pemahaman atau literasi (Gerrans & Hershey, 2013). Dalam hal keterjangkauan, saat ini kurang dari 30 persen masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan layanan sektor keuangan, sementara dalam literasi keuangan hanya 21 persen masyarakat yang *well literate*.

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk di atas usia 15 tahun ke atas sejumlah 177,7 juta dan GNI per kapita mencapai 3,580\$ memiliki rata-rata kepemilikan dan akses lembaga keuangan di bawah rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik. Berdasarkan data dari Bank Dunia, indikator kepemilikan rekening penduduk dewasa di

Indonesia mencapai 36,1 persen atau 52,32 persen dari rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik.

**Tabel 1.1 Komparasi Kepemilikan dan Akses Layanan Keuangan Indonesia dan Negara-Negara Asia dan Pasifik Tahun 2014**

Indikator	Indonesia (%)	East Asia dan Pacific (%)
<b>Kepemilikan Rekening (% Umur 15 Tahun Keatas)</b>		
Seluruh penduduk dewasa	36,1	69,0
Perempuan	37,5	67,0
Penduduk dewasa termiskin 40%	22,2	60,9
Usia 15-24	35,2	60,7
Penduduk dewasa di pedesaan	28,7	64,5
<b>Rekening di Lembaga Keuangan (% Umur 15 Tahun Keatas)</b>		
Seluruh penduduk dewasa	35,9	68,8
<b>Mobile Account</b>		
Seluruh penduduk dewasa	0,4	0,4
<b>Akses pada Produk Lembaga Keuangan</b>		
Memiliki kartu debit	25,9	42,9
ATM	70,9	53,3
<b>Penggunaan Tabungan</b>		
Penerimaan gaji	6,6	15,1
Transfer dari pemerintah	3,0	8,1
Pembayaran lain-lain	2,9	11,8
<b>Pembayaran Digital Lainnya</b>		
Penggunaan kartu debit	8,5	14,8
Penggunaan kartu kredit	1,1	10,8
Penggunaan <i>internet banking</i>	5,1	15,6
<b>Remittance</b>		
Pengiriman melalui lembaga keuangan	52,4	36,9
Pengiriman melalui <i>mobile phone</i>	3,6	8,7
Pengiriman melalui <i>money transfer operator</i>	8,7	18,5
Penerimaan melalui lembaga keuangan	36,3	29,0
Penerimaan melalui <i>mobile phone</i>	0,2	4,9
Penerimaan melalui <i>money transfer operator</i>	7,9	15,8
<b>Jumlah Simpanan</b>		
Simpanan pada lembaga keuangan	26,6	36,5

Indikator	Indonesia (%)	East Asia dan Pacific (%)
Simpanan pada lembaga lainnya	25,2	6,0
Simpanan untuk hari tua	27,1	36,5
Simpanan untuk bisnis	22,6	21,3
Simpanan pendidikan	33,3	30,7
<b>Kredit</b>		
Pinjaman dari lembaga keuangan	13,1	11,0
Pinjaman dari keluarga atau teman	41,5	28,3
Pinjaman dari <i>private informal lender</i>	2,9	2,5
Pinjaman untuk bisnis	11,7	8,3
Pinjaman untuk pendidikan	12,2	7,1
Kredit perumahan dari lembaga keuangan	5,5	8,0

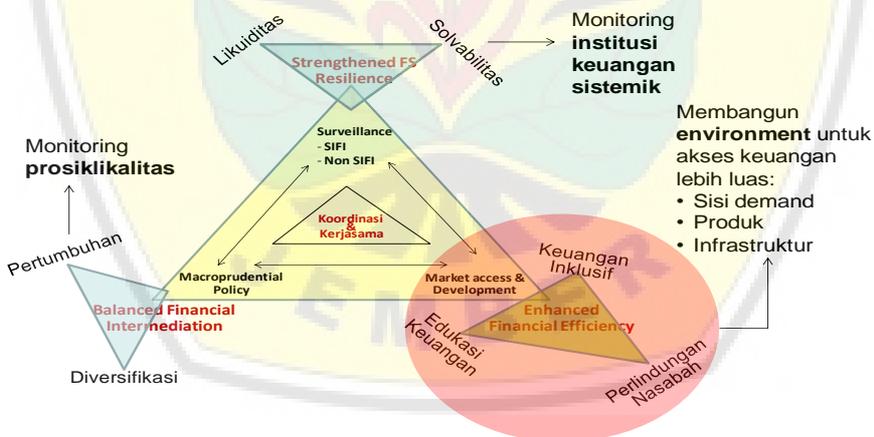
Sumber: <http://worldbank.org>

Kepemilikan rekening penduduk dewasa di Indonesia mencapai 36,1 persen dengan jumlah penduduk perempuan 37,5 persen dan pedesaan 28,7 persen. Angka ini masih dibawah rata-rata negara *East Asia* dan *Pacific* yaitu 69 persen. Penggunaan produk dari lembaga keuangan di Indonesia juga masih rendah terutama pemanfaatan *mobile account* hanya 0,4% begitu halnya dengan pembayaran secara digital yang hanya mencapai 5,1% untuk *internet banking* dan hanya 1,1% untuk penggunaan kartu kredit. Namun di sisi lain penggunaan ATM cukup tinggi yaitu 70,9%. Pengiriman uang *remittance* juga telah mencapai 52,4%. Hal ini menjadi peluang bagi lembaga keuangan mengingat pendapatan negara dari *remittance* juga cukup besar. Begitu halnya dengan simpanan masyarakat yang juga masih rendah dibawah 30 persen, hal yang sama ditunjukkan oleh negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang masih berkisar pada 36 persen. Pemanfaatan kredit oleh masyarakat juga masih rendah terutama pada lembaga keuangan yaitu 13,1 persen, sebagian lainnya memilih pinjam pada keluarga atau teman 41,5 cukup besar dibandingkan pada lembaga keuangan, sementara pinjaman pada *private informal lender* 2,9 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada lembaga keuangan baik dari pengetahuan atau literasi maupun keterjangkauan atau inklusi masyarakat pada lembaga keuangan.

Terkait pengembangan keuangan inklusif, garis pergerakan Bank Indonesia condong pada arah dan strategi komprehensif seperti dilakukan di berbagai negara melalui penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Keberadaan SNKI dapat menjadi acuan dalam membantu percepatan

masyarakat marjinal berinteraksi dan bertransaksi dengan sektor keuangan formal sehingga secara langsung mereka menjadi tidak terpinggirkan. Penegasan yang dilakukan oleh Collins, Daryl, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, and Orlanda Ruthven (2009) mencoba untuk menyingkap fakta dan membuat prognosa bahwa semakin banyak masyarakat berhubungan dengan sektor keuangan non formal yang kurang pengaturan dan pengawasannya, berbiaya mahal bagi perekonomian sehingga dapat menjadi pemicu masalah sosial, politik bahkan instabilitas sebagai contoh munculnya *shadow banking* dan *ponzi scheme*.

Mencermati arah gerak SNKI banyak mengerakkan determinan-determinan dan aspek-aspek penting yang meliputi edukasi keuangan, fasilitasi keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi/saluran distribusi dan perlindungan konsumen, yang semua berkolerasi untuk mendukung stabilitas sistem keuangan maupun pertumbuhan ekonomi. Ilustrasi bagaimana keterkaitan keuangan inklusi dengan makroprudensial Gambar 2.7 dibawah ini dapat memberi ilustrikasi beberapa elemen penting yang saling terkait satu sama lain.



**Gambar 1.4 Keterkaitan Keuangan Inklusif dan Makroprudensial**

Meski demikian ilustrasi atas kaitan stabilitas keuangan dengan keuangan inklusi masih mendapat perhatian yang relatif sedikit. Namun demikian paling tidak studi Khan (2011) dan Hannig dan Jansen (2010). Khan (2011) menunjukkan bahwa terdapat tiga cara bagaimana keuangan inklusif dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan. *Pertama*, diversifikasi yang lebih besar dari aset bank sebagai akibat dari peningkatan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil dapat

mengurangi keberisikoan keseluruhan portofolio pinjaman bank. *Kedua*, meningkatkan jumlah penabung akan meningkatkan ukuran serta stabilitas bank terhadap kegiatan pembiayaan. Ketiga, keuangan inklusif yang lebih besar dapat berkontribusi pada transmisi kebijakan moneter, juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan yang lebih besar.

Meskipun belum banyak kajian yang mengulas, indikasi terdapat hubungan antara stabilitas keuangan dengan keuangan inklusif dimaksud cukup kuat, sebagai berikut:

- Instabilitas disektor keuangan khususnya perbankan, umumnya dimulai dengan permasalahan likuiditas. Pada krisis ekonomi 2008 paling tidak menjadi bukti bahwa posisi dan situasi ketergantungan bank pada dana korporasi sebagai sumber utama dapat menimbulkan *liquidity risk* dengan cepat apabila satu atau dua korporasi menarik dananya tiba-tiba. Dengan dirangkulnya masyarakat golongan *unbanked* yang jumlahnya cukup besar meskipun dengan dana secara individu cukup kecil, dapat menjadi sumber dana baru bagi perbankan, dana retail yaitu dana yang lebih stabil (Prasad 2010). Dalam kondisi krisis, dana retail ini cenderung lebih stabil dibanding dana korporasi.
- Risiko kredit juga dapat menjadi pemicu terjadinya krisis seperti krisis 1997/1998 di Indonesia, banyaknya korporasi yang *fail* dengan cepat meningkatkan *Non Performing Loan* (NPL) perbankan bahkan menggerogoti permodalan. Dengan keuangan inklusif dimana perbankan melayani dan mengeluarkan produk yang cocok untuk masyarakat golongan ini, dapat membantu perbankan mendiversifikasi risiko kreditnya. Bank akan lebih tahan terhadap risiko kredit dengan gagalnya sejumlah debitur mikro dibanding satu atau dua debitur korporasi. Pada titik ini dapat diurai dengan lebih tegas bahwasannya potensi risiko sistemik semakin jauh berkurang dengan semakin meluasnya kredit mikro dibanding meningkatnya kredit ke korporasi (Adasme, Majnoni, dan Uribe 2006)
- Salah satu syarat tercapainya keuangan inklusif adalah adanya peningkatan literasi keuangan dalam hal ini dapat mendorong terjadinya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Peningkatan pengelolaan keuangan dimaksud dapat dilakukan dengan edukasi keuangan yang berkesinambungan. Edukasi keuangan yang efektif tentu akan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan termasuk didalamnya memahami mengenal risiko dari suatu produk. Hal ini tentu positif bagi stabilitas sistem keuangan.
- Peningkatan literasi keuangan dimaksud tentunya dapat meningkatkan *bargaining position* bagi masyarakat sehingga dapat memilih dan memutuskan dengan baik pilihan produk dan jasa dari berbagai pelaku keuangan. Masyarakat tentunya akan memilih produk yang paling murah, risiko kecil dan pelaku sektor keuangan yang sehat. Hal ini

tentunya ini positif bagi perekonomian karena akan meningkatkan persaingan sesama pelaku keuangan untuk memberikan produk dan jasa yang terbaik. Pada ujungnya hal tersebut dapat membantu penurunan biaya bagi perekonomian seperti suku bunga kredit yang rendah.

- Dengan terlayannya semua masyarakat, dengan harga yang murah produk yang cocok dan diimbangi dengan peningkatan pengelolaan keuangan, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga dikemudian hari. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga dimaksud secara luas akan meningkatkan pemerataan pendapatan, mengurangi gap antara yang kecil dan yang mampu. Hal ini positif untuk meningkatkan daya tahan rumah tangga. Secara kolektif akan sangat membantu menurunkan risiko yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih sustain, termasuk penurunan risiko sosial dan risiko politik. Hal ini positif bagi stabilitas disektor keuangan.

Keuangan inklusif akan sulit dilakukan dalam kondisi adanya instabilitas ekonomi makro, bahkan disinyalis dapat memperparah situasi, sebaliknya stabilitas sistem keuangan akan cenderung sulit dicapai apabila sebagian besar masyarakat masih dikategorikan *financial exclusion*. Paling tidak krisis ekonomi 1997 di Indonesia menjadi bukti bahwa bank yang fokus kepada mikro akan lebih bertahan dibanding bank yang fokus ke korporasi. Selain itu tingkat NPL korporasi meningkat sangat cepat dan drastis dibanding tingkat NPL kredit UMKM pada masa tersebut.

Selain hal tersebut diatas, kebijakan makroprudensial untuk merespon perkembangan akan lebih efektif karena keuangan inklusif. Hal ini dikarenakan, kebijakan makroprudensial umumnya ditransmisikan lewat industri keuangan, misal perbankan di Indonesia. Dengan keuangan inklusif, masyarakat yang dulunya tidak menjadi nasabah bank, sekarang menjadi berbank, tentunya terkena dampak dari kebijakan makroprudensial. Sebagai contoh apabila ditenggarai terjadi pertumbuhan kredit yang cukup tinggi untuk mencegah risiko sistemik/prosklinalitas, dapat diterapkan pembatasan pertumbuhan kredit atau peningkatan LTV diperbankan yang ujungnya mengurangi animo masyarakat untuk meminjam kredit.

Akhirnya, dapat digaris bawahi bahwasannya tujuan dan peran dari keuangan inklusif secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat kecil (*grassroot*) yang secara umum belum terlayani oleh jasa keuangan. Cakupan kegiatan keuangan inklusif yang cukup luas akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi terutama di daerah, peningkatan lapangan kerja karena diharapkan kegiatan bersifat padat karya dana membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

## KONFIGURASI PERKEMBANGAN SISTEM KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

### 2.1 Sistem Keuangan di Indonesia

Sistem keuangan terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan inovasi teknologi (Levine, 1997).

Sistem keuangan berfungsi untuk mengalihkan dana dari penabung (*lender/savers*) kepada peminjam (*borrower/spender*) untuk membiayai kegiatan yang produktif. Dana dapat berpindah dari penabung (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) dalam 3 (tiga) cara, yaitu Pembiayaan Langsung (*Direct Finance*), Pembiayaan Semi Langsung (*Semi Direct Finance*), dan Pembiayaan Tidak Langsung (*Indirect Finance*). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing cara tersebut.

1. Pembiayaan Langsung adalah pemberian kredit/pembiayaan langsung dilakukan oleh pemilik dana (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) tanpa melibatkan lembaga intermediasi keuangan, sehingga ada penyerahan bukti hutang, seperti obligasi, saham atau promes kepada unit surplus. Bukti hutang atau surat berharga ini merupakan sekuritas primer.
2. Pembiayaan Semi Langsung merupakan proses pemindahan dana yang dipinjamkan dari unit surplus ke unit defisit menggunakan perantara perorangan atau institusi. Pembiayaan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui bank investasi (*investment bank*) atau broker/dealer. Jika dilakukan dengan menggunakan jasa bank investasi dan bank tersebut berfungsi sebagai *underwriting* surat berharga, maka transaksi ini dikenal sebagai pasar perdana (*primary market*). Pasar perdana merupakan pasar keuangan dimana surat berharga pertama kali dikeluarkan dan dijual kepada pembeli awal yang disebut dengan IPO (*Initial Public Offering*). *Underwriting* surat berharga merupakan institusi yang menjamin suatu harga dari surat berharga tertentu dan kemudian menjualnya kepada masyarakat. Jika dilakukan dengan menggunakan jasa broker/dealer

maka transaksi ini dikenal dengan pasar sekunder (*secondary market*). Pasar sekunder merupakan pasar keuangan dimana surat berharga diperdagangkan setelah dikeluarkan oleh bursa. Broker merupakan agen dari investor yang mempertemukan pembeli dan penjual surat berharga; sedangkan dealer merupakan penghubung pembeli dan penjual surat berharga dengan cara membeli dan menjual pada saat transaksi.

3. Pembiayaan Tidak Langsung merupakan proses pemindahan dana pinjaman dari unit surplus ke unit defisit melalui lembaga intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pembiayaan sekuritas dan reksadana. Penggunaan lembaga intermediasi penting dalam perekonomian karena dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam pembiayaan langsung.

Fungsi intermediasi memungkinkan lembaga keuangan menggalang dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan dana khususnya sektor riil. Pertumbuhan perekonomian yang pesat tidak lepas dari perkembangan sistem keuangan. Secara konseptual, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian didorong oleh empat hal, antara lain pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor riil, integrasi sistem keuangan global dan regional, kompleksitas sistem keuangan dan perubahan komposisi dalam proses sistem keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana komposisi aset non moneter menjadi lebih penting (Houben, 2004).

Fungsi pokok lain dalam suatu sistem keuangan yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko dan fungsi kebijakan. Dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian diterbitkannya beberapa undang-undang dibidang keuangan dan perbankan. Perkembangan perbankan di Indonesia di mulai pada tahun 1988 dengan adanya paket deregulasi tertanggal 27 Oktober 1988 yaitu berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah dan pada puncaknya jumlah bank umum bertambah dari yang semula 111 bank menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat signifikan dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 pada tahun 1996 (Priyarsono *et al.*, 2011).

Dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam penggambaran batasan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial karena adanya keterkaitan dan pengaruh dari kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial yang bertujuan untuk

memelihara stabilitas sistem keuangan harus saling melengkapi dengan kebijakan lainnya, bukan bersifat “menggantikan” (IMF, 2011).

Adapun aspek-aspek utama dalam penyusunan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial adalah:

- a. Bertujuan untuk membatasi berkembangnya risiko sistemik; di bidang SSK termasuk makroprudensial tidak dapat diukur secara tepat/pasti, diperlukan elemen untuk mendukung akuntabilitas yaitu sebagai berikut:
  - a. Kejelasan biaya yang diperkirakan dengan manfaat atas kebijakan yang diambil.
  - b. Transparansi kebijakan yang diambil, antara lain melalui *Financial Stability Report* (FSR).

Lebih jauh perkembangan perbankan menunjukkan hasil berupa penurunan jumlah bank. Tabel 1. di bawah ini akan menunjukkan perkembangan jumlah bank di industri perbankan nasional selama tahun 2003-2011.

**Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Bank pada Industri Perbankan Nasional Tahun 2003-2011**

Tahun	Bank Persero	BUSN Devisa	BUSN non Devisa	BPD	Bank Campuran	Bank Asing
2003	5	36	40	26	19	10
2004	5	35	38	26	19	11
2005	5	34	37	26	18	11
2006	5	35	36	26	17	11
2007	5	35	36	26	17	11
2008	5	32	36	26	15	10
2009	5	34	31	26	16	10
2010	5	36	31	26	15	10
2011	5	36	30	26	14	10

Sumber: Statistik Perbankan, dipublikasikan BI.

Paparan Tabel 2.1 menunjukkan jumlah bank yang rata-rata semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan konsentrasi pada industri perbankan nasional setelah dilakukannya konsolidasi antar bank.

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 hingga 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997-1998 karena terjadi krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain

## 20 | INKLUSI KEUANGAN

dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya.

Periode 1999-2002 krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Berdasarkan fakta dan semakin jelasnya arah kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam masa pemulihan krisis 1997-1998, maka pemerintah dan utamanya Bank Indonesia sejak awal tahun 2004 memperkenalkan kepada publik dan kepada pelaku di sektor perbankan bahwa dilaksanakan kebijakan pengembangan sistem perbankan Indonesia secara profesional melalui penerapan strategi yang disebut *Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*. Strategi ini dimaksudkan agar sektor perbankan dapat menjadi pilar utama sumber pembiayaan sektor riil, menjadi sektor ekonomi yang sehat, kuat, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat domestik maupun internasional untuk mendukung peningkatan kinerja perbankan dalam perekonomian.

**Tabel 2.2 Dinamika Kinerja Perbankan di Indonesia (%)**

Tahun	CAR	ROA	BOPO	LDR
2004	19,42	3,46	76,64	49,95
2005	19,30	2,55	89,50	59,66
2006	21,27	2,64	86,98	61,56
2007	19,30	2,78	84,05	66,32
2008	26,76	2,33	86,59	74,58
2009	27,42	2,60	86,63	72,88
2010	17,18	2,86	86,14	75,21
2011	16,05	3,03	85,42	78,77
2012	17,43	3,11	74,10	83,58
2013	18,13	3,08	74,08	89,70

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2014, diolah.

Perkembangan dan kinerja perbankan ditandai dengan indikator kinerja bank umum konvensional di Indonesia yang dipaparkan pada tabel 2.2. Pemaparan tabel 2.2 menunjukkan perkembangan dan kinerja perbankan di Indonesia selama tahun 2004 hingga tahun 2013. Tercatat bahwa pergerakan relatif fluktuatif selama sepuluh tahun, angka tertinggi pada tahun 2009 dan terendah di tahun 2011. Secara umum rasio CAR yang terdaftar di bursa efek memenuhi persyaratan yaitu rasio CAR lebih dari 8 %. Berdasarkan teori jika rasio CAR meningkat maka seharusnya ROA juga

mengalami peningkatan (Mishkin, 2008). Hal serupa juga terjadi pada tingkat efisiensi operasi perbankan dimana BOPO mengalami fluktuasi, jika rasio BOPO yang dihasilkan suatu bank melebihi 90 persen, maka dapat disimpulkan bahwa bank tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Berbagai paparan permasalahan terkait sistem keuangan di atas dapat ditanggulangi dengan konsep stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan (SSK) ialah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu Schinasi (2006a) dalam Bank Indonesia (2007) mengatakan stabilitas sistem keuangan sebagai suatu kondisi dimana sistem keuangan dapat memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu secara efisien, dapat menilai/mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan, dapat dengan baik menyerap gejala yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum, stabilitas sistem keuangan dapat diartikan sebagai ketahanan sistem keuangan terhadap segala guncangan perekonomian yang ada, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap dapat berjalan dengan lancar.

Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi untuk memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian. Sehingga untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi diperlukan dukungan sikronisasi aspek keuangan yakni *financial deepening* (pendalaman keuangan) dan *financial inclusion* (inklusi keuangan) untuk menciptakan keadaan yang seimbang dalam sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi *shock*, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar (McFarlane, 1999; Houben, *et al.*, 2004; Schinasi, 2006; Sharma, 2012; Nguena, 2013).

BI sebagai bank sentral berperan penting dalam memelihara dan menjaga SSK nasional. Beberapa peran tersebut diantaranya:

1. BI bertugas untuk menjaga SSK melalui berbagai instrumen diantaranya instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Hal tersebut dikarenakan stabilitas moneter sangat berkaitan dengan SSK, dimana jika terdapat gangguan pada stabilitas moneter maka akan berdampak pula terhadap keberlangsungan SSK.
2. BI memiliki tugas dan peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya dalam bidang perbankan.
3. BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
4. BI bertugas untuk mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan SSK melalui fungsinya dalam riset dan

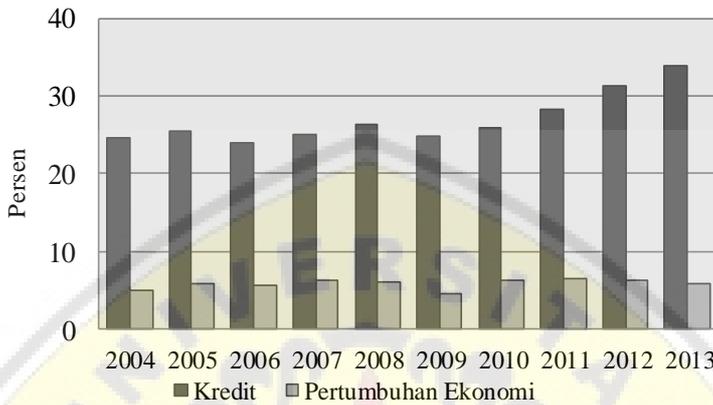
pemantauan. Kelima, BI memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi BI sebagai *Lender of the Last Resort* (LoLR).

### **2.2 Interaksi Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi**

Peranan sektor keuangan terhadap pembangunan ekonomi teraliansi dengan dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bagi pembangunan pada seluruh sektor pembangunan negeri (Levine, 1997). Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh instansi yang terkait secara berkelanjutan maka akan memberikan nilai peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini performa perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari besar kecilnya pemberian kredit terhadap sektor riil.

Paparan Gambar 2.1. merupakan perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi, kredit yang diberikan oleh perbankan dan pertumbuhan ekonomi dalam persentase, kredit yang diberikan oleh perbankan mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Setelah terjadinya krisis tahun 2008-2009 yang tidak menyebabkan *shock* terhadap fundamental ekonomi laju kredit yang disalurkan mengalami kenaikan hingga ditahun 2013 namun hal yang berbeda ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi yaitu meski kredit yang disalurkan mengalami kenaikan justru pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan adanya tekanan global atas kondisi ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse 2006). Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keadaan konsumen yang memungkinkan untuk melakukan pembelian lebih baik (Mishkin 2008).



Sumber: *World Bank*, 2014, diolah

**Gambar 2.1 Perkembangan Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi 2004-2013 di Indonesia (%)**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang bergantung terhadap situasi ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global turut pula menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Sehingga penguatan sistem keuangan diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Ketahanan keuangan menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi yang baik adalah pembangunan yang tidak teraglomerasi sehingga pemerataan pembangunan tercapai. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa kepulauan besar yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan Kepulauan Maluku.

Dari sisi spasial, penyaluran kredit perbankan masih didominasi oleh Pulau Jawa yang tertinggi dalam Tabel 2.3. Paparan Tabel 2.3 menunjukkan kondisi pangsa kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) di Indonesia rentang waktu tiga tahun. Konsentrasi terbesar kredit dan DPK adalah di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa terjadi aglomerasi pembangunan yang ditunjukkan dengan pangsa kredit terbesar yang berkisar 75 hingga 76 persen pangsa kredit serta diikuti komposisi pangsa DPK yang bergerak rata-rata 74 persen. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi yang berada di Pulau Jawa berbeda dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Mudah-mudahan akses masyarakat terhadap barang-barang produksi menjadi salah satu alasan Pulau Jawa dapat berkembang.

**Tabel 2.3 Pangsa Kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Pulau di Indonesia 2011-2013 (%)**

Pulau	Pangsa Kredit			Pangsa DPK		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Jawa	75,83	76,1	76,75	74,61	74,39	74,93
Sumatera	12,35	11,87	11,45	13,29	13,25	12,89
Kalimantan	4,85	4,98	4,77	4,29	4,38	4,37
Sulawesi	2,97	2,99	2,93	4,38	4,43	4,25
Bali & Nusa Tenggara	2,49	2,56	2,6	2,38	2,46	2,48
Papua dan Maluku	1,5	1,5	1,49	1,05	1,09	1,08

Sumber: Bank Indonesia. 2014.

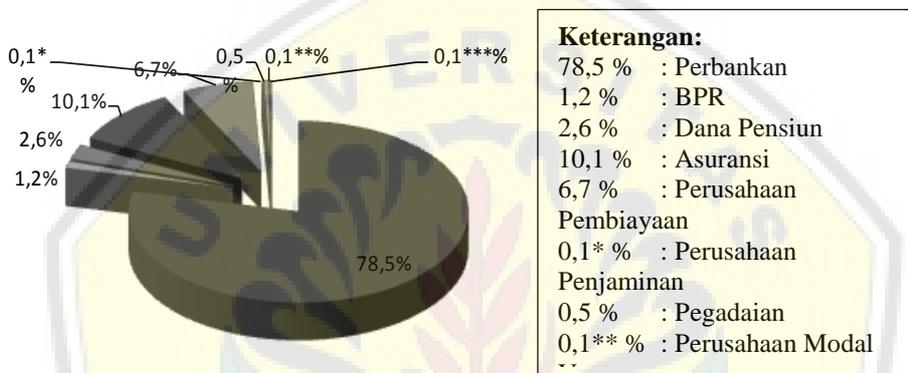
Keadaan yang sebaliknya terjadi di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, pulau ini menunjukkan nilai pangsa kredit dan DPK terkecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Letak geografis yang jauh dari ibu kota Indonesia menjadikan pulau ini kurang mendapat perhatian dalam pembangunan serta terbentur akan adat-istiadat yang masih mendominasi perilaku masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak cukup dengan permainan modal yang diberikan kepada masyarakat namun struktur dan karakter wilayah akan memengaruhi tindakan masyarakat dalam melakukan transaksi.

## 2.3 Karakteristik Lembaga Keuangan di Indonesia

Indonesia memiliki lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga keuangan bank didirikan tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha yaitu menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga, memberi kredit jangka menengah, mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan berbadan hukum pemerintah, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan konsumen, perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian, dan melakukan usaha lain di bidang keuangan. Lain halnya dengan lembaga keuangan bank yang terdiri atas bank sentral, umum, tabungan, pembangunan, dan bank desa.

Berdasarkan kepemilikannya terdiri atas bank pemerintah, swasta nasional, swasta asing, campuran, dan bank koperasi. Berikut adalah komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia pada Gambar 2.2.

Berdasarkan gambar 2.2 bahwa Perbankan mendominasi penguasaan aset lembaga keuangan di Indonesia sebesar 78,5 persen diikuti oleh asuransi sebesar 10,1 persen. Komposisi terbesar oleh perbankan dalam hal ini adalah lembaga keuangan formal yang bertindak sebagai penyimpan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali berupa kredit yang diberikan untuk pembiayaan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.



Sumber: Bank Indonesia. 2014

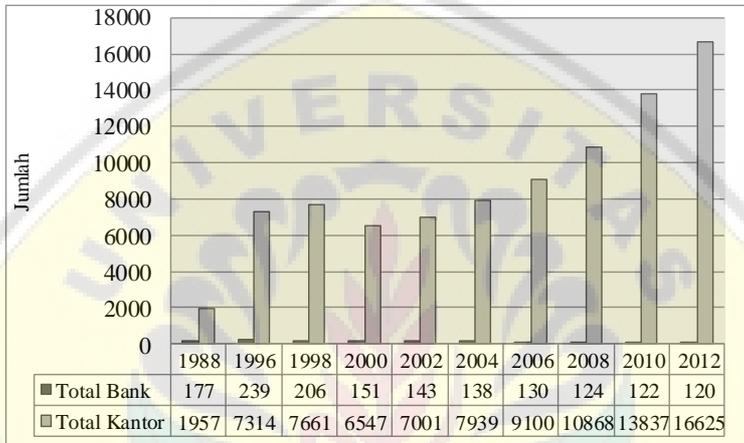
**Gambar 2.2 Komposisi Aset Lembaga Keuangan di Indonesia**

Perbankan sebagai lembaga institusi keuangan memiliki keterkaitan terhadap proses pembangunan ekonomi dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat, penyaluran tersebut terjadi dengan memberikan kredit yang kemudian digunakan untuk berbagai macam jenis kredit. Kredit yang baik adalah kredit yang diberikan pada kredit yang bersifat produksi sehingga manfaat yang ditimbulkan akan memiliki dampak ganda terhadap perekonomian.

Undang-Undang Pokok Perbankan No.23 Tahun 1998 jenis bank di Indonesia yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang sejenis. Khusus bagi lembaga keuangan bank di Indonesia menguasai 78 persen dari total aset industri sehingga bank memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian. Perkembangan jumlah bank di Indonesia yang disajikan dalam gambar 2.3.

Berdasarkan gambar 2.3 menunjukkan perkembangan jumlah bank umum di Indonesia, terlihat bahwa jumlah bank setelah terjadinya deregulasi

di bidang perbankan mengalami penurunan hingga tahun 2012. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan efisiensi dari operasi perbankan dalam perekonomian. Hal lain tercatat bahwa penurunan jumlah bank di Indonesia justru meningkatkan jumlah kantor bank beroperasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.



Sumber: Laporan pengawasan perbankan, 2014, diolah.

**Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Bank Umum di Indonesia**

Berkurangnya jumlah saingan dalam industri ini membuat bank dengan mudah melakukan ekspansi pasar. Namun menjamurnya jumlah kantor bank yang ada tidak kunjung menyelesaikan persoalan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia, hanya setengah dari populasi masyarakat Indonesia yang tersentuh oleh jasa keuangan. Kinerja perbankan paska krisis mengalami peningkatan baik dari efisiensi dan segi operasional sehingga upaya penguatan struktur industri perbankan dapat terwujud serta memperluas cakupan usaha untuk melayani masyarakat secara luas terhadap jasa keuangan di Indonesia.

### 2.4 Kedalaman Sistem Keuangan (*Financial deepening*)

*Financial deepening* dianggap sebagai prasyarat penting dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga sistem keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan secara mendalam. Beberapa studi empiris menjelaskan bahwa determinasi perkembangan sistem keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat tabungan investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara.

Kedalaman sistem keuangan suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengalokasikan dana secara efektif ke sektor-sektor yang potensial, meminimalkan risiko dengan diversifikasi produk keuangan, meningkatnya jumlah faktor produksi atau meningkatnya efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut, dan meningkatnya tingkat investasi atau marginal produktifitas akumulasi modal dengan penggunaan yang semakin efisien (Gregorio, 1999). Perekonomian suatu negara dapat membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat yang memiliki dana lebih ke masyarakat yang memiliki peluang-peluang investasi produktif (Mishkin, 2008).

Salah satu kunci pendalaman keuangan adalah hal tersebut mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses bagi yang memiliki keuangan yang kurang memadai. Pendalaman keuangan akan menimbulkan sektor industri keuangan, seperti industri perbankan yang kuat didalam perbankan, sementara disisi lain inklusi keuangan didorong untuk menciptakan akses yang luas terhadap layanan keuangan masyarakat (Mohan dan Hickey, 2004; Andrianaivo dan Kpodar, 2012). Sehingga permasalahan utama interaksi pendalaman dan inklusi keuangan terletak pada terjadinya *trade off* antara pencapaian industri perbankan yang kuat dan kemudahan akses layanan keuangan masyarakat.

Gregorio (1999) dan Alejandro (1985) mengemukakan bahwa pendalaman sistem keuangan suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengalokasikan dana secara efektif ke sektor-sektor yang potensial, meminimalkan risiko dengan diversifikasi produk keuangan, meningkatnya jumlah faktorproduksi atau meningkatnya efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut, dan meningkatnya tingkat investasi atau marginal produktifitas akumulasi modal dengan penggunaan yang semakin efisien.

Teori dasar *financial deepening* adalah bahwa pembangunan keuangan menciptakan, meningkatkan dan memungkinkan kondisi keuangan untuk pertumbuhan, baik dengan pasokan terkemuka (pengembangan keuangan memacu pertumbuhan) atau permintaan berikut (pertumbuhan menghasilkan permintaan untuk produk-produk keuangan) *channel* (Levine, 1997; Liu, 2003; Lynch, 1996; Kiyotaki dan Moore, 2005; dan Mohan, 2006). Sebuah sistem berfungsi dengan baik sistem keuangan menurut definisi memungkinkan untuk alokasi yang efisien dana untuk keperluan yang paling produktif, melayani tujuan penting, dan mengurangi dampak informasi dan biaya transaksi asimetris.

Singkatnya, manfaat *financial deepening* untuk pengembangan pasar keuangan (1) mengatasi friksi insentif pasar dan merapikan transaksi keuangan; (2) memanfaatkan skala ekonomi dalam pengumpulan data dan

Pendalaman Keuangan untuk mendukung Stabilitas Moneter dan Pertumbuhan Berkelanjutan ; (3) memungkinkan penabung individu untuk mengakses pasar keuangan yang memiliki risiko tinggi, proyek-proyek investasi jangka panjang; serta (4) meningkatkan alokasi sumber daya.

Mackinnon & Shaw (1973) dalam studinya mengutarakan bahwa *financial development* memiliki pengaruh ganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni yang pertama, pembangunan finansial dapat meningkatkan efisiensi dari akumulasi modal. Selanjutnya yang kedua, pembangunan finansial berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat tabungan dan tingkat investasi suatu negara.

Sistem keuangan yang dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan dapat memfasilitasi pihak yang memiliki kebutuhan likuiditas jangka pendek ataupun jangka panjang serta dapat mengalokasikan tingkat tabungan dan akumulasi modal terhadap aktivitas kegiatan ekonomi yang produktif pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bencivenga dan Smith, 1991). Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dan sektor riil. Sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan mengurangi risiko (diversifikasi) secara baik.

Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Sabirin (2002) memaparkan ukuran suatu sistem keuangan dikatakan stabil ketika institusi tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah tanpa adanya bantuan dari pihak luar (pemerintah maupun otoritas terkait).

Pada aras lain, studi lanjut yang dilakukan oleh Nasution (2003) mengemukakan jika keberadaan sistem keuangan (lembaga keuangan dan pasar modal) dapat menjalankan perannya dengan baik, maka semua unsur determinasi lembaga keuangan dan pasar modal diharapkan dalam kondisi yang kondusif. Sebagai contoh misalnya sektor riil yang mendukung, kebijakan moneter tidak menimbulkan distorsi, kebijakan fiskal juga kondusif, integritas sistem pembayaran tetap terjaga, dan semua aspek yang memberikan dorongan terciptanya lembaga keuangan yang sehat dan integritas pasar keuangan.

## 2.5 Bank sebagai *Financial Intermediaries*

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998).

Intermediasi merupakan kegiatan perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan intermediasi yang dilakukan oleh bank tidak hanya inter mediasi yang dilakukan antara bank dengan masyarakat tetapi juga antar bank satu dengan bank lain (Bindseil dan Jabtecki, 2011). Kusumaningtyas (2012) memaparkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat pada umumnya ada beberapa pilihan utama bank dalam menempatkan dananya untuk memperoleh pendapatan, yaitu (a) kredit yang dipilih karena return yang lebih baik, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan prospek usaha nasabah. (b) pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan alternatif penempatan dana yang aman, berisiko rendah, berjangka pendek dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi.

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan aliran modal, memiliki karakteristik perilaku yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Kredit yang diberikan oleh perbankan merupakan salah satu bentuk aset yang dimiliki oleh bank dalam mendapatkan *return* (Mishkin 2008:239; Murphy, 2010:176). Dana yang terkumpul dapat berasal dari dana pihak ketiga (DPK) maupun sumber dana lain (baik berasal dari *external borrowing* maupun *internal borrowing*). Hal ini dikarenakan dana tersebut mengandung biaya (*cost of fund*), sehingga untuk memperoleh keuntungan maka bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam berbagai bentuk aset yang mengandung tingkat *return* dan risiko tertentu sesuai dengan prinsip optimalisasi alokasi portofolio.

Tugas utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni prosespenyerapan surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Fungsi intermediasi keuangan perbankan muncul dari fenomena di pasar keuangan akibat dari mahalnyabiaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga karena adanya informasi *asymmetric* antara pemilik dana (*household/net savers*) dengan perusahaan pengguna dana (*corporations/netborrowers*)

sehingga dibutuhkan pihak perantara yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Insukindro, 1990; Saunders, 2008).

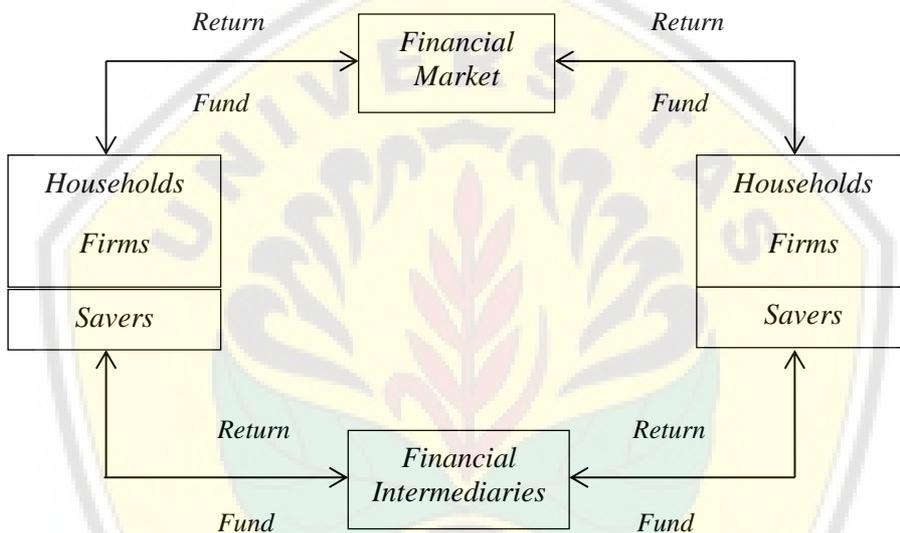
Studi intermediasi keuangan berawal dari asimetri informasi yang menghasilkan ketidaksempurnaan pasar dengan biaya transaksi tambahan. Diamond (1984) menunjukkan bahwa sebuah intermediasi dalam meningkatkan skala ekonomi serta sebagai monitoring atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Preposisi yang lain dikemukakan oleh Hart (1995), Hart dan Moore (1998), Qi (1998), Diamond dan Rajan (2001) yang menyatakan bahwa galibnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga (*households*) secara perlahan akan memengaruhi iklim investasi yang menciptakan perbaikan dalam manajemen perbankan dengan bertambahnya modal yang diterima oleh pihak lembaga keuangan. Untuk itu fokus pembangunan dalam intermediasi keuangan adalah pada proses pelaksanaan sebuah intermediasi dengan mengedepankan tujuan utama perekonomian.

Intermediasi keuangan merupakan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.

Fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika memiliki permodalan yang cukup, meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun besar apabila tidak diimbangi dengan tambahan modal maka bank akan memiliki hambatan dalam menyalurkan kredit. Senada dengan hal tersebut Kishan dan Opiela (2000) menemukan bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh aset dan modal bank. Oleh karenanya lembaga keuangan membutuhkan sebuah inovasi keuangan dalam pelaksanaan transaksi ekonomi yang terjadi (Miller, 1986).

Fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan akibat adanya perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan terutama terjadi dinegara-negara maju (*industrialized countries*) seperti negara-negara di Uni Eropa (Bikker & Wesseling, 2003). Perkembangan teknologi informasi, deregulasi, liberalisasi, internasionalisasi menjadi faktor penyebab teori intermediasi keuangan menjadi tidak relevan dengan praktik bisnis yang terjadi sekarang (Scholtens & Wensveen, 2003). Faktor-faktor tersebut cenderung untuk mengurangi biaya transaksi (*transaction-cost*) dan informasi asimetris antara penabung (*savers*) dengan investor dan hal ini bertentangan dengan fungsi intermediasi keuangan klasik. Bikker &

Wesseling (2003) juga menyatakan bahwa liberalisasi dan perkembangan teknologi informasi dipasar modal telah menyebabkan fungsi intermediasi beralih dari bank ke pasar modal dan lembaga keuangan non-intermediary seperti asuransi. Liberalisasi lembaga keuangan non-bank yaitu terlihat dalam proses memfasilitasi masyarakat untuk menyimpan aset dan melakukan investasi.



Sumber: Hubbart, 2002.

**Gambar 2.4 Transmisi Dana dalam Sistem Keuangan**

Berangkat dari Gambar 2.4. dapat dipertegas rupa transmisi antara dua elemen penting sistem keuangan, perbedaan mendasar antara dua elemen penting tersebut adalah pada pasar keuangan yang menghubungkan secara langsung antara penabung (*savers*) dan peminjam (*borrowers*). Pihak penabung individu memegang instrumen keuangan yang diterbitkan secara langsung oleh pihak peminjam individu. Sedangkan lembaga keuangan menghubungkan penabung dan peminjam secara tidak langsung. Lembaga ini memfasilitasi perdagangan keuangan dengan mengumpulkan dana dari penabung dan kemudian menginvestasikannya dalam bentuk utang yang diterbitkan oleh peminjam.

Pada titik yang lain dapat dipertegas bahwa konstelasi perekonomian dunia yang menglobal dan adanya persaingan antara lembaga perbankan dengan pasar modal secara tidak langsung memengaruhi aktivitas

intermediasi perbankan (*banking business activity*) (Siringoringo, 2012). Hal ini menyebabkan sektor perbankan mengalami konsolidasi perbankan melalui merger dan akuisisi dengan tujuan agar peningkatan konsolidasi juga memengaruhi peningkatan aset perbankan. Bikker & Wesseling (2003) memaparkan tingginya konsolidasi perbankan maka akan meningkatkan kepemilikan bank asing daripada kepemilikan bank domestik. Hal ini tidak terjadi di negara maju saja, tetapi juga terjadi di negara sedang berkembang.

Kondisi perekonomian terbuka yang menyebabkan integrasi diberbagai sektor akan merespon adanya gejolak moneter di luar negeri oleh perilaku perbankan domestik yang menjadi perdebatan para ahli dengan fokus pada *benefit* dan *cost* akibat interdependensi antar bank di dunia. Pernyataan Mishkin (2008) menyetujui bahwa globalisasi di sektor keuangan dan perbankan akan memberikan manfaat berupa perbaikan kelembagaan dan peraturan maupun pengawasan yang mengarahkan penggunaan modal menjadi lebih produktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara sejurus yang lain, pernyataan Goldberg (2009) dan Ponties dan Siregar (2012) memperjelas bahwa ketika negara berkembang sebagai *host country* mengalami guncangan, hadirnya perbankan asing akan memberikan kekuatan stabilitas tersendiri, dimana dapat memberikan likuiditas bagi negara tersebut. Pada aras lain Arestis dan Glickman (2002) mengemukakan bahwa adanya kemungkinan pinjaman dan pembiayaan dalam hal ini dari perbankan asing di luar negeri akan menyebabkan risiko ketidakstabilan semakin meningkat dan adanya tendensi terhadap kerapuhan finansial dari keterbukaan, liberalisasi di negara berkembang yang umumnya sebagai penerima pembiayaan maupun pinjaman luar negeri. Maka, ketika terjadi krisis akan berpengaruh pada neraca bank yaitu likuiditas yang dimilikinya. Perilaku bank dalam merespon gejolak tersebut berbeda satu sama lain, tergantung pada jenis bank tersebut. Kahsyap dan Stein (2000) serta Campello (2002) mengklasifikasikan jenis bank menjadi tiga, antara lain: bank kecil yang berdiri sendiri, bank kecil yang terafiliasi oleh bank besar yang bersifat *holding company*, dan bank besar itu sendiri.

Dalam menjalankan kegiatan intermediasinya, bank harus memperhatikan likuiditasnya yaitu terjadinya penarikan dana simpanan maupun pinjaman dengan tetap berupaya menjaga profitabilitasnya, untuk itu bank harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Fungsi intermediasi perbankan dapat dilakukan dengan optimal apabila didukung dengan kombinasi dana pihak ketiga (*debt*) dan modal sendiri (ekuitas) yang memadai. Apabila dana yang dihimpun dari masyarakat atau pihak ketiga sangat besar namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya. Senada dengan hal tersebut,

Kishan dan Opiela (2000) memaparkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit dipengaruhi oleh ukuran bank (*aset*) dan modal bank (*leverage ratio*) yaitu dengan penambahan ekuitas (modal sendiri). Namun berbeda tanpa adanya regulasi, *leverage* memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pemberian kredit yang beresiko (Inderst & Mueller, 2008). Sehingga penambahan modal melalui utang akan berpengaruh terhadap peningkatan penyaluran kredit.

## 2.6 Inklusi Keuangan Nasional

Dinamika sektor keuangan telah menjadi media transmisi pergerakan aktifitas ekonomi maupun sosial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Lerman & Bell, 2006). Kondisi ini didukung pula dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menjadikan akses keuangan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan bahkan telah terintegrasi secara global (Braunstein & Welch, 2002; Ministry of Education Toronto, 2011).

Peranan sistem keuangan menjadi relatif penting dalam suatu perekonomian negara di era globalisasi dewasa ini. Sektor keuangan dengan beragam produk-produk derivatifnya telah menjadi media penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin massif, sehingga seringkali perputaran dalam sistem keuangan mengakibatkan biaya transaksi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya *asymmetric information* yang dapat menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard* yang akhirnya akan menyebabkan inefisiensi (Schumpeter, 1934; Levine (1997 dan 2000). Pendapat lain memberi argumentasi yang berbeda seperti studi Meier dan Seers (1984). Studi tersebut menganggap sistem keuangan memiliki peran relatif kecil dalam pembangunan ekonomi, temuan ini sebangun dengan studi Lucas (1988) bahwa dalam kegiatan transaksi ekonomi tidak menyinggung peran sektor keuangan di dalamnya. Seiring dengan fluktuasi ekonomi yang dinamis, perbankan menjadi sektor dominan pada sistem keuangan yang akan meningkatkan tabungan dan mengakomodir pendanaan untuk investasi sehingga meningkatkan produktivitas modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya intermediasi keuangan (Fritzer, 2004; Kularatne, 2002).

Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi untuk memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian. Sehingga untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi diperlukan dukungan sinkronisasi aspek keuangan yakni inklusi keuangan untuk menciptakan keadaan yang seimbang dalam sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola

risiko dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi *shock*, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar (McFarlane, 1999; Houben, *et al.*, 2004; Schinasi, 2006; Nguena, 2013).

Alokasi sumber pendanaan pembangunan dilakukan dengan melakukan peningkatan peran sektor keuangan untuk mewujudkan pembangunan secara mandiri dan tidak bergantung dari bantuan luar negeri. Investasi sebagai salah satu dari upaya pemecahan masalah kekurangan modal. Selanjutnya Alquist (2006), Nkoro dan Uko (2012) memiliki kesamaan pemikiran bahwa investasi menjadi faktor penting pembentukan modal dalam rangka pembangunan ekonomi yang menjadi bagian dari aktivitas transaksi keuangan. Transaksi ekonomi membutuhkan sistem keuangan yang baik yang akan dengan cepat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan baik sehingga memperluas akses pinjaman masyarakat; sebaliknya dalam sistem keuangan yang belum berkembang, akses pinjaman terbatas dan orang-orang yang dibatasi oleh ketersediaan dan diharuskan mencari sumber informal seperti rentenir (Kar dan Pentecost, 2000; Kar, Agir, dan Peker, 2010).

Inklusi keuangan telah menjadi program Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan masyarakat.

Keuangan inklusi diawali dengan *financial exclusion* dengan hampir 3 miliar orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah konsep yang rumit dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan (Kempson dan Whyley, 1999). Pandangan Bank Dunia (2005) mengemukakan bahwasannya pengecualian keuangan meliputi empat bidang penting yakni tabungan, kredit, transaksi perbankan, dan asuransi. Secara umum, pengecualian keuangan dapat didefinisikan secara luas sebagai ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan dasar karena komplikasi yang menyertai dengan akses, kondisi, harga, pemasaran atau pengecualian diri dalam menanggapi pengalaman yang tidak menguntungkan atau persepsi individu maupun entitas.

Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan adalah kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Kendala dalam masyarakat adalah masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara kendala dalam meminjam adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi

tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sementara kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial, dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen.

Visi nasional Inklusi Keuangan dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia”.

Visi Inklusi Keuangan tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan strategi Inklusi Keuangan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep Inklusi Keuangan harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam Inklusi Keuangan adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah.
3. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi.
4. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal.
5. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Pertumbuhan perekonomian global yang semakin cepat dan terintegrasi memberikan implikasi penting dalam perkembangan sektor keuangan di hampir seluruh negara. Sektor keuangan dengan beragam produk-produk derivatifnya telah menjadi media penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin masif. Kondisi ini didukung pula dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga menjadikan kebutuhan terhadap produk keuangan tak dapat dihindarkan. Demikian halnya dengan akses sektor keuangan dalam menjangkau berbagai segmen atau kelompok masyarakat yang bukan hanya terintegrasi secara regional namun juga internasional.

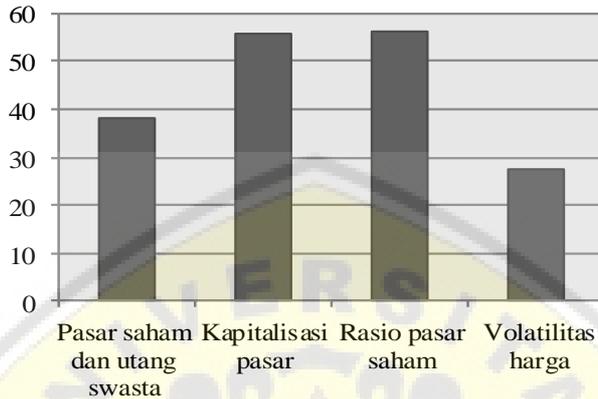
Tahapan inklusivitas Indonesia yang belum mapan ditinjau dari rendahnya akses disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional lembaga keuangan yang rumit, lemahnya edukasi keuangan, biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi lembaga keuangan dari masyarakat (King dan Levine, 1993; Rajan dan Zingales, 1998; Chami, *et al.*, 2009; Goswami dan Sharma, 2011). Inklusi keuangan merupakan upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Untuk mewujudkan program inklusi keuangan maka peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung perluasan akses kepada masyarakat miskin dan UMKM di Indonesia. Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah, maka akan mendorong peningkatan perputaran modal. Lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber: *Global Financial Development Report 2014*.

**Gambar 2.5 Karakteristik Sistem Keuangan Indonesia 2012 di Institusi Keuangan**

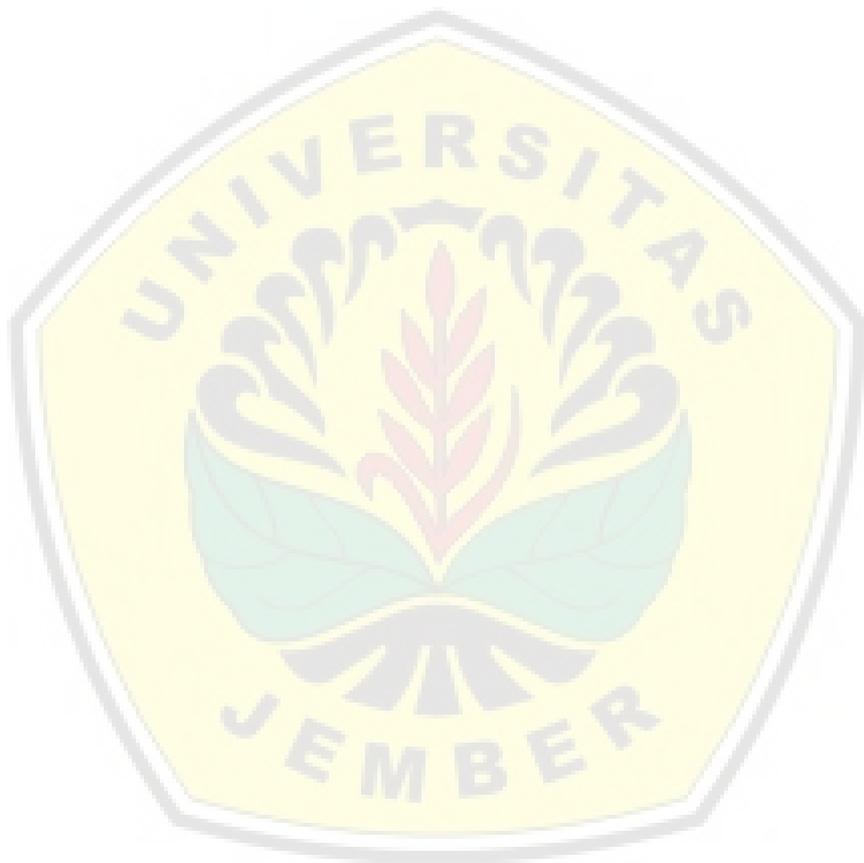
Gambar 2.5 dan 2.6 menggambarkan suatu karakteristik sistem keuangan di Indonesia pada tahun 2012 dimana terdapat dua aspek yakni institusi dan pasar keuangan. Secara keseluruhan pasar keuangan mengalami pergerakan transaksi dibandingkan aktivitas institusi keuangan. Institusi dalam hal ini adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam mendukung berjalannya aktivitas keuangan (Mc Kinnon, 1973).



Sumber: *Global Financial Development Report 2014*.

**Gambar 2.6 Karakteristik Sistem Keuangan Indonesia 2012 di Pasar Keuangan**

Jumlah akun di institusi keuangan formal lebih rendah dibandingkan kredit yang tumbuh pada gambar 2.5, kondisi ini menggambarkan bahwa dalam sistem keuangan formal dapat memberi kemudahan untuk mengakses jasa keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi (Hannig dan Jansen, 2010). Hal tersebut mewujudkan suatu proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk seluruh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta (Sarma, *et al.*, 2008).



## BAB TIGA

### KONDISI SOSIAL DEMOGRAFI DAN MAKROEKONOMI REGIONAL KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO

#### 3.1 Profil Sosial Demografi Kabupaten Jember

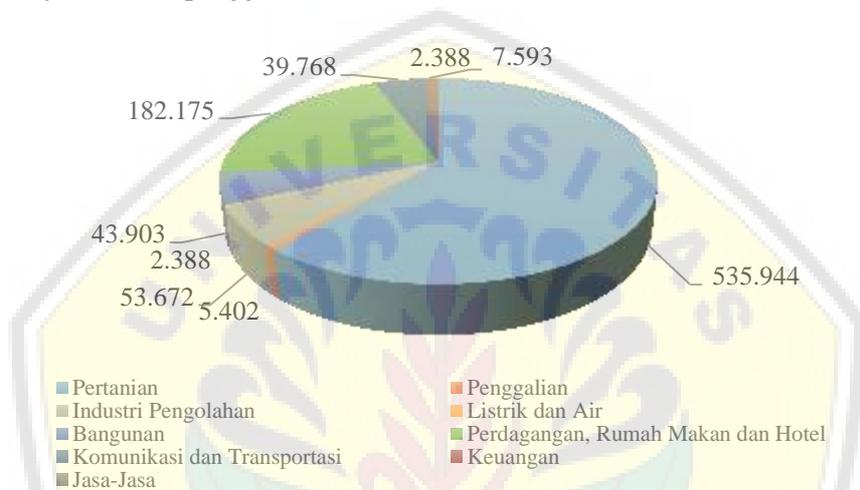
Sejalan dengan meningkatnya jumlah desa/kelurahan secara administratif menyebabkan adanya peningkatan trend jumlah penduduk di Kabupaten Jember (BPS Kabupaten Jember, 2015) Berdasarkan data statistik sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Jember mencapai 2.332.726 jiwa, dengan kepadatan penduduk 708,32 jiwa/km<sup>2</sup>, dan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda yaitu 15 hingga 19 tahun. Jumlah penduduk meningkat dibandingkan tahun 2009 yaitu sebanyak 2.329.929 jiwa dengan kepadatan 707,47 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 1.185.870 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki adalah 1.146.856 jiwa dan *sex ratio* 96,71 (BPS Kabupaten Jember, 2015).

Rata-rata sebaran penduduk terbesar pada kelompok umur produktif 15-19 tahun sebanyak 189.909 jiwa dan usia 20-24 tahun yaitu 173.999 jiwa. Jumlah angkatan kerja berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 1.159.591 jiwa terdiri dari yang bekerja sejumlah 1.032.782 jiwa dan pengangguran terbuka mencapai 16.189. Kondisi ini seiring dengan semakin meningkatnya dinamisasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Jember. Sedangkan jumlah yang tidak tergolong angkatan kerja adalah 567.672 jiwa. Komposisi jumlah penduduk berumur diatas 15 tahun yang berusaha sendiri adalah 261.762, berusaha dibantu 180.885 jiwa, buruh/karyawan 268.219. pekerja bebas 228.256 dan pekerja tidak dibayar 93.660.

Dari total penduduk di Kabupaten Jember, sekitar dua pertiganya termasuk dalam angkatan kerja. Selama periode 2012-2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jember menunjukkan peningkatan. Tahun 2012 TPT sebesar 3,77 persen naik menjadi 3,94 persen di tahun 2013 kemudian naik sebesar 0,7 poin menjadi 4,64 persen di tahun 2014. TPT ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

## 40 | INKLUSI KEUANGAN

Sementara itu, berdasarkan lapangan usahanya, sektor pertanian masih menjadi tumpuan lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Jember yang mencapai 45,34 persen, disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,64 persen. Hanya sekitar 1,24 persen yang bekerja di sektor penggalian, listrik dan air.



Sumber : BPS Kabupaten Jember, 2015

**Gambar 3.1 Struktur Lapangan Usaha Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Jember**

Indikator ketenagakerjaan yang lain yakni rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan selama sebulan di Kabupaten Jember selama tahun 2014 adalah Rp. 945.869,- lebih kecil dibandingkan tahun 2013 dengan rata-rata upah sebesar Rp. 983.390,- . Keduanya masih jauh di bawah UMK Kabupaten Jember diatas Satu Juta Rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jember. Selama 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Jember mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 hanya mencapai 59,94 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 62,64. Peningkatan nilai IPM Jember pada tahun 2014 dipengaruhi oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari 67,44 pada tahun 2010 meningkat menjadi 67,80. Sementara itu dari sisi indikator pendidikan, terjadi peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yakni pada tahun 2010 mencapai 5,49 tahun dan pada tahun 2014 menjadi 5,63 tahun. Sementara itu, anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,00 tahun atau

mencapai Diploma 1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,13 poin dalam empat tahun terakhir. Indikator standar hidup masyarakat Jember juga terus mengalami peningkatan selama empat periode terakhir. Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita penduduk Jember mencapai 7,38 juta per tahun dan terjadi peningkatan cukup besar pada tahun 2014 yakni sebesar 8,23 juta per tahun.

### 3.2 Kondisi Makroekonomi Regional Kabupaten Jember

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2014 sebesar 6,15 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2013 yang mencapai 6,22 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor konstruksi sebesar 13,24 persen dan diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,08 persen dan lapangan usaha listrik dan gas sebesar 8,58 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember tahun 2014 lebih tinggi 0,29 poin dari pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen.

Sumbangan pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,9 persen kemudian lapangan usaha kategori industri pengolahan sebesar 21,37 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 12,07 persen, konstruksi sebesar 7,27 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,27 persen dan lapangan usaha kategori pertambangan dan penggalian sebesar 5,29 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen. Sumbangan terbesar berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB Jember sebesar 7,12 persen dari sektor yang sama dalam PDRB Jawa Timur dan diikuti sektor Jasa Pendidikan dengan *share* sebesar 6,93 persen. Urutan ketiga ditempati oleh Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,16 persen. Jika dilihat dari sisi di luar sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, maka sektor Jasa Pendidikan lah yang mempunyai sumbangan terbesar dari sektor Jasa Pendidikan PDRB Jawa Timur.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Jember tahun 2014, struktur ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Jember masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor Industri Pengolahan, menjadi urutan kedua dengan *share* sebesar 21,37 persen terhadap total PDRB Kabupaten Jember dan disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mempunyai peranan sebesar 12,07 persen dari total PDRB Kabupaten Jember.

**Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2014**

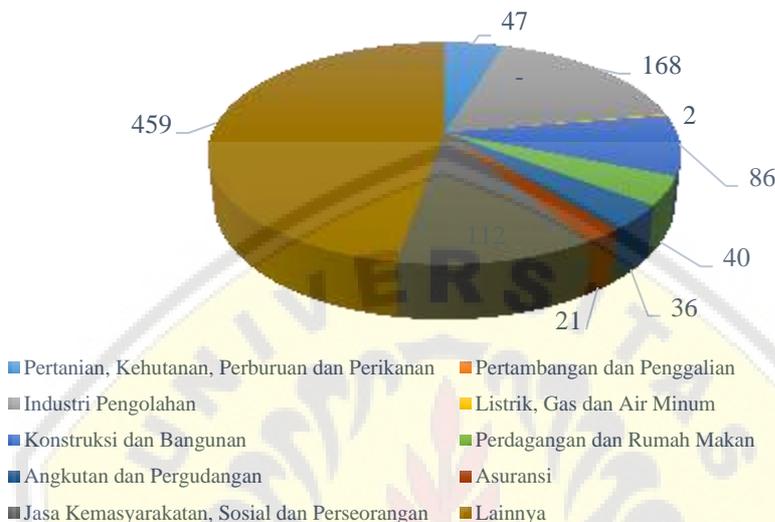
Sektor	Kabupaten Jember	Propinsi Jawa Timur	% Share
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.056,7	211.517,7	7,12
Pertambangan dan Penggalian	2.756,9	80.036,6	3,44
Industri Pengolahan	11.126,6	445.296,4	2,50
Pengadaan Listrik dan Gas	28,9	5.492,5	0,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,0	1.434,5	2,30
Konstruksi	3.783,8	145.884,6	2,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.286,6	256.690,1	2,37
Transportasi dan Pergudangan	795,3	49.280,7	1,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.053,2	79.946,8	1,32
Informasi dan Komunikasi	3.220,6	69.883,1	4,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.173,3	41.415,3	2,83
Real Estate	763,8	24.123,3	3,17
Jasa Perusahaan	173,8	12.177,9	1,43
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.840,3	35.658,5	5,16
Jasa Pendidikan	2.909,8	41.970,8	6,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373,5	9.682,7	3,86
Jasa lainnya	694,4	21.205,1	3,27
Produk Domestik Regional Bruto	52.070,5	1.540.696,5	3,38

Sumber: BPS, 2015

Pergerakan inflasi *month to month* Kabupaten Jember cukup tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Jawa Timur maupun Nasional. Tercatat pada bulan Juli, September dan Nopember tahun 2015, angka inflasi Kabupaten Jember lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan pada bulan September, angka Nasional menunjukkan deflasi sebesar -0,05 justru di Jember terjadi inflasi sebesar 0,29 persen. Sementara itu, laju inflasi *Year on Year* (YoY) Kabupaten Jember selama tahun 2015 berfluktuatif namun cenderung menunjukkan tren yang menurun. Tercatat pada awal tahun 2015 terjadi inflasi sebesar 5,96 persen dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada bulan Agustus yakni sebesar 6,65 persen. Setelah itu pergerakan inflasi terus mengalami penurunan hingga pada bulan Desember 2015 hanya tercatat 2,31 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi *Year on Year* (YoY) Jawa Timur dan Nasional, tercatat selama tahun 2015 dan Januari 2016 inflasi di Jember terus berada di bawah inflasi Jawa Timur dan Nasional, hanya pada bulan Oktober inflasi YoY Jember berada diatas angka inflasi Jawa Timur dan Nasional. Tingginya inflasi pada bulan Oktober tersebut dipicu oleh kenaikan harga komoditas jeruk, bawang merah, sepeda motor, wortel, pasta gigi, sewa rumah, kontrak rumah, rokok kretek filter, mobil dan kayu balokan.

### 3.3 Profil Sosial Demografi Kabupaten Bondowoso

Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 mencapai 756.989 jiwa terdiri dari 368.505 jiwa penduduk laki-laki dan 388.484 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan angka perbandingan jenis kelamin atau *sex ratio* sebesar 94,86 persen yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-laki, hal ini menunjukkan penduduk perempuan di Kabupaten Bondowoso lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk mencapai 485 jiwa/km<sup>2</sup> mengalami kenaikan yang berarti bila dibanding dengan kepadatan tahun 2013 yaitu sebesar 483 jiwa/km<sup>2</sup>. Di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, kecamatan Bondowoso mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 72.101 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.366 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan yang penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Botolinggo dengan jumlah penduduk sebesar 11789 jiwa, dengan kepadatan 106 jiwa/km<sup>2</sup>.



Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2015

**Gambar 3.2 Struktur Lapangan Usaha Penduduk Kabupaten Bondowoso**

Masalah ketenagakerjaan tidak lepas dari pencari kerja, permintaan, dan penempatan tenaga kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 mencapai 1.342 orang, mengalami penurunan 35,33 persen dibanding dengan tahun 2013. Jumlah permintaan lowongan pekerjaan 1.006 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan hanya 971 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 50 belum ditempatkan. Sementara itu, berdasarkan lapangan usahanya, sektor industri pengolahan menjadi lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Bondowoso dan diikuti sektor konstruksi dan bangunan, jasa kemasyarakatan dan sektor pertanian.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan, namun demikian IPM Bondowoso masih dalam kategori rendah dan masih berada pada urutan 36 dari 38 kabupaten / kota di Jawa Timur. Demikian halnya dengan IPM masing-masing kecamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2010 masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki IPM dibawah IPM Kabupaten.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu 63,47 dengan angka harapan hidup 63,4, angka melek huruf 78,05 dan angka rata-rata lama sekolah 5,8. Angka tersebut tergolong dalam kategori rendah karena masih berada pada urutan

ke-36 dari 38 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur dan masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten sekitar.

### 3.4 Kondisi Makroekonomi Regional Kabupaten Bondowoso

Struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso masih sangat tergantung pada sektor pertanian karena sektor ini masih menyumbang paling besar terhadap total PDRB yaitu sebesar 33,72 persen, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 20,84 persen. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 14,25 persen dan sektor konstruksi menyumbang sebesar 9,15 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,04 persen.

**Tabel 3.2 Distribusi PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 – 2014 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**

Sektor	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32,16	31,42
Pertambangan dan Penggalian	2,23	2,17
Industri Pengolahan	21,58	21,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08
Konstruksi	8,02	8,25
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,99	15,29
Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63	0,65
Informasi dan Komunikasi	5,74	5,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	2,88
Real Estate	1,21	1,24
Jasa Perusahaan	0,36	0,37
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,39
Jasa Pendidikan	3,36	3,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,75
Jasa lainnya	1,81	1,83
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kab.Bondowoso, 2015

Pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha pada tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang positif namun besarnya sangat bervariasi dari yang terendah sebesar 0,75persen hingga tertinggi mencapai 9,40 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 9,40 persen, kemudian disusul lapangan usaha kategori jasa perusahaan sebesar 9,04 persen dan di urutan ketiga dicapai oleh lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,84 persen, urutan selanjutnya ditempati oleh lapangan usaha kategori jasa pendidikan tumbuh sebesar 8,71 persen, kategori penyediaan jasa dan makan minum tumbuh sebesar 8,61 persen dan lapangan usaha kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 8,48 persen serta lapangan usaha kategori konstruksi tumbuh sebesar 8,06 persen untuk lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi maupun lapangan usaha kategori real estate masing-masing tumbuh sebesar 7,14 persen, 7,51 persen dan 6,88 persen sedangkan untuk lapangan usaha kategori pertanian, perkebunan dan perikanan, kategori pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah masing-masing tumbuh dibawah 5 persen. Karakteristik ini memungkinkan bagi Kabupaten Bondowoso untuk mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, perkebunan dan perikanan, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran secara simultan diikuti dengan perkembangan kategori jasa-jasa. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso mencapai Rp 17.271.147,- atau meningkat 10,21 persen dibanding tahun sebelumnya.

## BAB EMPAT

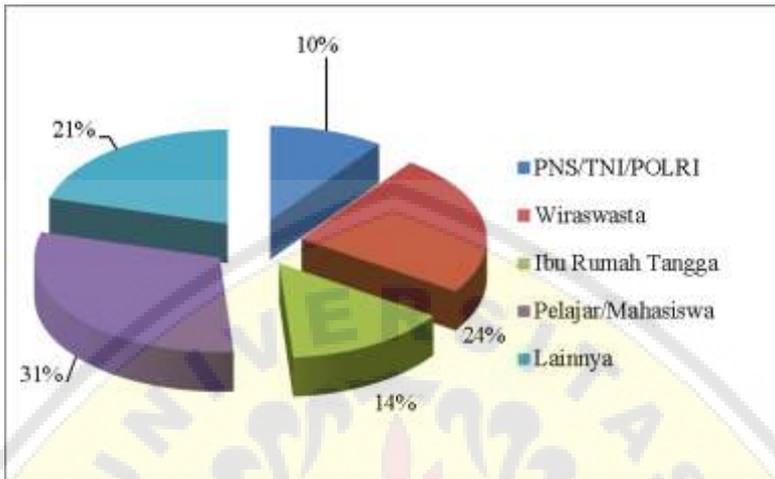
### INKLUSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO

Studi inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso mencakup profil umum atau sosial demografis responden yang menjadi sampel, deskripsi tingkat inklusi keuangan dan determinan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Responden yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Responden yang terpilih adalah dengan kisaran usia lebih dari 18 tahun hingga 70 tahun yang dianggap sudah matang dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan. Dari tiap kabupaten dipilih tiga kecamatan sebagai sampel dengan kriteria daerah maju, berkembang (moderat) dan tertinggal. Di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Sumpalsari sebagai daerah maju, Kecamatan Wuluhan sebagai daerah berkembang dan Kecamatan Kalisat sebagai daerah tertinggal. Sementara di Kabupaten Bondowoso meliputi Kota Bondowoso sebagai daerah maju, Kecamatan Sumber Wringin sebagai daerah berkembang dan Kecamatan Tenggarang sebagai daerah tertinggal. Jumlah responden untuk tiap kecamatan adalah 60 orang sehingga total responden sebanyak 180 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, kalangan pekerja baik pemerintah maupun swasta dan pelajar atau mahasiswa untuk tiap Kabupaten. Total responden untuk dua kabupaten adalah 360 orang.

#### 4.1 Sosial Demografis Responden

##### 4.1.1 Sosial Demografis Responden Kabupaten Jember

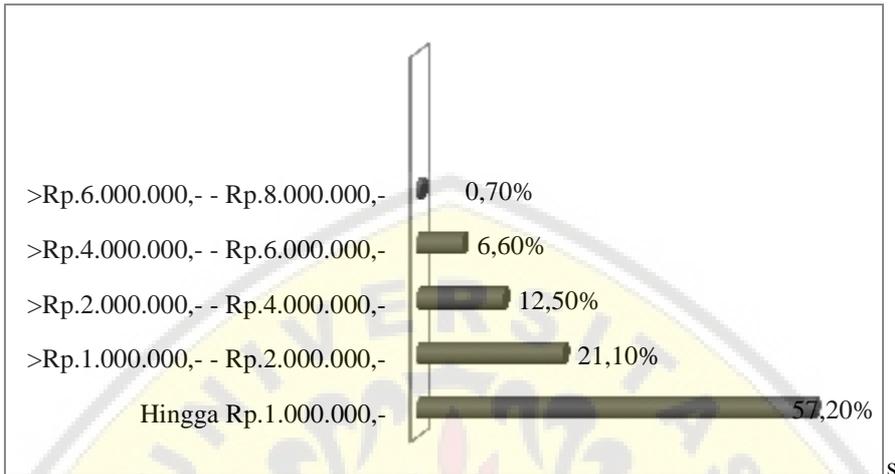
Responden dalam survey berjumlah 180 responden terdiri dari 58 orang laki-laki dan 122 orang perempuan. Pada umumnya responden telah menikah yaitu 62,1 persen dan 37,9 persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 hingga 36 tahun adalah 63,3 persen, antara 36 hingga 60 adalah 36,1 persen dan diatas 60 tahun adalah 0,6 persen. Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 14,4 persen ibu rumah tangga, 10 persen PNS/TNI/POLRI, 24,4 persen wiraswasta dan 30,6 persen pelajar atau mahasiswa.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.1** Komposisi Pekerjaan Responden di Kabupaten Jember

Distribusi tingkat pendapatan yang diperoleh responden rata-rata berada pada kisaran dibawah Rp. 1.000.000,- karena memang mayoritas responden adalah wiraswasta dan pelajar yang memiliki usaha atau bekerja pada sektor informal. Sementara 12,5 persen responden memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- diikuti sebanyak 21,1 persen responden dengan kisaran pendapatan antara Rp.1.000.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan 6,6 persen berada pada kisaran Rp.4.000.000,- hingga Rp.6.000.000,-. Begitu halnya dengan responden yang memiliki pendapatan menengah yaitu berkisar antara Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,sebanyak 0,7 persen. Distribusi pendapatan ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sampel kajian lebih terkonsentrasi pada wiraswasta dan pelajar yang nantinya akan mempengaruhi pola aktifitas keuangan yang cukup beragam dengan frekuensi yang cukup tinggi. Jenis pekerjaan juga akan mempengaruhi pola pembagian pengeluaran yang meliputi konsumsi dan tabungan. Semakin tinggi pendapatan tidak serta merta tingkat konsumsi penduduk akan meningkat searah dengan perubahan peningkatan pendapatannya. Peningkatan tersebut diimbangi dengan adanya pos lain yang akan meningkat diantaranya ke arah tabungan.

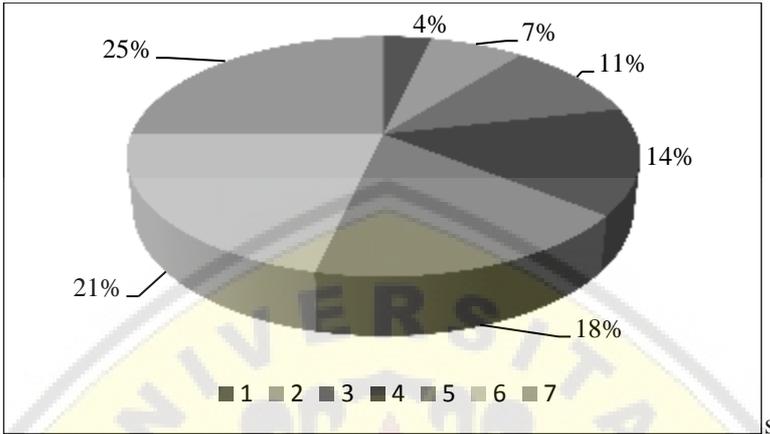


Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.2 Distribusi Pendapatan Responden di Kabupaten Jember**

Variasi pendapatan tersebut pada dasarnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang memiliki jumlah variatif juga. Secara otomatis, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki maka masyarakat akan berusaha untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Berdasarkan Gambar 4.3 sebagian besar jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki responden Kabupaten Jember sebanyak 7 orang yang diikuti jumlah keluarga sebanyak 6 orang. Kondisi tersebut terjadi karena responden memiliki tanggungan dari keluarga besar yang terdiri dari Suami, Istri, Anak, Orang Tua/Mertua, dan keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah.

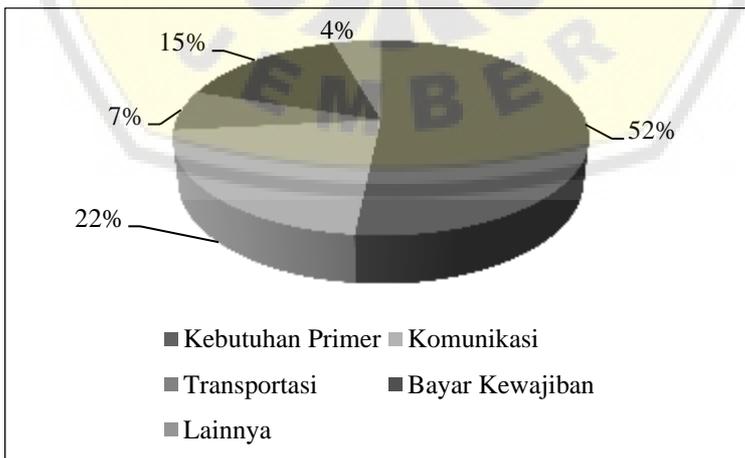
Jamaknya tanggungan yang dibebankan pada responden juga mengakibatkan variasi komponen pengeluaran yang harus menjadi kegiatan bulanan, mingguan atau bahkan harian. Pendapatan responden umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer yang mana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tendensi kedua dan ketiga, komponen pengeluaran yang selalu dianggarkan dalam pengeluarannya adalah komunikasi dan biaya kewajiban. Seiring berkembangnya jaman yang memaksa masyarakat untuk lebih cerdas dalam berkomunikasi kini, hampir seluruh kegiatan sosial masyarakat menggunakan media komunikasi yang mana pada dasarnya membutuhkan biaya.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.3 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Kabupaten Jember**

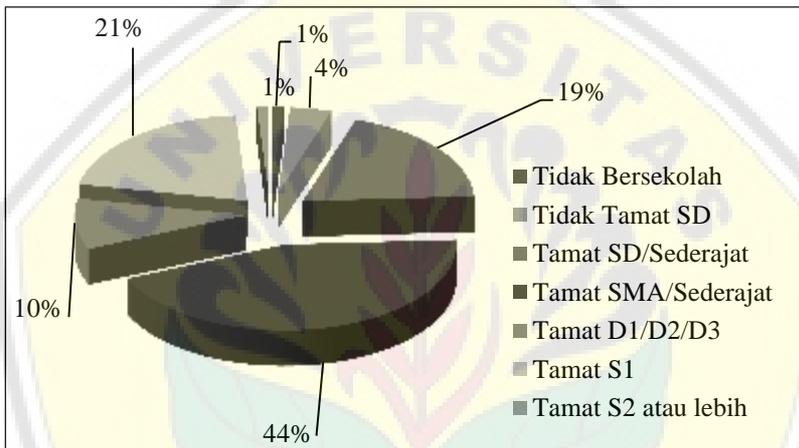
Apalagi bila dalam satu rumah, seluruh anggota menggunakan fasilitas komunikasi maka kebutuhan semakin meningkat. Selanjutnya komponen pengeluaran yang dianggarkan untuk pembayaran biaya kewajiban. Komponen ini harus selalu dianggarkan karena biaya kewajiban merupakan biaya yang harus dibayarkan secara rutin diantaranya kebutuhan biaya pendidikan, listrik dan air. Sebagian responden juga menganggarkan pos ini untuk pembayaran pelunasan hutang mereka secara periodik.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.4 Komponen Pengeluaran Responden di Kabupaten Jember**

Tingkat pendapatan dan variasi kebutuhan responden juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pendidikannya. Asumsinya bila pendidikan seseorang semakin tinggi maka pekerjaan yang dipilih akan lebih baik. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh semakin tinggi sehingga komponen pengeluaran pun semakin bervariasi. Berdasarkan tingkat pendidikan responden level tertinggi adalah telah menyelesaikan pendidikan SMA sebanyak 44,4 persen dan S1 sebanyak 20,8 persen.



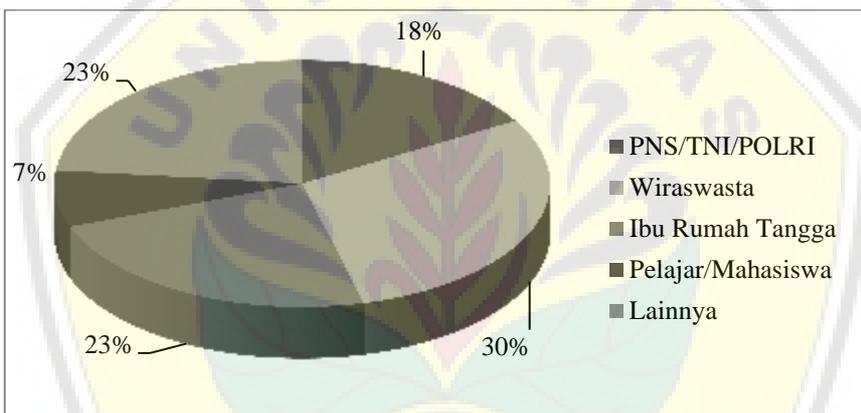
Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.5 Komposisi Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Jember**

Responden lain sebanyak 33.7% memiliki distribusi tingkat pendidikan dasar atau diploma. Sementara responden yang tanpa menempuh jenjang pendidikan sebanyak 1,1%. Pencapaian pendidikan yang masih sebatas pemenuhan kewajiban pendidikan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memiliki *mindset* pentingnya tingkat pendidikan untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bahkan bila dipahami semakin jauh, bila pendidikan masyarakat semakin tinggi maka masalah inklusi keuangan di Kabupaten Jember akan terus berkurang. Proyeksi komposisi pendidikan ini mendukung data sebelumnya terkait jenis pekerjaan responden yang mana di dominasi oleh pekerja wiraswasta. Pendidikan pada tingkat SMA mendorong untuk terus bekerja dan memperoleh pendapatan sehingga responden pada tingkat pendidikan ini hanya dapat berkarya pada ruang kerja wiraswasta.

## 4.1.2 Sosial Demografis Responden Kabupaten Bondowoso

Responden dalam survey berjumlah 180 responden terdiri dari 81 orang laki-laki dan 99 orang perempuan. Pada umumnya responden telah menikah yaitu 80 persen dan 20 persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 hingga 36 tahun adalah 64,2 persen, antara 36 hingga 60 adalah 34,7 persen dan diatas 60 tahun adalah 1,1 persen. Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 23,3 persen ibu rumah tangga, 16,5 persen PNS/TNI/POLRI, 29,5 persen wiraswasta dan 7,4 persen pelajar atau mahasiswa.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.6** Komposisi Pekerjaan Responden di Kabupaten Bondowoso

Paparan kondisi budaya di atas memengaruhi masih rendahnya tingkat pendapatan responden. Rata-rata pendapatan responden hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan primer. Distribusi tingkat pendapatan yang diperoleh responden rata-rata berada pada kisaran dibawah Rp. 1.000.000,- karena memang mayoritas responden adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha atau bekerja pada sektor informal. Sementara 25,6 persen responden memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- diikuti sebanyak 46,2 persen responden dengan kisaran pendapatan antara Rp.1.000.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan 1,9 persen berada pada kisaran Rp.4.000.000,- hingga Rp.6.000.000,- begitu halnya dengan responden yang memiliki pendapatan menengah yaitu berkisar antara Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,- yaitu sebanyak 1,9 persen. Distribusi pendapatan ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sampel kajian lebih terkonsentrasi pada wiraswasta dan ibu rumah tangga yang nantinya akan memengaruhi pola

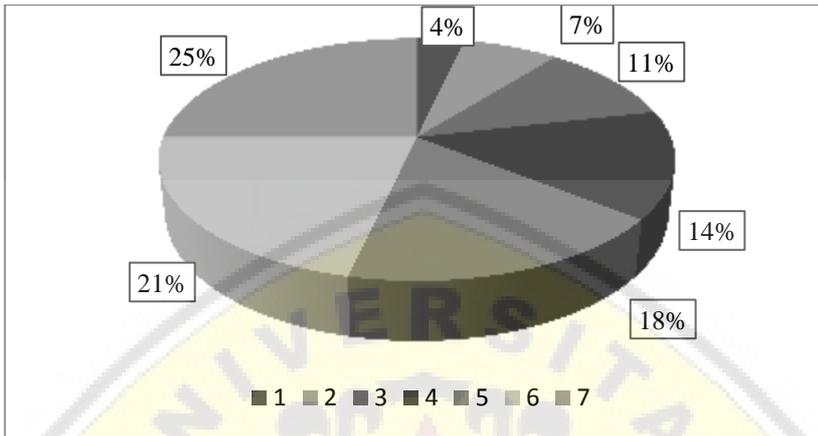
aktivitas keuangan yang cukup beragam dengan frekuensi yang cukup tinggi meskipun pendapatan mereka paling rendah karena hanya berupa pekerjaan sampingan sebagai anggota rumah tangga. Hal ini mengingat ibu rumah tangga pada umumnya memiliki tugas utama dalam pengelolaan keuangan keluarga. Maksudnya ibu rumah tangga mengatur seluruh kebutuhan keluarga baik suami maupun anak, dari kebutuhan kerja hingga kebutuhan sekolah serta kebutuhan rumah tangga sendiri.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.7 Distribusi Pendapatan Responden di Kabupaten Bondowoso**

Variasi pendapatan tersebut pada dasarnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang memiliki jumlah variatif juga. Secara otomatis, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki maka masyarakat akan berusaha untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki responden Kabupaten Bondowoso sebanyak 7 orang yang diikuti jumlah keluarga sebanyak 6 orang. Kondisi tersebut terjadi karena responden memiliki tanggungan dari keluarga besar yang terdiri dari Suami, Istri, Anak, Orang Tua/Mertua, dan keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah. Kadangkala tanggungan keluarga yang dibebankan pada responden bukan hanya keluarga yang tercatat pada Surat Keterangan Keluarga (KK) tetapi sebagian responden memiliki tanggungan hanya berdasarkan hubungan biasa seperti teman, anak buah, dan lainnya namun tinggal satu atap.

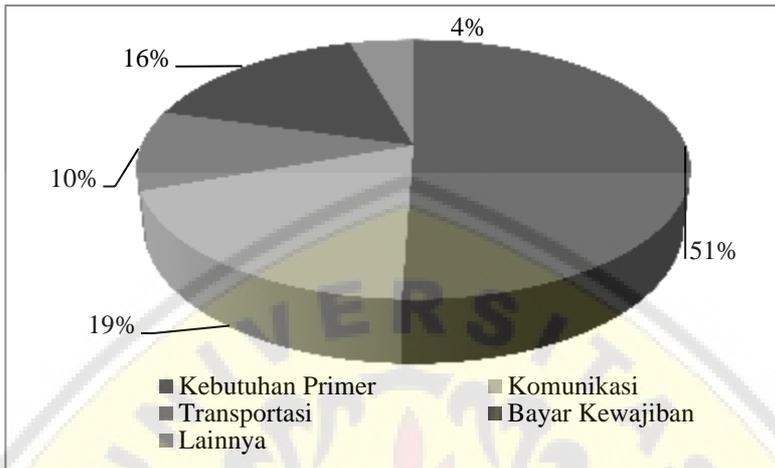


Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.8 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Kabupaten Bondowoso**

Jumlah tanggungan yang dibebankan pada responden juga mengakibatkan variasi komponen pengeluaran yang harus menjadi kegiatan bulanan, mingguan atau bahkan harian. Pendapatan responden umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer yang mana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tendensi kedua dan ketiga, komponen pengeluaran yang selalu dianggarkan dalam pengeluarannya adalah komunikasi dan biaya kewajiban. Seiring berkembangnya zaman yang memaksa masyarakat untuk lebih cerdas dalam berkomunikasi, kini hampir seluruh kegiatan sosial masyarakat menggunakan media komunikasi yang mana pada dasarnya membutuhkan biaya. Apalagi bila dalam satu rumah, seluruh anggota menggunakan fasilitas komunikasi maka kebutuhan semakin meningkat.

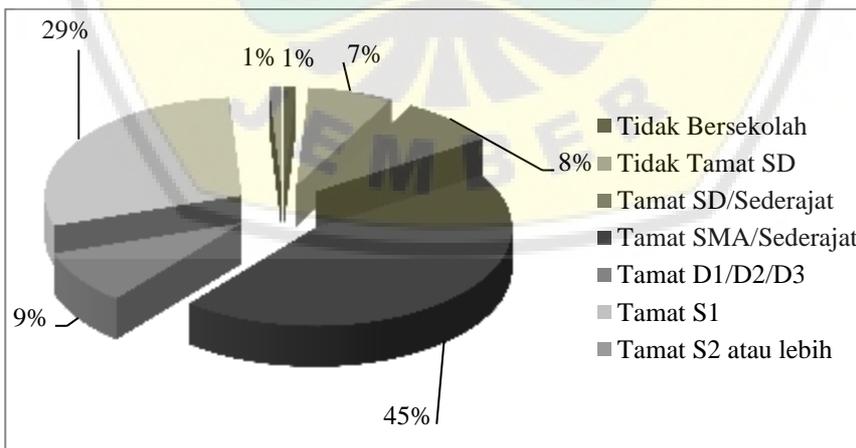
Selanjutnya komponen pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar keperluan wajib seperti biaya pendidikan, listrik dan air. Mungkin beberapa pembayaran kewajiban responden juga menggambarkan pembayaran untuk hutang mereka baik pada lembaga perbankan maupun rentenir. Oleh karena itu setiap anggaran pos pengeluaran, poin ini selalu menjadi daftar dalam komponen pengeluaran responden.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.9 Komponen Pengeluaran Responden di Kabupaten Bondowoso**

Berdasarkan tingkat pendidikan responden level tertinggi adalah telah menyelesaikan pendidikan SMA sebanyak 45,5 persen dan S1 sebanyak 28,7 persen. Sementara responden yang tanpa menempuh jenjang pendidikan sebanyak 0,6 persen.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.10 Komposisi Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Bondowoso**

Gambaran ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso belum memiliki kualitas sumber daya yang mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pendidikan yang hanya sebatas lulusan SMA memicu responden untuk menutup diri dari informasi lembaga keuangan. Hal tersebut timbul karena pola pikir responden Kabupaten Bondowoso dengan tingkat pendidikan SMA sehingga pekerjaan yang dapat diperoleh hanya sebatas sebagai pekerja. Oleh karena itu pendapatan responden pun sulit untuk ditingkatkan dan dampaknya lembaga keuangan yang tersedia tidak dapat diakses dengan baik.

### 4.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat

Inklusi keuangan telah menjadi diskusi menarik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah rekening tabungan di dunia lebih besar dari jumlah penduduk dunia namun 2,5 juta masyarakat atau separuh dari masyarakat dewasa masih belum memiliki tabungan atau unbanked (Alberto Chaia, 2009). Dalam tataran makro, perkembangan keuangan adalah mengukur kedalaman jasa keuangan seperti proporsi jumlah kredit sektor swasta terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Oleh karena itu inklusi keuangan terkait langsung dengan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Inklusi keuangan juga memiliki peran penting terhadap pembangunan kualitas manusia. Sementara pada tataran mikro, inklusi keuangan berperan untuk membantu masyarakat terhadap kemudahan akses jasa keuangan sekaligus untuk memitigasi resiko pada saat terjadi gejolak perekonomian. Inklusi keuangan memberikan gambaran *unbanked population* terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal baik dalam aktivitas menabung, pembayaran, kredit dan asuransi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang didesain untuk mengeliminir berbagai kendala terhadap akses keuangan (Hannig dan Jansen, 2010).

#### 4.2.1 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Jember

Akses terhadap lembaga keuangan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi yang semakin masif dan tanpa mengenal batas wilayah. Peran perbankan sebagai lembaga keuangan dengan komposisi aset dan kepemilikan produk keuangan di masyarakat yang terbesar diantara lembaga keuangan lainnya, menjadikan perbankan menjadi media penting dalam mempermudah semua kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah. Masih banyaknya masyarakat yang belum terjangkau perbankan menjadi sebuah tugas penting dari otoritas lembaga keuangan dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan masyarakat

terutama yang berada di wilayah yang sulit terjangkau maupun masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah.

Studi lapangan menunjukkan bahwa 50% masyarakat enggan untuk mengakses lembaga perbankan karena terdapat masalah pada persyaratan pengajuan rekening. Birokrasi yang begitu rumit membuat masyarakat merasa dipersulit lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan yang dekat di lingkungan masyarakat dirasa masih terlalu jauh untuk dijangkau. Selain itu 33% masyarakat berpersepsi bahwa proses dalam pengajuan juga membutuhkan waktu yang lama. Bila dibandingkan dengan lembaga keuangan nonformal yang memberikan kemudahan proses pengajuan maka masyarakat pun enggan untuk berpindah ke lembaga keuangan formal.

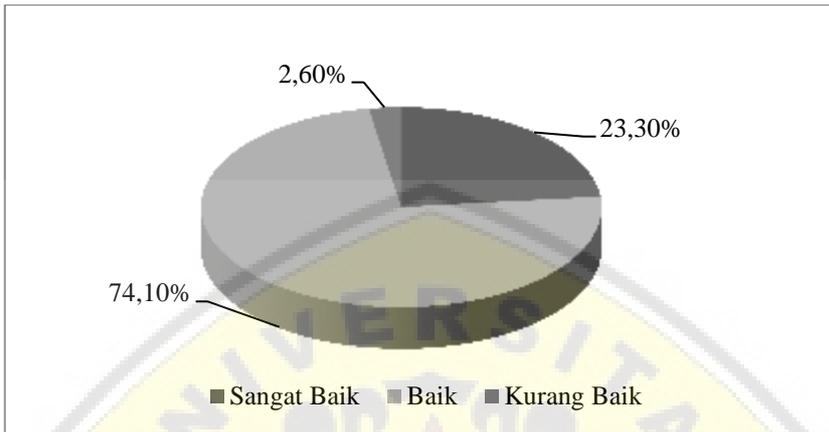


Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.11 Keengganan Masyarakat Mengakses Perbankan di Kabupaten Jember**

Di Kabupaten Jember, ketersediaan jumlah bank pada setiap wilayah sampel 84 persen menurut pendapat responden telah ada dan 16 persen lainnya menjawab tidak ada di sekitar tempat tinggal mereka. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena beberapa responden tidak memiliki informasi tentang lembaga keuangan. Selain itu juga disebabkan oleh jarak tempat tinggal dengan bank. Rata-rata jarak antara tempat tinggal dengan bank adalah kurang dari 5 km sebanyak 77,7 persen, antara 6 km hingga 10 km sejumlah 14,9 persen dan lebih dari 10 km adalah 7,4 persen. Sementara rata-rata jumlah bank berkisar antar satu hingga dua bank.

Selain transaksi melalui bank secara langsung, masyarakat juga disediakan fasilitas perbankan melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) dimana 84,4 persen masyarakat telah menggunakan fasilitas tersebut dan 15,6 persen yang belum menggunakan fasilitas tersebut.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.12 Persepsi terhadap Tingkat Pelayanan Bank di Kabupaten Jember**

Jumlah fasilitas *Automatic Teller Machine* (ATM) di tiap wilayah rata-rata hanya satu hingga dua ATM sesuai dengan keberadaan jumlah bank yang ada di tiap wilayah. Sementara dari sisi jarak tempat tinggal dengan ATM rata-rata kurang dari 5 km sebanyak 81,1 persen, antara 6 km hingga 10 km sebanyak 13,1 persen dan lebih dari 10 km adalah 5,7 persen. Oleh karena itu sebagian responden belum dapat mengakses fasilitas ATM. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya jumlah fasilitas perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dilihat dari respon masyarakat terhadap pelayanan akses lembaga perbankan pada umumnya bank memiliki pelayanan yang baik, baik dalam penawaran produk dan suku bunga maupun pemberian informasi mengenai jasa keuangan. Sebanyak 2,6 persen masyarakat menilai kurang baik, yang disebabkan masih rendahnya akses informasi dari lembaga keuangan secara langsung ke masyarakat, biasanya pelayanan informasi diperoleh masyarakat pada saat datang ke bank. Informasi melalui media elektronik belum mampu dijangkau secara langsung oleh masyarakat mengingat masih rendahnya literasi masyarakat dan rendahnya kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi terkait dengan jasa perbankan. Sementara lembaga keuangan nonformal memberikan akses yang mudah dan minim persyaratan. Oleh karena itu responden lebih tertarik pada lembaga nonformal meskipun risiko yang diperoleh lebih tinggi.

Berdasarkan kepemilikan terhadap produk keuangan, sebanyak 88 persen masyarakat di Kabupaten Bondowoso telah memiliki rekening tabungan di bank dan hanya 12 persen yang belum memiliki tabungan.

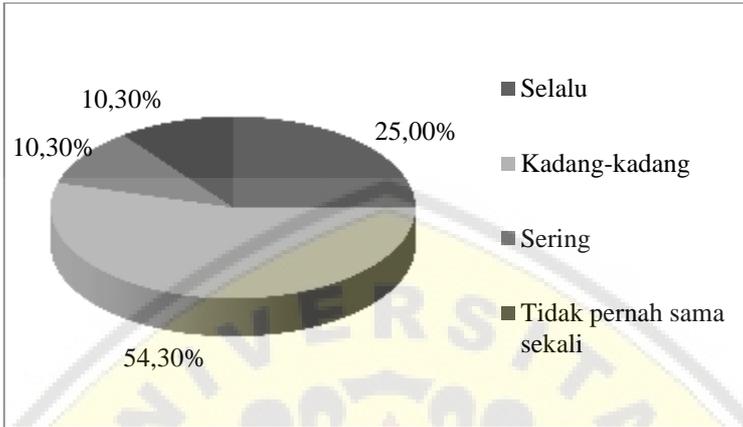
Alasan masyarakat tidak memiliki rekening karena tidak memiliki uang dan masyarakat merasa masih besarnya biaya administrasi dalam rekening mereka. Rata-rata masyarakat memiliki jumlah rekening satu hingga dua rekening dan sebagian besar adalah jenis tabungan. Biasanya rekening yang dimiliki responden pekerja merupakan rekening yang disediakan oleh perusahaan dan rekening yang digunakan untuk responden yang memiliki anggota keluarga di luar daerahnya. Sementara intensitas menabung masyarakat minimal sekali dalam sebulan sebanyak 30,8 persen dan menyetor pada saat memiliki kesempatan sebanyak 47 persen.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.13 Intensitas Menabung Masyarakat di Kabupaten Jember**

Masyarakat pada umumnya telah banyak memanfaatkan transaksi melalui perbankan, yang diindikasikan dengan intensitas masyarakat yang sering dalam melakukan *checking* terhadap rekening maupun penarikan secara tunai. Rata-rata penggunaan rekening adalah untuk penarikan tunai dan transaksi perbankan lainnya.

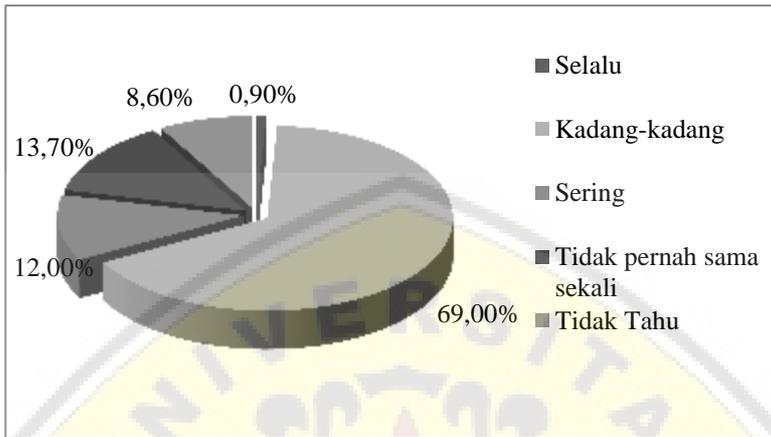


Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.14 Intensitas *Checking* Rekening di Kabupaten Jember**

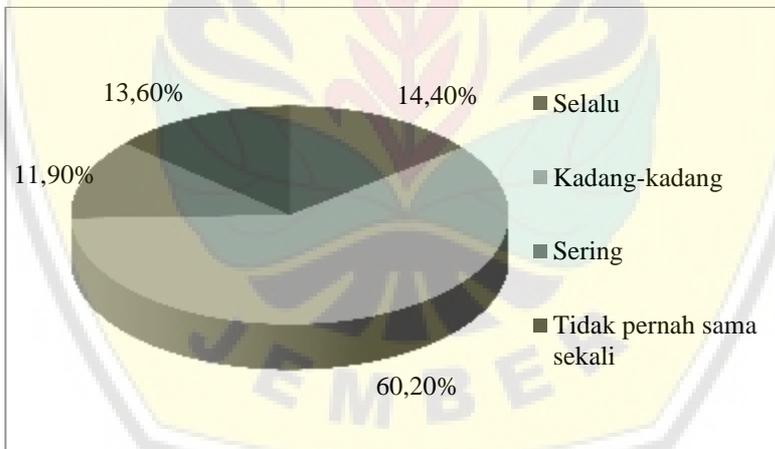
Intensitas responden melakukan penarikan tunai pada rentang periode kadang-kadang sebesar 69%. Hal ini terjadi karena beberapa indikator diantaranya jarak tempat tinggal responden dengan bank atau ATM, jumlah saldo, dan kebutuhan transaksi. Sedangkan 31% responden lainnya mayoritas mengutarakan lebih jarang melakukan transaksi atau penarikan tunai. Responden menggunakan rekeningnya untuk tabungan sehingga saldo dalam rekening hanya digunakan pada waktu tertentu.

Hal yang sama juga pada penggunaan layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) dimana sebagian besar masyarakat kadang-kadang menggunakan ATM untuk transaksi keuangan dan hanya 14,4 persen yang selalu menggunakan ATM. Umumnya penggunaan ATM adalah untuk penarikan tunai sebanyak 68,4 persen dan transfer sebanyak 12,3 persen, sementara transaksi lainnya seperti untuk pembayaran tagihan, cek saldo rekening dan lainnya. Paparan tersebut mengindikasikan responden memiliki pengetahuan yang rendah dalam menggunakan fasilitas ATM. Bahkan beberapa responden merasa transaksi apapun lebih aman dan memiliki risiko rendah bila dilaksanakan di lembaga keuangan langsung yang mana dilayani oleh pegawainya.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.15 Intensitas Penarikan Tunai**

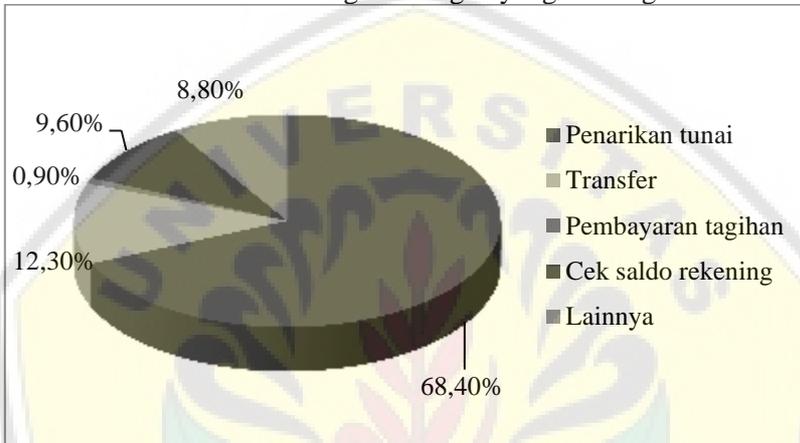


Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.16 Intensitas Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM)**

Pada aras lain, kecanggihan teknologi yang digunakan lembaga keuangan dalam mengakselerasi akses keuangan memberikan dampak positif. Fasilitas yang disediakan lembaga keuangan menambah alternatif responden untuk mempermudah aksesibilitas keuangannya. Selain penggunaan jasa perbankan melalui ATM, sebagian kecil masyarakat juga telah menggunakan fasilitas *mobile banking* dalam mempermudah transaksi keuangan. Pengenalan *mobile banking* yang sedang marak digunakan sebagian responden memberikan kemudahan baru dalam melakukan

transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer, *checking*, dan lain sebagainya. Namun inovasi lembaga keuangan ini belum sepenuhnya mempermudah transaksi karena beberapa kegiatan transaksi memaksa responden untuk langsung datang ke lembaga keuangan atau ATM. Sebagai contoh, transaksi penarikan tunai dan setoran tunai yang harus dilakukan dengan menggunakan mesin ATM dan di kantor lembaga keuangan yang bersangkutan.

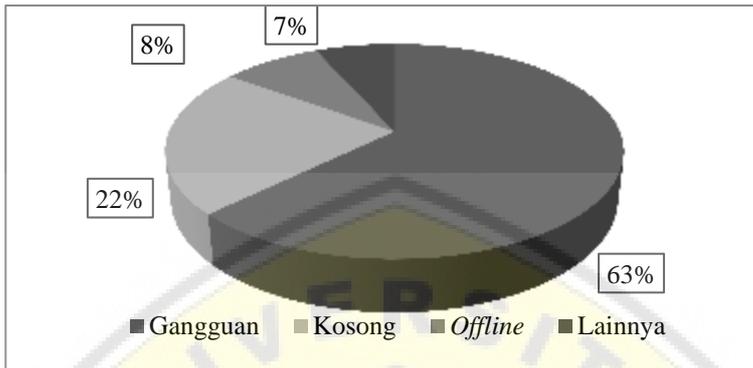


Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.17 Tujuan Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM)**

Alasan lain responden tidak suka menggunakan fasilitas mesin ATM yaitu karena seringnya permasalahan dalam penggunaan ATM. Umumnya permasalahan yang dirasakan masyarakat diantaranya karena ATM sedang gangguan, saldo ATM kosong, mesin ATM sedang *offline* atau mati bahkan sedang dalam perbaikan, serta alasan lainnya.

Bila dilihat dari hasil kajian, responden enggan menggunakan fasilitas ATM maka mayoritas masyarakat sebesar 63% mengungkapkan bahwa ATM di lingkungan mereka sering mengalami gangguan. Selanjutnya responden juga mengutarakan alasan lainnya yang menggambarkan keengganan mereka untuk menggunakan fasilitas ATM karena alasan seperti mesin rusak, mati lampu, antrian yang panjang, dan lain sebagainya. Ketidaknyamanan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa responden memilih alternatif lain dalam bertransaksi.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

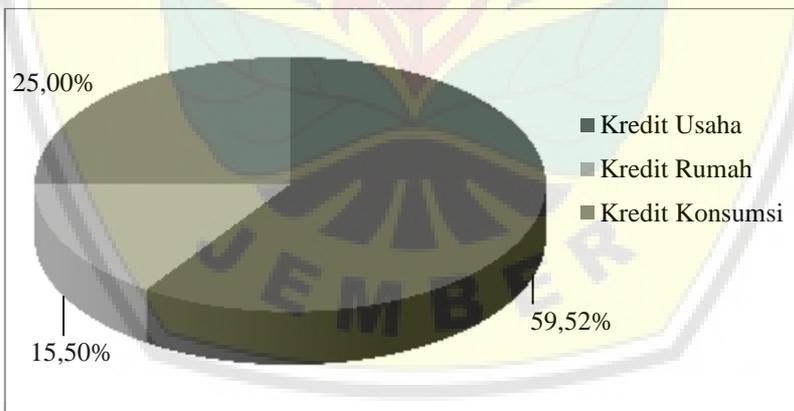
**Gambar 4.18 Masalah Penggunaan ATM**

Sebanyak 12,8 persen masyarakat telah menggunakan *mobile banking* dan pada umumnya adalah pelajar dan pegawai yang dinilai telah *well literate* terhadap lembaga keuangan dan dapat memanfaatkan teknologi informasi yang telah disediakan oleh perbankan. Sementara 87,2 persen masyarakat belum menggunakan fasilitas ini yang disebabkan tidak dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi melalui *mobile banking*. Oleh karena itu dalam hal ini, perbankan perlu upaya lebih intensif lagi dalam memperkenalkan atau sosialisasi pada masyarakat terhadap penggunaan *mobile banking* atau *branchless banking*. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi maupun transaksi keuangan tanpa harus datang secara langsung ke bank. Umumnya penggunaan *mobile banking* adalah untuk cek saldo dan transaksi perbankan lainnya seperti transfer dan pembayaran tagihan.

Dari sisi kredit, sebagian besar masyarakat telah menggunakan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yaitu sebanyak 40,8 persen dan hanya 59,2 persen yang belum memanfaatkan fasilitas kredit. Sebagian masyarakat telah menggunakan perbankan sebagai lembaga pengajuan kredit dan sebagian kecil lainnya masih menggunakan jasa keuangan lainnya termasuk pinjaman pada rentenir yang dianggap lebih mudah baik dari syarat, prosedur dan perolehan akses kredit yang umumnya dilakukan secara *door to door*. Sebagian masyarakat masih menganggap pengajuan kredit melalui perbankan masih rumit dengan syarat, prosedur administrasi maupun jaminan yang harus dimiliki masyarakat. Persepsi lainnya, masyarakat berasumsi bahwa pengajuan kredit hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki transaksi dan saldo yang sangat tinggi yang mana hal tersebut merupakan ranah masyarakat setingkat manajer atau direktur.

Rata-rata jenis kredit yang diajukan masyarakat adalah kredit usaha sebanyak 59,5 persen dan kredit rumah sebanyak 15,5 persen. Hal ini menunjukkan animo masyarakat dalam mengajukan kredit usaha cukup tinggi dan menjadi indikasi menarik dalam mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan misi perbankan dalam mengembangkan dan meningkatkan akses keuangan atau pembiayaan usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pengajuan kredit usaha kini sedang ramai dalam masyarakat sebab kredit tersebut dapat mencakup hampir keseluruhan kebutuhan usaha yang akan direncanakan. Apalagi kini kredit usaha yang ditawarkan perbankan lebih mudah dijangkau bagi masyarakat secara umum. Kredit rumah kini juga sedang banyak digunakan oleh masyarakat. Keputusan masyarakat tersebut terjadi akibat adanya promo perumahan yang menggandeng lembaga keuangan dalam menyediakan kredit bagi konsumen. Tawaran kredit oleh penyedia perumahan direspon positif oleh konsumen karena inovasi produk perumahan itu dianggap lebih efektif. Oleh karena itu transaksi pembayaran perumahan lebih variatif yang dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi konsumen.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.19 Jenis Pengajuan Kredit Perbankan**

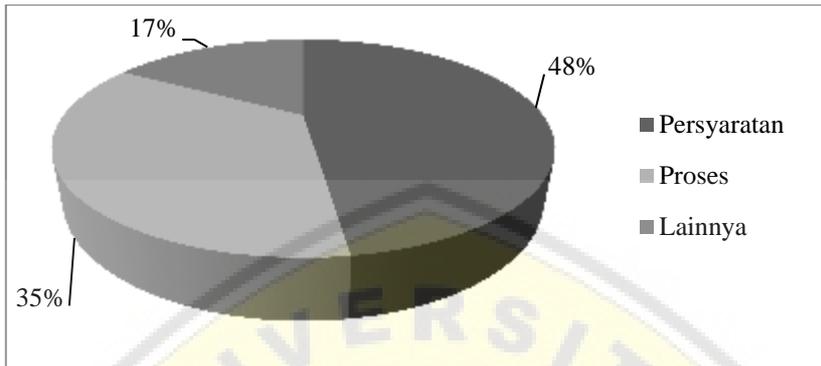
Sementara untuk kredit konsumsi mayoritas digunakan oleh masyarakat perempuan. Tendensi kredit konsumsi timbul karena modernisasi cara belanja baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu belanja *online*. Jamaknya toko *online* mendorong ibu rumah tangga dan remaja perempuan sekarang untuk lebih mudah berbelanja. Pengaruhuforia belanja *online* meningkatkan penggunaan kredit untuk konsumsi baik dalam transaksi kecil hingga besar.

Upaya perbankan tersebut meningkatkan animo masyarakat dalam memanfaatkan produk perbankan seperti kredit usaha, perumahan, dan konsumen. Dengan demikian secara perlahan pola pikir masyarakat dapat tergeser dalam manajemen keuangannya dari tradisional dengan meminjam ke rentenir, dan lainnya hingga berubah dengan pola modern yang mana masyarakat telah menggunakan perbankan dalam mempermudah transaksi ekonominya.

#### 4.2.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Bondowoso

Akses terhadap lembaga keuangan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi yang semakin masif dan tanpa mengenal batas wilayah. Peran perbankan sebagai lembaga keuangan dengan komposisi aset dan kepemilikan produk keuangan di masyarakat yang terbesar diantara lembaga keuangan lainnya, menjadikan perbankan menjadi media penting dalam mempermudah semua kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah. Masih banyaknya masyarakat yang belum terjangkau perbankan menjadi sebuah tugas penting dari otoritas lembaga keuangan dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan masyarakat terutama yang berada di wilayah yang sulit terjangkau maupun masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Peningkatan literasi keuangan sebaiknya juga diimbangi dengan sosialisasi produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat sehingga mereka tertarik untuk beralih menggunakan lembaga perbankan.

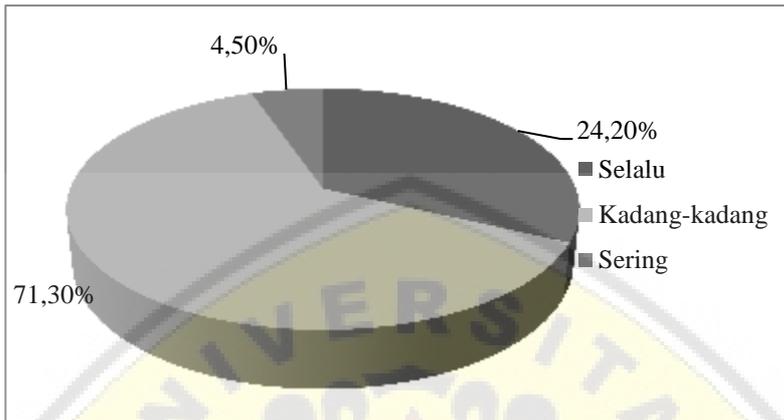
Studi lapang menunjukkan bahwa 48% masyarakat enggan untuk *mengakses* lembaga perbankan karena terdapat masalah pada persyaratan pengajuan rekening. Birokrasi yang begitu rumit membuat masyarakat merasa dipersulit lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan yang dekat di lingkungan masyarakat dirasa masih terlalu jauh untuk dijangkau. Selain itu 35% masyarakat berpersepsi bahwa proses dalam pengajuan juga membutuhkan waktu yang lama. Bila dibandingkan dengan lembaga keuangan nonformal yang memberikan kemudahan proses pengajuan maka masyarakat pun enggan untuk berpindah ke lembaga keuangan formal.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.20 Keengganan Masyarakat Mengakses Perbankan di Kabupaten Bondowoso**

Di Kabupaten Bondowoso, ketersediaan jumlah bank pada setiap wilayah sampel 65,9 persen menurut pendapat responden telah ada dan 34,1 persen lainnya menjawab tidak ada di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh jarak tempat tinggal dengan bank. Rata-rata jarak antara tempat tinggal dengan bank adalah kurang dari 5 km sebanyak 58,6 persen, antara 6 km hingga 10 km sejumlah 30,2 persen dan lebih dari 10 km adalah 11,2 persen. Sementara rata-rata jumlah bank berkisar antar satu hingga dua bank. Kasus ini tidak berbeda jauh dengan kasus di Kabupaten Jember yang mana sebenarnya fasilitas perbankan sudah disediakan namun masyarakat belum mengetahuinya. Selain itu mayoritas masyarakat memiliki variasi rekening perbankan yang tinggi sehingga rekening yang dimiliki tidak sama dengan fasilitas bank yang telah disediakan. Kondisi tersebut memicu masyarakat berasumsi bahwa fasilitas perbankan masih rendah dan minim, akibatnya masyarakat merasa belum menjangkaunya.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.21 Persepsi terhadap Tingkat Pelayanan Bank**

Selain transaksi melalui bank secara langsung, masyarakat juga disediakan fasilitas perbankan melalui *Automatic Teller Machine (ATM)* dimana 67,3 persen masyarakat telah menggunakan fasilitas tersebut dan 32,7 persen yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Jumlah fasilitas *Automatic Teller Machine (ATM)* di tiap wilayah rata-rata hanya satu hingga dua ATM sesuai dengan keberadaan jumlah bank yang ada di tiap wilayah. Sementara dari sisi jarak tempat tinggal dengan ATM rata-rata kurang dari 5 km sebanyak 59,8 persen, antara 6 km hingga 10 km sebanyak 25,6 persen dan lebih dari 10 km adalah 14,6 persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya jumlah fasilitas perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dilihat dari respon masyarakat terhadap pelayanan akses lembaga perbankan pada umumnya bank memiliki pelayanan yang baik dalam penawaran produk dan suku bunga maupun pemberian informasi mengenai jasa keuangan. Sementara 4,5 persen masyarakat menilai kurang baik, yang disebabkan masih rendahnya akses informasi dari lembaga keuangan secara langsung ke masyarakat, biasanya pelayanan informasi diperoleh masyarakat pada saat datang ke bank. Informasi melalui media elektronik belum mampu dijangkau secara langsung oleh masyarakat mengingat masih rendahnya literasi masyarakat dan rendahnya kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi terkait dengan jasa perbankan. Dengan demikian dapat diketahui terdapat kesenjangan antara lembaga bank dan masyarakat sehingga belum menemukan titik temu untuk memberikan solusi atas masalah tersebut. Bila saja masyarakat dapat memahami teknologi dan memiliki informasi penuh terkait fasilitas dan produk perbankan maka literasi masyarakat akan lebih baik. Begitu pula dengan lembaga perbankan,

bila perbankan dapat memberikan keleluasaan dan meningkatkan sosialisasi produk dan fasilitas yang disediakan maka masyarakat akan lebih cepat merespon produk perbankan.

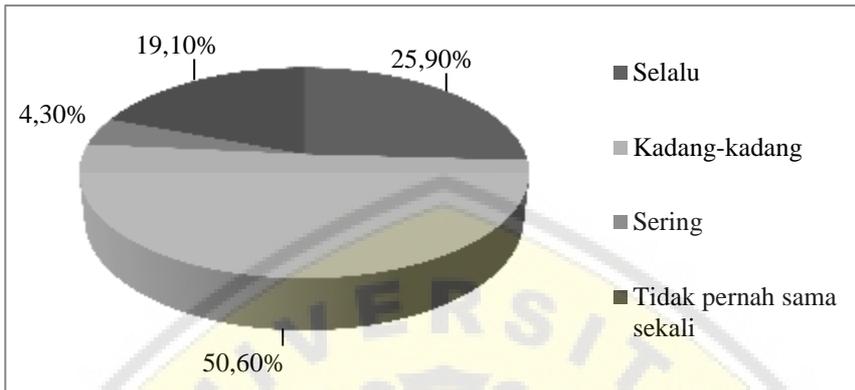
Berdasarkan kepemilikan terhadap produk keuangan, sebanyak 86,8 persen masyarakat di Kabupaten Bondowoso telah memiliki rekening tabungan di bank dan hanya 13,2 persen yang belum memiliki tabungan. Banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki rekening tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial yang mana masyarakatnya kini mulai banyak yang bekerja pada industri. Selain itu sebagian masyarakat terpaksa harus memiliki rekening untuk mempermudah transaksi karena anggota keluarga yang jauh. Sementara alasan masyarakat tidak memiliki rekening karena tidak memiliki uang dan masyarakat merasa masih besarnya biaya administrasi dalam rekening mereka. Rata-rata masyarakat memiliki jumlah satu hingga dua rekening dan sebagian besar adalah jenis tabungan. Sementara intensitas menabung masyarakat minimal sekali dalam sebulan sebanyak 38,9 persen dan menyimpan pada saat bisa sebanyak 33,8 persen.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.22 Intensitas Menabung Masyarakat**

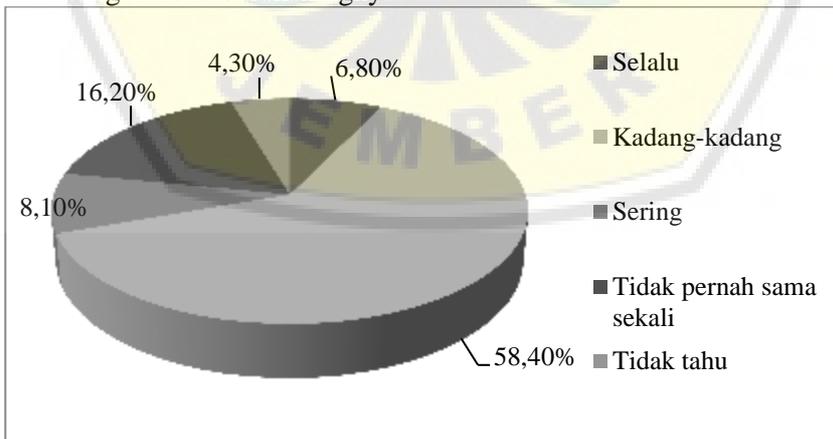
Masyarakat pada umumnya telah banyak memanfaatkan transaksi melalui perbankan yang diindikasikan dengan intensitas masyarakat dalam melakukan *checking* terhadap rekening maupun penarikan secara tunai. Rata-rata penggunaan rekening adalah untuk penarikan tunai dan transaksi perbankan lainnya.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.23 Intensitas *Checking* Rekening**

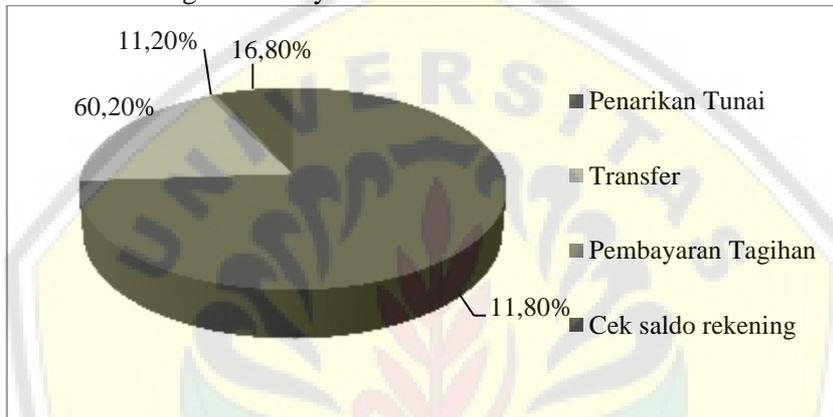
Gambar 4.23 menunjukkan intensitas responden dalam melakukan *checking* rekening masih dalam taraf kadang-kadang. Persepsi tersebut 50.60% diutarakan responden karena mereka berpendapat bahwa *checking* rekening tidak perlu dilakukan sesering mungkin karena masyarakat sudah merasa aman karena uang mereka telah disimpan di lembaga perbankan yang telah dijamin keamanannya. Sementara 25.90% masyarakat selalu melakukan *checking* rekening. Masyarakat tipe ini merupakan masyarakat yang memiliki transaksi lebih tinggi sehingga perlu adanya kontrol untuk mengetahui perkembangan kondisi rekeningnya.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.24 Intensitas Penarikan Tunai**

Hal yang sama juga pada penggunaan layanan penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) dimana sebagian besar masyarakat kadang-kadang menggunakan ATM untuk transaksi keuangan dan hanya 11,8 persen yang selalu menggunakan ATM. Umumnya penggunaan ATM adalah untuk penarikan tunai sebanyak 67,8 persen dan transfer sebanyak 17,1 persen, sementara transaksi lainnya seperti untuk pembayaran tagihan, cek saldo rekening dan lainnya.



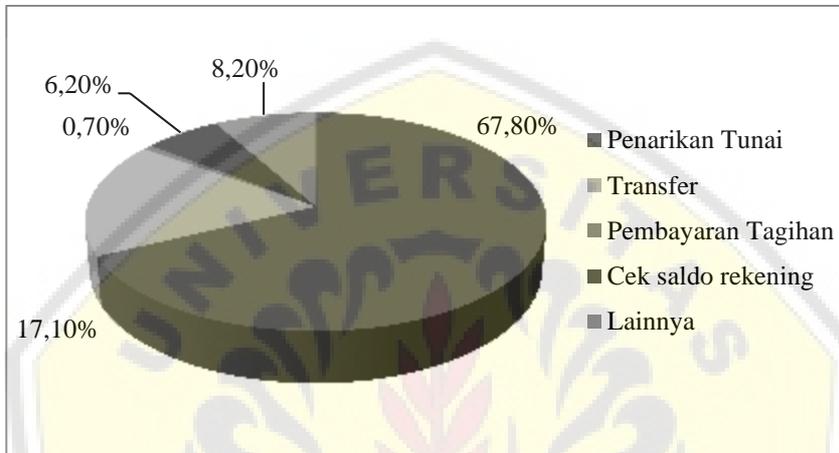
Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.25 Intensitas Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM)**

Umumnya responden menggunakan fasilitas mesin ATM bertujuan untuk melakukan berbagai transaksi diantaranya untuk melakukan penarikan tunai, transfer, dan lain sebagainya. Hasil analisis menunjukkan bahwa 67.80% alasan masyarakat menggunakan ATM bertujuan untuk melakukan kegiatan transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh fasilitas lain yaitu penarikan tunai. Beberapa wilayah seperti area perkantoran atau sekolah ATM selalu ramai pengunjung untuk melakukan penarikan tunai bahkan tidak jarang masyarakat rela mengantri untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut.

Alasan lain responden tidak suka menggunakan fasilitas mesin ATM yaitu karena seringnya permasalahan dalam penggunaan ATM. Umumnya permasalahan yang dirasakan masyarakat diantaranya karena ATM sedang gangguan, saldo ATM kosong, mesin ATM sedang *offline* atau mati bahkan sedang dalam perbaikan, serta alasan lainnya. Bila dilihat dari hasil kajian, responden enggan menggunakan fasilitas ATM maka mayoritas masyarakat sebesar 61% mengungkapkan bahwa ATM di lingkungan mereka sering mengalami gangguan. Selanjutnya responden juga mengutarakan alasan lainnya, alasan ini menggambarkan keengganan mereka untuk menggunakan

fasilitas ATM karena alasan seperti mesin rusak, mati lampu, antrian yang panjang, dan lain sebagainya. Ketidaknyamanan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa responden memilih alternatif lain dalam bertransaksi.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

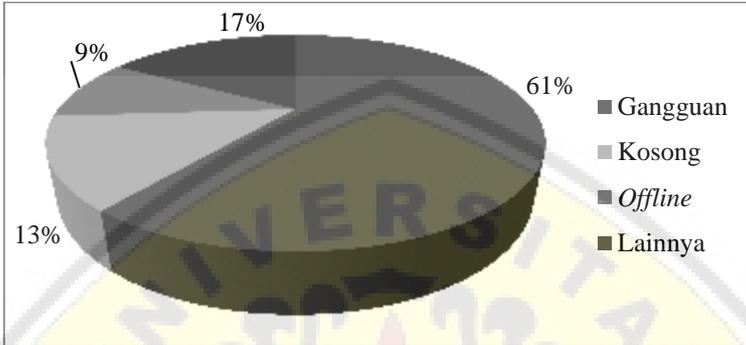
**Gambar 4.26 Tujuan Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM)**

Selain penggunaan jasa perbankan melalui ATM, sebagian kecil masyarakat juga telah menggunakan fasilitas *mobile banking* dalam mempermudah transaksi keuangan. Sebanyak 23,4 persen masyarakat telah menggunakan *mobile banking* dan pada umumnya adalah pelajar dan pegawai yang dinilai telah *well literate* terhadap lembaga keuangan dan dapat memanfaatkan teknologi informasi yang telah disediakan oleh perbankan. Sementara 76,6 persen masyarakat belum menggunakan fasilitas ini yang disebabkan tidak dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi melalui *mobile banking*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengguna *mobile banking* merupakan masyarakat yang memiliki informasi dan pengetahuan yang massif tentang fasilitas dan produk perbankan. Sedangkan masyarakat lainnya masih menggunakan cara manual sehingga transaksi hanya dapat dilakukan saat masyarakat datang langsung ke ATM atau ke bank.

Oleh karena itu dalam hal ini, perbankan perlu upaya lebih intensif lagi dalam memperkenalkan atau sosialisasi pada masyarakat terhadap penggunaan *mobile banking* atau *branchless banking*. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi maupun transaksi keuangan tanpa harus datang secara langsung ke bank. Umumnya

## 72 | INKLUSI KEUANGAN

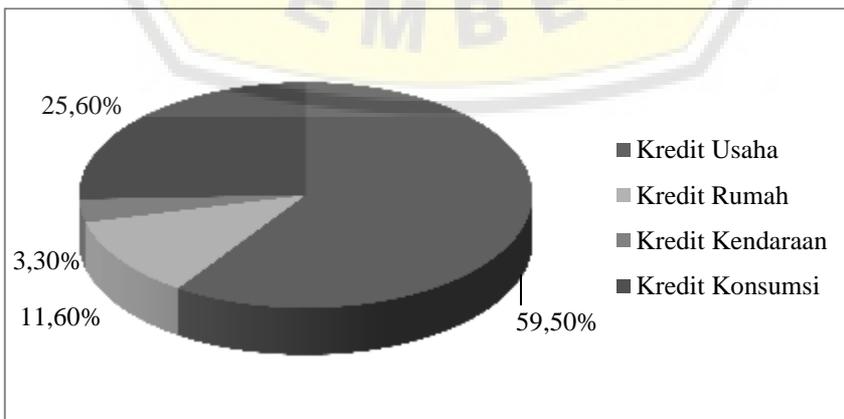
penggunaan *mobile banking* adalah untuk cek saldo dan transaksi perbankan lainnya seperti transfer dan pembayaran tagihan.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 4.27 Masalah Penggunaan ATM**

Dari sisi kredit, sebagian besar masyarakat telah menggunakan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yaitu sebanyak 72,6 persen dan hanya 27,4 persen yang belum memanfaatkan fasilitas kredit. Sebagian masyarakat telah menggunakan perbankan sebagai lembaga pengajuan kredit dan sebagian kecil lainnya masih menggunakan jasa keuangan lainnya termasuk pinjaman pada rentenir yang dianggap lebih mudah baik dari syarat, prosedur dan perolehan akses kredit yang umumnya dilakukan secara *door to door*. Sebagian masyarakat masih menganggap pengajuan kredit melalui perbankan masih rumit dengan syarat, prosedur administrasi maupun jaminan yang harus dimiliki masyarakat.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

## Gambar 4.28 Jenis Pengajuan Kredit Perbankan

Rata-rata jenis kredit yang diajukan masyarakat adalah kredit usaha sebanyak 59,5 persen dan kredit rumah sebanyak 11,6 persen. Hal ini menunjukkan animo masyarakat dalam mengajukan kredit usaha cukup tinggi dan menjadi indikasi menarik dalam mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan misi perbankan dalam mengembangkan dan meningkatkan akses keuangan atau pembiayaan usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pengajuan kredit usaha kini sedang ramai dalam masyarakat sebab kredit tersebut dapat mencakup hampir keseluruhan kebutuhan usaha yang akan direncanakan. Apalagi kini kredit usaha yang ditawarkan perbankan lebih mudah dijangkau bagi masyarakat secara umum. Kredit rumah kini juga sedang banyak digunakan oleh masyarakat. Keputusan masyarakat tersebut terjadi akibat adanya promo perumahan yang menggandeng lembaga keuangan dalam menyediakan kredit bagi konsumen. Tawaran kredit oleh penyedia perumahan direspon positif oleh konsumen karena inovasi produk perumahan itu dianggap lebih efektif. Oleh karena itu transaksi pembayaran perumahan lebih variatif yang dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi konsumen. Sementara untuk kredit konsumsi mayoritas digunakan oleh masyarakat perempuan. Tendensi kredit konsumsi timbul karena modernisasi cara belanja baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu belanja online. Jamaknya toko online mendorong ibu rumah tangga dan remaja perempuan sekarang untuk lebih mudah berbelanja. Pengaruhuforia belanja online meningkatkan penggunaan kredit untuk konsumsi baik dalam transaksi kecil hingga besar.

Upaya perbankan tersebut meningkatkan animo masyarakat dalam memanfaatkan produk perbankan seperti kredit usaha, perumahan, dan konsumen. Dengan demikian secara perlahan pola pikir masyarakat dapat tergeser dalam manajemen keuangannya dari tradisional dengan meminjam ke rentenir, dan lainnya hingga berubah dengan pola modern yang mana masyarakat telah menggunakan perbankan dalam mempermudah transaksi ekonominya.

### 4.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat

Inklusi keuangan menjadi tren pasca krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 karena adanya dampak krisis dari kelompok *in the bottom of the pyramid* atau kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil dan tidak mempunyai dokumen legal yang umumnya *unbanked* atau belum terakses dalam lembaga keuangan. Inklusi keuangan memberikan gambaran *unbanked population* terbatasnya akses

masyarakat terhadap sistem keuangan formal baik dalam aktifitas menabung, pembayaran, kredit dan asuransi.

### 4.3.1 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan dinamika mobilitas sosial ekonomi yang tinggi, ditandai dengan keberadaan lembaga keuangan khususnya perbankan yang cukup pesat. Dalam ranah teoritik, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan khususnya perbankan, mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang telah memanfaatkan atau memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Namun terdapat banyak faktor yang memengaruhi keteraksesan masyarakat pada lembaga keuangan seperti sosial demografi dan ekonomi dan tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap peran lembaga keuangan, dan sistem dan pelayanan perbankan dalam menjangkau akses masyarakat di berbagai wilayah.

Determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dalam studi ini menyertakan beberapa faktor yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, literasi, akses atau jarak lembaga keuangan. Berikut adalah hasil analisis determinan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dengan menggunakan model logit:

**Tabel 4.1 Hasil Estimasi Determinan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember**

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Gender	-.016	.931	.000	1	.986	.984
Age	.078	.033	5.671	1	.017	1.081
Education	2.390	.840	8.095	1	.004	10.913
Income	-.506	.827	.374	1	.541	.603
Literate	1.455	.715	4.137	1	.042	4.284
Distance	-1.613	.487	10.951	1	.001	.199
Constant	-.022	1.406	.000	1	.988	.979

Keterangan: Model logit, variabel dependen inklusi keuangan

Berdasarkan informasi hasil analisis determinan dengan nilai intersep sebesar 0,022 artinya pada saat variabel independen tidak memiliki pengaruh maka probabilitas masyarakat dalam inklusi keuangan khususnya perbankan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Ln}(p/(1-p)) &= 0,022 \\ (p/1-p) &= e^{0,022} \end{aligned}$$

$$p = e^{0,022} / (1 + e^{0,022}) = 50,55\%$$

Sementara *slope* variabel independen *gender* atau jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember. Parameter jenis kelamin memiliki tanda negatif artinya laki-laki memiliki peluang atau probabilitas yang lebih kecil dalam inklusi keuangan dibandingkan perempuan. Dengan nilai Exp (B) sebesar 0,984 berarti laki-laki memiliki peluang 0,984 kali dari perempuan. Temuan ini sangat menarik yang terjadi di masyarakat karena umumnya laki-laki sebagai pencari nafkah utama lebih memiliki peluang dalam akses keuangan, namun ternyata perempuan memiliki peluang lebih besar. Hal ini mengingat perempuan memiliki tugas dalam mengelola keuangan keluarga sehingga memiliki intensitas akses pada lembaga keuangan formal lebih besar dibandingkan laki-laki.

Variabel usia atau *age* memiliki tanda positif yang artinya bahwa semakin tinggi usia individu maka peluang dalam inklusi keuangan semakin besar yaitu sebesar 1,081 kali. Hal ini sejalan dengan kriteria bahwa semakin meningkat usia maka semakin produktif dan memiliki potensi dalam mengakses sektor keuangan, mengingat usia di atas 18 tahun diasumsikan telah memiliki literasi keuangan yang cukup dan umumnya telah memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga memiliki peluang dalam mengelola dan mengakses keuangan pada lembaga keuangan formal.

Faktor pendidikan atau *education* memiliki tanda positif yang berarti bahwa kelompok masyarakat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas memiliki peluang lebih besar dibandingkan pendidikan dibawah SMA yaitu 10,913 kali lebih besar. Hal ini disebabkan masyarakat dengan pendidikan yang semakin tinggi, diasumsikan memiliki literasi terhadap keuangan yang lebih baik dan memiliki kemampuan dalam mengakses informasi keuangan secara lebih intensif baik melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pendapatan yang diperoleh lebih besar, sehingga mampu mengakses keuangan lebih besar.

Hal menarik lainnya dalam temuan kajian ini adalah ternyata tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Jember. Sebaran pendapatan masyarakat diatas Rp. 1.000.000,- memiliki peluang lebih kecil dalam inklusi keuangan dibandingkan masyarakat dibawah Rp. 1.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa keteraksesan masyarakat dengan pendapatan lebih kecil adalah lebih tinggi sehingga perbedaan pendapatan tidak memengaruhi inklusi keuangan di masyarakat.

Literasi atau pemahaman masyarakat terhadap keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan inklusi keuangan. Masyarakat diharapkan

bukan hanya memiliki keterjangkauan atau inklusi keuangan namun juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atau *well literate* terhadap lembaga keuangan. Hal ditunjukkan bahwa semakin *literate* masyarakat maka akan memiliki peluang dalam inklusi yang semakin besar yang ditunjukkan oleh nilai  $\exp(B)$  sebesar 4,284 kali.

Jarak atau distance memiliki pengaruh besar dalam menentukan inklusi keuangan masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan formal yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat terutama jarak kantor bank akan menentukan tingkat inklusi masyarakat karena akan mendorong masyarakat untuk intensif dalam menabung maupun mengakses jasa keuangan formal. Hal ini mengingat dengan jarak yang semakin sulit dapat memengaruhi motivasi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan dan semakin memperburuk tingkat literasi masyarakat karena informasi lembaga keuangan menjadi lebih sulit juga.

### **4.3.2 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso**

Seperti halnya dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso yang secara geografis bersebelahan dengan Kabupaten Jember, secara sosial memiliki karakteristik budaya yang hampir sama. Namun berbeda dengan Kabupaten Jember, pertumbuhan sektor keuangan di Kabupaten Bondowoso sedikit relatif lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Jember. Mengingat Kabupaten Jember masih menjadi barometer pusat pendidikan tinggi di wilayah timur Provinsi Jawa Timur sehingga intensitas kegiatan ekonomi masyarakat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di wilayah eks Karesidenan Besuki.

Determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam studi ini menyertakan beberapa faktor yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, literasi, akses atau jarak lembaga keuangan (Tabel 4.2).

**Tabel 4.2 Hasil Estimasi Determinan Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso**

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Gender	-1.337	.581	5.301	1	.021	.263
Age	-.011	.028	.147	1	.702	.989
Education	1.807	.648	7.770	1	.005	6.089
Income	.473	.615	.591	1	.442	1.605
Literate	4.102	1.200	11.689	1	.001	60.489
Distance	-.164	.394	.173	1	.677	.849
Constant	-2.125	1.827	1.352	1	.245	.119

Keterangan: Model logit, variabel dependen inklusi keuangan

Berdasarkan informasi hasil analisis determinan dengan nilai intersep sebesar 2,125 artinya pada saat variabel independen tidak memiliki pengaruh maka probabilitas masyarakat dalam inklusi keuangan khususnya perbankan adalah :

$$\begin{aligned} \ln(p/(1-p)) &= 2,125 \\ (p/1-p) &= e^{2,125} \\ p &= e^{2,125}/(1+e^{2,125}) = 89,33\% \end{aligned}$$

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso memiliki probabilitas masyarakat dalam inklusi keuangan yang lebih besar. Temuan menarik bahwa meskipun secara sosio ekonomi sedikit dibawah Kabupaten Jember, namun potensi pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso cukup besar. Hal ini mengindikasikan tingginya minat masyarakat dalam mengakses jasa keuangan formal.

Sementara *slope* variabel independen gender atau jenis kelamin bertanda negatif artinya laki-laki memiliki peluang atau probabilitas yang lebih kecil dalam inklusi keuangan dibandingkan perempuan. Dengan nilai Exp (B) sebesar 0,263 berarti laki-laki memiliki peluang 0,263 kali dari perempuan. Temuan ini sangat menarik yang terjadi di masyarakat karena umumnya laki-laki sebagai pencari nafkah utama lebih memiliki peluang dalam akses keuangan, namun ternyata perempuan memiliki peluang lebih besar. Hal ini mengingat perempuan memiliki tugas dalam mengelola keuangan keluarga sehingga memiliki intensitas akses pada lembaga keuangan formal lebih besar dibandingkan laki-laki.

Variabel usia atau *age* tidak signifikan secara statistik memengaruhi inklusi keuangan masyarakat. Parameter usia memiliki tanda negatif yang artinya bahwa kelompok usia muda memiliki peluang dalam inklusi

keuangan yang lebih besar yaitu sebesar 0,989 kali. Hal ini lebih disebabkan kelompok usia muda umumnya memiliki tingkat literasi yang lebih baik terhadap lembaga keuangan sejalan dengan dinamika teknologi informasi yang semakin pesat dan menarik tanpa mengenal batas wilayah maupun kelompok usia. Minat kelompok usia muda jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia menengah ke atas.

Faktor pendidikan atau *education* memiliki tanda positif yang berarti bahwa kelompok masyarakat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas memiliki peluang lebih besar dibandingkan pendidikan dibawah SMA yaitu 6,089 kali lebih besar. Dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso memiliki nilai peluang yang lebih kecil dilihat dari tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan masyarakat dengan pendidikan yang semakin tinggi, diasumsikan memiliki literasi terhadap keuangan yang lebih baik dan memiliki kemampuan dalam mengakses informasi keuangan secara lebih intensif baik melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pendapatan yang diperoleh lebih besar, sehingga mampu mengakses keuangan lebih besar.

Seperti halnya di Kabupaten Jember, di Kabupaten Bondowoso tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Jember. Sebaran pendapatan masyarakat diatas Rp. 1.000.000,- memiliki peluang lebih kecil dalam inklusi keuangan dibandingkan masyarakat dibawah Rp. 1.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa keteraksesan masyarakat dengan pendapatan lebih kecil adalah lebih tinggi sehingga perbedaan pendapatan tidak memengaruhi inklusi keuangan di masyarakat.

Literasi atau pemahaman masyarakat terhadap keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan inklusi keuangan. Masyarakat diharapkan bukan hanya memiliki keterjangkauan atau inklusi keuangan namun juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atau *well literate* terhadap lembaga keuangan. Hal ditunjukkan bahwa semakin *literate* masyarakat maka akan memiliki peluang dalam inklusi yang semakin besar yang ditunjukkan oleh nilai  $\exp(B)$  sebesar 60,489 kali. Dibandingkan dengan masyarakat di Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso memiliki nilai peluang yang jauh lebih besar. Hal ini sejalan dengan minat kelompok usia muda yang semakin besar terhadap jasa keuangan.

Jarak atau *distance* tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Jarak tidak menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menjangkau lembaga keuangan formal. Keberadaan lembaga keuangan formal yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat terutama jarak kantor bank akan menentukan tingkat inklusi masyarakat karena akan mendorong masyarakat

untuk intensif dalam menabung maupun mengakses jasa keuangan formal. Hal ini mengingat dengan jarak yang semakin sulit dapat memengaruhi motivasi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan dan semakin memperburuk tingkat literasi masyarakat karena informasi lembaga keuangan menjadi lebih sulit juga.

### 4.3.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso

Inklusi keuangan yang telah menjadi cetak biru dalam pendalaman sistem keuangan di Indonesia memperhatikan aspek pemerataan keterjangkauan wilayah di seluruh daerah baik perkotaan, perdesaan maupun pelosok dan pada berbagai kelompok masyarakat sehingga menurunkan masyarakat yang *unbanked*. Inklusi keuangan telah menjadi program Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan masyarakat.

**Tabel 4.3 Hasil Estimasi Model Logit Determinasi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso**

Variabel	Koefisien	Antilog	z-statistic	Probabilitas
Konstanta	-1.492911	0,0321	-0.006475	0.9948
Usia	6.392481	246,877	0.200391	0.8512
Pendidikan	-11.46624	292,576	5.274493	0.0167*
Pendapatan	8.493434	311,482	3.544296	0.0434*
Jenis kelamin	-0.578611	0,2639	-1.869297	0.7826
Tanggung jawab keluarga	3.547222	3526	5.875124	0.0172*
McFadden R-Squared : 0.528749				

Keterangan: \*) signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa hasil uji McFadden *R-squared* untuk model logit yang digunakan adalah 0.528749. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 51,8% Sisa dari besaran tingkat keterpengaruhannya secara keseluruhan dengan menggunakan hasil McFadden *R-squared* dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen pada model.

Berdasarkan nilai regresi logistik, juga dapat dilakukan suatu prediksi. Misalkan jika individu mengalami peningkatan usia sebesar 1

tahun, tingkat pendidikan naik satu tingkat, pendapatan naik sebesar 2 juta rupiah, serta jumlah tanggungan keluarga tetap maka dapat dihitung:

$$Z = -1.492911 + 6.392481(1) - 11.46624 (1) + 8.493434 (2) - 0.578611(1)+3.547222(1)$$

$$Z = 13,39$$

$$P_i = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-13,39}} = 0,3952$$

Dari hasil perhitungan perubahan nilai variabel independen maka didapatkan nilai probabilitas individu dalam mengambil keputusan untuk menggunakan produk jasa perbankan sebesar 0.3952, sedangkan probabilitas individu tidak mengambil produk jasa perbankan sebesar  $1-0.3952 = 0.6048$ . Hal ini dapat diartikan ketika terjadi perubahan nilai variabel independen pada masing-masing individu maka secara signifikan memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan produk jasa keuangan.

Variabel yang signifikan memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan akses perbankan adalah tingkat pendidikan responden, tingkat pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $z$  statistik yang kurang dari  $\alpha$  5%. Namun, seperti dijelaskan sebelumnya nilai koefisien regresi logit sulit diinterpretasikan secara langsung. Untuk menginterpretasikan, maka dilakukan antilog dari koefisien tersebut. Nilai antilog koefisien logit variabel usia adalah 246,877, sehingga odds ratio untuk usia sebesar 246,877. Karena data adalah kuantitatif maka nilai tersebut dapat diartikan bahwa jika umur seseorang bertambah 1 tahun maka kemungkinan untuk memutuskan menggunakan produk jasa perbankan adalah 246,877.

Variabel tingkat pendidikan responden mempunyai nilai antilog koefisien sebesar 292,576 sehingga dapat diartikan bahwa jika tingkat pendidikan seseorang naik maka kemungkinan untuk memutuskan menggunakan produk jasa perbankan adalah 292,576. Tingkat pendapatan responden juga memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan produk jasa perbankan. Jika terjadi peningkatan pendapatan sebesar 1 satuan (1 juta rupiah) maka kemungkinan untuk memutuskan menggunakan produk jasa perbankan adalah sebesar 311,482, sedangkan jika terjadi penambahan jumlah tanggungan keluarga maka keputusan individu untuk menggunakan produk jasa perbankan sebesar 3526.

Variabel dependen dalam model adalah keputusan responden menggunakan jasa perbankan, sedangkan variabel independen adalah usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis kelamin, dan

jumlah tanggungan keluarga. Setelah dilakukan proses regresi dengan menggunakan model probit, maka didapatkan hasil seperti tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Hasil Estimasi Model Probit Determinasi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso**

Variabel	Koefisien	Antilog	z-statistic	probabilitas
C	-1.492911	0,0321	-0.006475	0.9948
USIA	6.392481	246,877	0.200391	0.8512
TP	-11.46624	292,576	5.274493	0.0167*
PDPT	8.493434	311,482	3.544296	0.0434*
JK	-0.578611	0,2639	-1.869297	0.7826
JTK	3.547222	3526	5.875124	0.0172*
McFadden R-Squared	0.528749			

Keterangan: \*) signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa hasil uji McFadden R-squared untuk model probit yang digunakan adalah 0.528749. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 51,8% Sisa dari besaran tingkat keterpengaruhan secara keseluruhan dengan menggunakan hasil McFadden R-squared dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen pada model. Variabel yang signifikan mempengaruhi keputusan individu dalam menggunakan akses perbankan adalah tingkat pendidikan responden, tingkat pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas z statistik yang kurang dari  $\alpha 5\%$ . Namun, seperti dijelaskan sebelumnya nilai koefisien regresi probit sulit diinterpretasikan secara langsung. Untuk menginterpretasikan, maka dilakukan antilog dari koefisien tersebut. Nilai antilog koefisien probit variabel usia adalah 246,877, sehingga odds ratio untuk usia sebesar 246,877. Karena data adalah kuantitatif maka nilai tersebut dapat diartikan bahwa jika umur seseorang bertambah 1 tahun maka kemungkinan untuk memutuskan menggunakan produk jasa perbankan adalah 246,877.

Variabel tingkat pendidikan responden mempunyai nilai antilog koefisien sebesar 292,576 sehingga dapat diartikan bahwa jika tingkat pendidikan seseorang naik maka kemungkinan untuk memutuskan menggunakan produk jasa perbankan adalah 292,576. Tingkat pendapatan responden juga mempengaruhi keputusan individu dalam menggunakan produk jasa perbankan. Jika terjadi peningkatan pendapatan sebesar 1 satuan (1 juta rupiah) maka kemungkinan untuk memutuskan menggunakan produk jasa perbankan adalah sebesar 311,482, sedangkan jika terjadi penambahan jumlah tanggungan keluarga maka keputusan individu untuk menggunakan produk jasa perbankan sebesar 3526.

Berdasarkan nilai regresi logistik, juga dapat dilakukan suatu prediksi. Misalkan jika individu mengalami peningkatan usia sebesar 1 tahun, tingkat pendidikan naik satu tingkat, pendapatan naik sebesar 2 juta rupiah, serta jumlah tanggungan keluarga tetap maka dapat dihitung:

$$Z = -1.492911 + 6.392481(1) - 11.46624 (1) + 8.493434 (2) - 0.578611(1)+3.547222(1)$$

$$Z = 13,39$$

$$P_i = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-13,39}} = 0,3952$$

Dari hasil perhitungan perubahan nilai variabel independen maka didapatkan nilai probabilitas individu dalam mengambil keputusan untuk menggunakan produk jasa perbankan sebesar 0.3952, sedangkan probabilitas individu tidak mengambil produk jasa perbankan sebesar  $1-0.3952 = 0.6048$ . Hal ini dapat diartikan ketika terjadi perubahan nilai variabel independen pada masing-masing individu maka secara signifikan mempengaruhi keputusan individu dalam menggunakan produk jasa keuangan.

## Apendix

Model logit digunakan untuk menganalisis determinan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso. Model logit didasarkan pada teori efek substitusi dan efek pendapatan yang kemudian dikaitkan dengan *moral hazard* yang muncul.

Model Logit lebih baik dalam mengestimasi variabel dikarenakan distribusinya yang mengikuti *cumulative distribution function*. Selain itu, Wooldridge (2012) model logit memiliki beberapa keunggulan:

1. Model logit tidak harus memiliki distribusi normal, linear atau varians yang sama, disebabkan tidak harus digunakannya asumsi normalitas atas variabel independen.
2. Variabel independen yang digunakan pada model logit dapat berupa campuran dari berbagai jenis variabel, baik itu yang sifatnya diksrit, kontinyu, maupun dikotomis;
3. Model logit dapat digunakan untuk mengetahui respon atas variabel dependen yang nonlinear dengan satu atau lebih variabel independen.

Model yang digunakan dalam estimasi logit adalah sebagai berikut:

$$Li = \ln \left( \frac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

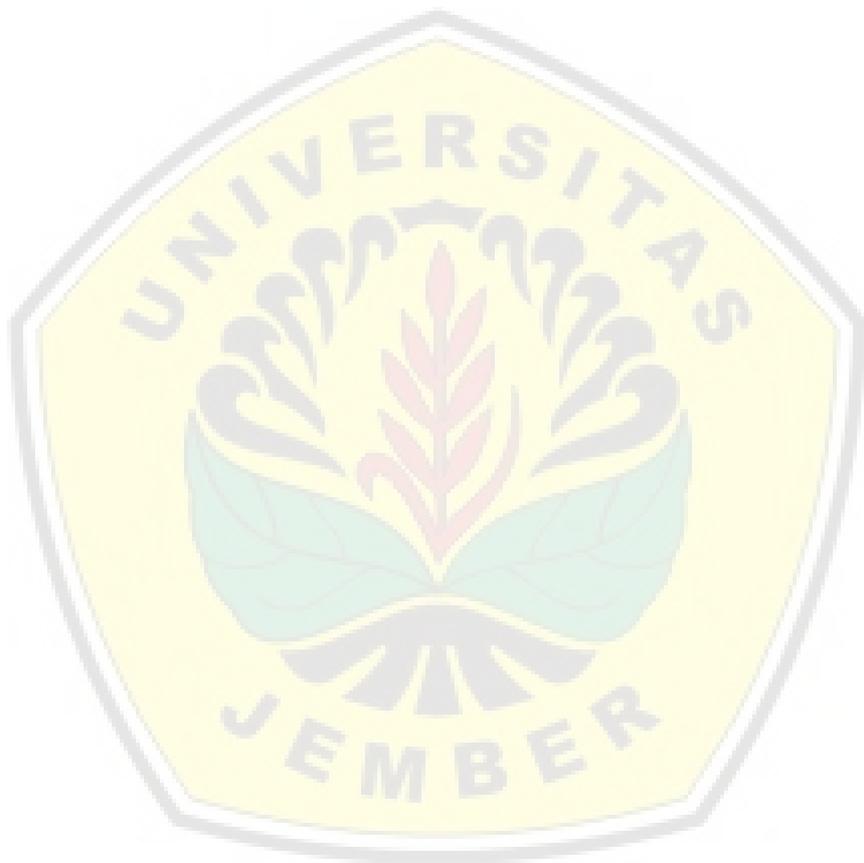
Dimana  $\frac{p_i}{1 - p_i}$  adalah odds ratio; p menyatakan probabilitas sukses terjadinya peristiwa  $y=1$  dan  $(1-p)$  adalah probabilitas sukses terjadinya peristiwa  $y=0$ . Bila variabel bebas merupakan variabel dengan dua kategori maka interpretasi parameter dengan cara membandingkan nilai *odd* dari salah satu nilai pada variabel tersebut dengan nilai *odd* dari nilai lainnya atau referensi.

Penaksiran model logit dengan menggunakan *maximum likelihood* pertama dengan menyusun sebuah fungsi *likelihood* yang menyatakan probabilitas bersama dari data hasil observasi yang masih merupakan fungsi dari paramater yang tidak diketahui. Prinsip penaksiran dengan metode *maximum likelihood* adalah bila ada sebuah *likelihood* yaitu  $L = (\beta_1)$  maka untuk mencari nilai  $L = (\beta_1)$  yang dapat memaksimumkan nilai  $\hat{\beta}_1$ . Oleh karenanya  $\hat{\beta}_1$  disebut *maximum likelihood*.

Adapun model logit yang digunakan adalah :

$$\ln \left[ \frac{p}{1-p} \right]_i = \beta_0 + \beta_1 \text{gender}_i + \beta_2 \text{Age}_i + \beta_3 \text{Educ}_i + \beta_4 \text{Income}_i + \beta_5 \text{literate}_i + \beta_6 \text{distance}_i + \varepsilon_i$$

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi probabilitas dari individu masyarakat dalam memutuskan penggunaan produk perbankan ( $\ln$ ), yaitu jenis kelamin (*gender*), usia (*age*), tingkat pendidikan (*educ*), pendapatan (*income*), literasi (*literate*) dan akses atau jarak lembaga keuangan (*distance*).



## BAB LIMA

### LITERASI KEUANGAN DAERAH : STUDI DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO

Dalam beberapa dekade terakhir, selain inklusi keuangan, literasi keuangan juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah dan menjadi perhatian penting bagi pemerintah, industri perbankan, konsumen dan organisasi lainnya. Bahkan pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meresmikan peluncuran cetak biru literasi keuangan dengan misi adalah untuk memberikan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan. Literasi keuangan menjadi sangat penting terutama bagi rumah tangga dalam mengelola keuangan yang akan digunakan untuk kebutuhan penting yang akan datang seperti pendidikan, kesehatan, investasi dan sebagainya. Hal ini mengingat pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerentanan rumah tangga terhadap potensi terjadinya krisis keuangan.

Secara definitif, literasi keuangan memiliki beragam definisi yang berbeda-beda. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengelola secara efektif keuangan dalam mencapai keuangan yang baik (*American Institute of Certified Public Accountants*, 2013). Garman and Forgue (2000) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan terhadap realitas dan referensi dalam mengelola keuangan dengan sukses. Sementara menurut Kim (2001) bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dasar seseorang untuk dapat bertahan dalam kehidupan modern dengan semakin kompleksnya prinsip dalam pengeluaran, tabungan dan investasi.

Huston (2010) mengidentifikasi empat kategori definisi literasi keuangan dan pengetahuan yaitu keuangan dasar individu, pinjaman, tabungan atau investasi dan proteksi. Bahwa literasi keuangan secara konseptual memiliki dua dimensi yaitu memahami pengetahuan keuangan yang dimiliki secara teori dan menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki secara aplikasi. Oleh karena itu literasi keuangan seharusnya didefinisikan sebagai mengukur seberapa baik seseorang dapat memahami dan menggunakan keuangan berdasarkan informasi yang dimiliki.

Lusardi dan Mitchell (2006) menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan dipengaruhi oleh usia untuk kasus di Amerika Serikat begitu halnya studi Cole *et al.*, (2008) bahwa usia menjadi faktor yang signifikan terhadap literasi keuangan di India dan Indonesia. Faktor lainnya adalah *gender* sebagaimana studi Mandell (2008), Cole *et al.*, (2008), Lusardi dan Mitchell (2006, 2008) yang menjelaskan bahwa perbedaan *gender* yang terlalu besar di Swedia dimana perempuan jarang membuat keputusan ekonomi dalam rumah tangga. Studi Goldsmith dan Goldsmith (1997) menunjukkan bahwa perempuan memiliki ketertarikan yang rendah dalam investasi dan keuangan dan jarang menggunakan jasa keuangan dibandingkan laki-laki. Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan. Studi Cole *et al.*, (2008), Worthington (2004), Lusardi dan Mitchell (2006, 2008) menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi lebih memiliki pengetahuan keuangan yang lebih dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Mandell (2004, 2008) menunjukkan adanya korelasi antara literasi dengan pendidikan dalam tahap awal siklus hidup yaitu anak-anak yang lulus perguruan tinggi menunjukkan kinerja yang bagus dalam tes numerical. Sementara Kharchenko (2011) menunjukkan tingkat pengetahuan keuangan dipengaruhi oleh usia, *gender*, tingkat pendidikan, bidang studi, pekerjaan, tempat tinggal dan latar belakang etnis dan kekayaan.

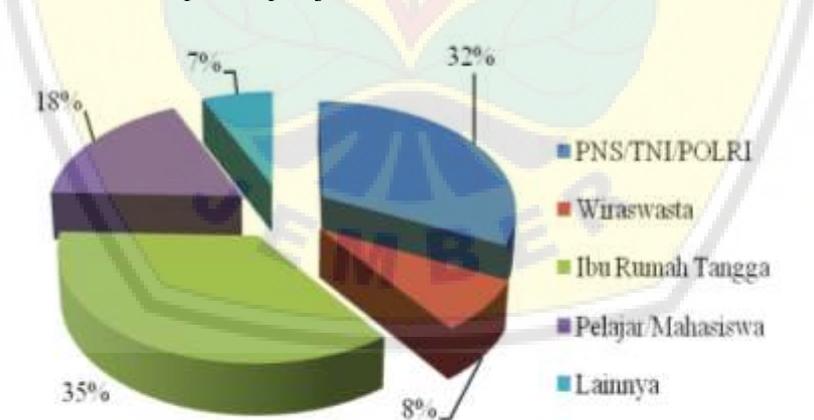
### 5.1 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 2.332.726 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Sektor pertanian masih menjadi *leading sector* dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Potensi geografis dan karakteristik demografis dengan beragam aktifitas sosial ekonomi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keuangan terutama literasi dan inklusi pada sektor keuangan. Pendekatan sosial budaya masyarakat menjadi determinan penting sesuai hadap masalah yang dimiliki tiap daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

Studi literasi keuangan di Kabupaten Jember dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling* yaitu wilayah perkotaan di Kabupaten Jember yang meliputi Kecamatan Summersari, Kaliwates dan Patrang. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah pusat pemerintahan daerah dan menjadi episentrum pertumbuhan kota di Kabupaten Jember. Sementara responden yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah rumah tangga di ketiga wilayah kecamatan yang dilakukan secara *random sampling* berdasarkan kartu keluarga pada kantor kecamatan

setempat. Jumlah responden adalah 180 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, kalangan pekerja baik pemerintah maupun swasta dan pelajar atau mahasiswa. Responden yang terpilih adalah dengan kisaran usia lebih dari 18 tahun hingga 70 tahun yang dianggap sudah matang dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan.

Responden yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Jember yang mencakup Kecamatan Sumpalsari, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Patrang. Jumlah responden adalah 180 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, kalangan pekerja baik pemerintah maupun swasta dan pelajar atau mahasiswa. Responden yang terpilih adalah dengan kisaran usia lebih dari 18 tahun hingga 70 tahun yang dianggap sudah matang dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan. Responden dalam survey berjumlah 180 responden terdiri dari 81 orang laki-laki dan 99 orang perempuan. Pada umumnya responden telah menikah yaitu 80 persen dan 20 persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 hingga 36 tahun adalah 64,2 persen, antara 36 hingga 60 adalah 34,7 persen dan diatas 60 tahun adalah 1,1 persen. Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 23,3 persen ibu rumah tangga, 16,5 persen PNS/TNI/POLRI, 29,5 persen wiraswasta dan 7,4 persen pelajar atau mahasiswa.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.1 Komposisi Pekerjaan Responden**

Distribusi tingkat pendapatan yang diperoleh responden rata-rata berada pada kisaran dibawah Rp. 1.000.000,- karena memang mayoritas responden adalah ibu rumah tangga dan pelajar atau mahasiswa yang memiliki usaha atau bekerja pada sektor informal. Sementara 19 responden memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp.

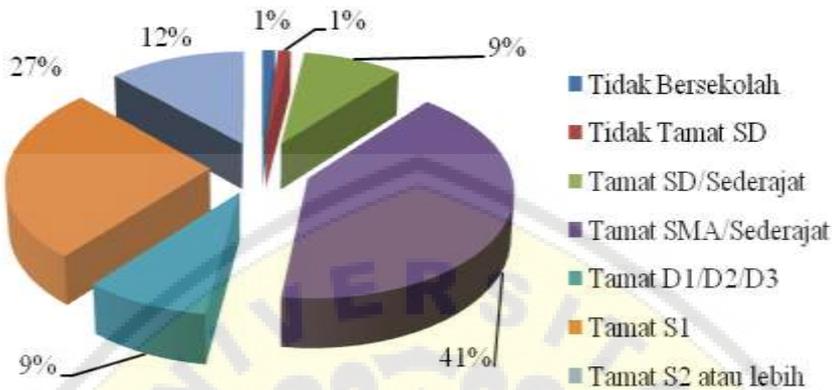
4.000.000,- diikuti sebanyak 15 responden dengan kisaran pendapatan antara Rp.1.000.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan 12 orang berada pada kisaran Rp.4.000.000,- hingga Rp.6.000.000,- dan hanya dua orang yang memiliki pendapatan menengah yaitu berkisar antara Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,-. Distribusi pendapatan ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sampel kajian lebih terkonsentrasi pada ibu rumah tangga dan pelajar/mahasiswa yang nantinya akan mempengaruhi pola aktifitas keuangan yang cukup beragam dengan frekuensi yang cukup tinggi meskipun pendapatan mereka paling rendah karena hanya berupa pekerjaan sampingan sebagai anggota rumah tangga. Hal ini mengingat ibu rumah tangga pada umumnya memiliki tugas utama dalam pengelolaan keuangan keluarga. Begitu halnya dengan pelajar/mahasiswa dengan segala kegiatan akademik dan keseharian yang menggunakan jasa keuangan. Potensi ini didukung dengan Kabupaten Jember sebagai salah satu barometer pendidikan di Propinsi Jawa Timur sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pola konsumsi akan mempengaruhi pola keuangan masyarakat.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.2 Distribusi Pendapatan Responden**

Berdasarkan tingkat pendidikan responden level tertinggi adalah telah menyelesaikan pendidikan S2 atau lebih sebanyak 12 persen. Mayoritas responden yaitu 41 persen memiliki pendidikan tamat SMA, dan 27 persen tamat S1.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat literasi keuangan dihitung menggunakan bobot sederhana atau *simple weight* baik untuk klasifikasi tingkat literasi keuangan dasar atau *basic financial literacy* dan tingkat literasi keuangan lanjut atau *advanced financial literacy*. Simple weight untuk masing-masing indikator adalah sama karena menggunakan rata-rata hitung keseluruhan indikator dalam tiap klasifikasi. Masing-masing tingkat literasi memiliki beberapa komponen yang dijadikan sebagai indikator dalam menilai rendah tingginya sebuah tingkat literasi keuangan. Komponen atau indikator tiap klasifikasi literasi akan dihitung rata-rata hitung secara agregat berdasarkan hasil penilaian responden terhadap beberapa pertanyaan indikator. Adapun untuk tingkat literasi dasar memiliki 11 indikator atau kriteria mulai dari pengetahuan responden mengenai kelengkapan persyaratan dalam membuka rekening di bank hingga perhitungan bunga dan pengaruh inflasi dan *money illusion*. Untuk tingkat literasi keuangan, indikator pengetahuan yang digunakan lebih pada lembaga keuangan bank, mengingat mayoritas masyarakat lebih menggunakan jasa lembaga keuangan perbankan dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Sementara penilaian terhadap indikator tingkat literasi keuangan lanjut atau *advanced financial literacy* lebih menekankan pada pengetahuan mengenai instrumen produk-produk di pasar modal sebagai pasar keuangan terbesar lainnya selain pasar uang.

Indeks literasi keuangan dibangun melalui beberapa tahapan yaitu (1) membuat *variable grouping*; (2) memberikan skor penilaian tiap variabel; (3) menghitung bobot tiap variabel; dan (4) menghitung indeks literasi keuangan.

1. Membuat grup variabel yaitu mengelompokkan variabel literasi keuangan dalam dua grup yaitu *basic financial literacy* dan *advanced financial literacy*. *Basic financial literacy* terdiri dari beberapa variabel yaitu (1) pengetahuan terhadap produk keuangan formal seperti syarat dalam membuka rekening, jumlah uang untuk membuka rekening dan saldo minimum dan jumlah jaminan deposito dari pemerintah; (2) *numeracy* seperti tingkat bunga, *compound interest*, tingkat bunga kredit; dan (3) konsep dasar mengenai inflasi, diskonto, nilai uang dan ilusi uang. Sementara untuk *advanced financial literacy* terdiri dari pengetahuan mengenai fungsi pasar modal, tingkat bunga dan harga surat berharga, risiko saham, pembelian saham, penalti penjualan saham sebelum jatuh tempo, fluktuasi *return* dan diversifikasi aset.
2. Memberikan skor tiap variabel yaitu 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban lainnya, tidak tahu dan menolak menjawab.
3. Menghitung bobot tiap variabel dengan menggunakan *simple weight* sebagaimana studi Bumcrot, Lin dan Lusardi (2013).
4. Menghitung indeks literasi keuangan dalam setiap observasi dalam setiap grup variabel dan kemudian menghitung jumlah skor dan bobot. Nilai skor keseluruhan dihitung dengan *arithmetic mean* baik untuk *basic* maupun *advanced financial literacy*.

Penentuan kategori indeks literasi keuangan mengacu pada studi Definit (2013) yang terbagi dalam tiga aturan yaitu :

1. Indeks literasi keuangan lebih rendah dari atau sama dengan 60 dikategorikan sebagai indeks literasi keuangan rendah ( $0 \leq FLI \leq 60$ )
2. Indeks literasi keuangan lebih tinggi dari 60 dan kurang dari atau sama dengan 80 dikatakan sebagai indeks literasi keuangan moderat ( $60 < FLI \leq 80$ )
3. Indeks literasi keuangan lebih tinggi dari 80 dikategorikan sebagai indeks literasi keuangan tinggi ( $FLI > 80$ ).

Penentuan kategori indeks literasi keuangan mengacu pada studi Definit (2013) yang terbagi dalam tiga kategori yaitu :

1. Indeks literasi keuangan lebih rendah dari atau sama dengan 60 dikategorikan sebagai indeks literasi keuangan rendah ( $0 \leq FLI \leq 60$ )
2. Indeks literasi keuangan lebih tinggi dari 60 dan kurang dari atau sama dengan 80 dikatakan sebagai indeks literasi keuangan sedang atau moderat ( $60 < FLI \leq 80$ )
3. Indeks literasi keuangan lebih tinggi dari 80 dikategorikan sebagai indeks literasi keuangan tinggi ( $FLI > 80$ )

**Tabel 5.1 Indikator Penilaian Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat**

No.	Indikator dan Bobot Tingkat Literasi keuangan			
	<i>Basic Financial Literacy</i>	Bobot	<i>Advanced Financial Literacy</i>	Bobot
1.	Kelengkapan KTP	0,09	Fungsi Pasar Modal	0,10
2.	Minimal jumlah uang pembukaan rekening tabungan awal	0,09	Tingkat Bunga dan Harga Surat Berharga atau Obligasi	0,10
3.	Minimum jumlah saldo rekening tabungan	0,09	Pendapatan Saham dan Obligasi	0,10
4.	Jaminan Simpanan dari Pemerintah	0,09	Resiko Saham dan Obligasi	0,10
5.	Perhitungan Tingkat Bunga Sederhana	0,09	Pengertian Membeli Saham	0,10
6.	Perhitungan Tingkat Bunga <i>Compounded Interest</i>	0,09	Pengertian Membeli Obligasi	0,10
7.	Perhitungan Tingkat Bunga Kredit	0,09	Penalti Menjual Obligasi Sebelum Jatuh Tempo	0,10
8.	Inflasi	0,09	Pilihan Investasi dengan Keuntungan Tinggi	0,10
9.	Diskon	0,09	Pilihan Investasi dengan Resiko Tinggi	0,10
10.	Nilai Uang	0,09	Diversifikasi Investasi	0,10
11.	<i>Money Illusion</i>	0,09		

Sumber : Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis tingkat literasi keuangan, secara agregat tingkat literasi keuangan masyarakat perkotaan di Kabupaten Jember rendah yaitu 38,37 dengan klasifikasi *basic financial literacy* dengan nilai indeks 54,85 yang berada pada kategori moderat atau sedang, sementara untuk *advanced financial literacy* berada pada kategori rendah yaitu 21,89. Kondisi ini berbanding terbalik dengan dinamika keuangan dengan jumlah lembaga keuangan baik bank maupun non bank dan segala ragam jasa serta produk keuangannya yang cukup pesat. Hal ini mengingat Kabupaten Jember tergolong Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang ditandai dengan ragam aktifitas ekonomi dan sosial budaya serta sebagai

episentrum pendidikan di wilayah Propinsi Jawa Timur bagian timur. Sehingga arus perputaran uang juga tinggi sebanding dengan dinamika kegiatan yang berkembang di masyarakat. Namun hal ini masih kurang menumbuhkan tingkat melek atau literasi masyarakat terhadap jasa keuangan. Sementara untuk pengetahuan lanjut, memang pada umumnya masyarakat memiliki literasi rendah karena belum ditunjang atau masih minimnya jumlah lembaga sekuritas pasar modal di Kabupaten Jember dan tidak semua masyarakat mendapatkan informasi mengenai pasar modal.

### 5.1.1 Basic Financial Literacy Kabupaten Jember

Tingkat literasi keuangan dasar dapat dilihat berdasarkan sosial demografis masyarakat yang menjadi responden antara lain dari indikator pendapatan, pendidikan, jenis kelamin dan kepemilikan terhadap produk keuangan. Sehingga dapat dilihat seberapa besar distribusi literasi keuangan masyarakat dalam tiga kategori yang ditentukan oleh kondisi sosial demografis masyarakat.

**Tabel 5.2 Basic Financial Literacy Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Pendapatan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Hingga Rp.1.000.000,-	30	8	4	42
>Rp.1.000.000,- - Rp.2.000.000,-	5	3	7	15
>Rp.2.000.000,- - Rp.2.000.000,-	5	6	8	19
>Rp.4.000.000,- - Rp.6.000.000,-	5	4	3	12
>Rp.6.000.000,- - Rp.8.000.000,-	0	0	2	2
>Rp.8.000.000,- - Rp.10.000.000,-	0	0	0	0
>Rp.10.000.000,-	0	0	0	0
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan tingkat pendapatan, distribusi *basic financial literacy* masyarakat yang rendah berada pada kelompok pendapatan yang rendah juga yaitu 71,43 persen, sedang untuk tingkat literasi moderat terkonsentrasi pada kelompok pendapatan antara Rp. 4.000.000,- hingga Rp.6.000.000,- dan tingkat literasi tinggi berada pada kelompok pendapatan tinggi yaitu Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,-. Pola distribusi hubungan antara *basic financial literacy* dan tingkat pendapatan berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan melalui jasa keuangan. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan.

**Tabel 5.3 Basic Financial Literacy Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Tidak Bersekolah	1	0	0	1
Tidak Tamat SD	0	0	1	1
Tamat SD/Sederajat	8	0	0	8
Tamat SMA/Sederajat	23	11	3	37
Tamat D1/D2/D3	3	1	4	8
Tamat S1	7	6	11	24
Tamat S2 atau lebih	3	3	5	11
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Sementara apabila dilihat dari tingkat pendidikan memiliki pola distribusi yang tidak merata. Tingkat literasi keuangan rendah terkonsentrasi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah yaitu tidak bersekolah dan tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD), tingkat literasi keuangan moderat terkonsentrasi pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas hingga tamat strata dua (S2). Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan tinggi terdapat konsentrasi yang tidak merata, yaitu ada beberapa kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SD memiliki literasi tinggi, dan sebagian tamat SMA 8,11 persen, dan terbanyak pada kelompok dengan strata Diploma ke atas hingga tamat S2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka tingkat literasi keuangan semakin tinggi, namun sebagian kecil masyarakat lainnya dengan pendidikan rendah yang memiliki *well literacy*.

**Tabel 5.4 Basic Financial Literacy Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Laki-laki	18	8	13	39
Perempuan	27	13	11	51
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Dilihat dari *gender*, kelompok masyarakat dengan tingkat literasi rendah adalah perempuan yaitu 52,94 persen dan laki-laki 46,15 persen. Tingkat literasi moderat berada pada kelompok perempuan tertinggi yaitu 25,49 persen dan laki-laki 20,51 persen, hal ini sejalan dengan peran perempuan

seperti ibu rumah tangga yang memegang penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sementara tingkat literasi keuangan tinggi terdistribusi pada laki-laki yaitu 33,33 persen dan perempuan 21,57 persen, dimana sebagian besar kepala rumah tangga menjadi pengambil keputusan dalam keuangan rumah tangga.

Berdasarkan kepemilikan produk keuangan, tingkat literasi keuangan rendah terkonsentrasi pada kelompok produk *private bond* atau obligasi yaitu 50 persen dan 41,43 persen pada produk keuangan perbankan yaitu tabungan, deposito dan 40 persen pada produk tabungan lembaga keuangan non bank. Tingkat literasi keuangan moderat terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang memiliki kartu kredit 25 persen, produk tabungan dan deposito bank 24,29 persen dan produk tabungan non bank 20 persen. Dan kelompok masyarakat dengan tingkat literasi tinggi memiliki hampir sebagian besar produk keuangan mulai tabungan dan deposito di lembaga perbankan dan non bank hingga asuransi, kartu kredit dan surat berharga.

**Tabel 5.5 Basic Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan**

Produk Keuangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Rekening Tabungan Bank	29	17	24	70
Deposito Bank	4	2	4	10
Tabungan Lembaga Non Bank	12	6	12	30
Deposito Lembaga Non Bank	0	0	0	0
Asuransi	3	3	11	17
Kartu Kredit	5	5	10	20
Saham	2	0	6	8
Surat Berharga Pemerintah	0	0	1	1
<i>Private Bond</i>	1	0	1	2
Reksadana	0	0	1	1
Tidak Memiliki	13	4	0	17

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

### 5.1.2 Advanced Financial Literacy di Kabupaten Jember

*Advanced financial literacy* didasarkan pada pengetahuan lanjut mengenai instrumen produk pasar modal. Pada literasi lanjut juga dilihat hubungannya dengan pendapatan, pendidikan, gender dan kepemilikan produk keuangan.

**Tabel 5.6 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Pendapatan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Hingga Rp.1.000.000,-	42	0	0	42
>Rp.1.000.000,- - Rp.2.000.000,-	14	0	1	15
>Rp.2.000.000,- - Rp.2.000.000,-	19	0	0	19
>Rp.4.000.000,- - Rp.6.000.000,-	12	0	0	12
>Rp.6.000.000,- - Rp.8.000.000,-	2	0	0	2
>Rp.8.000.000,- - Rp.10.000.000,-	0	0	0	0
>Rp.10.000.000,-	0	0	0	0
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan tingkat pendapatan, tingkat literasi keuangan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dengan jumlah 89 responden, sementara yang memiliki tingkat literasi lanjut dengan kategori tinggi hanya 6,67 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi keuangan lanjut.

**Tabel 5.7 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Tidak Bersekolah	1	0	0	1
Tidak Tamat SD	1	0	0	1
Tamat SD/Sederajat	8	0	0	8
Tamat SMA/Sederajat	37	0	0	37
Tamat D1/D2/D3	8	0	0	8
Tamat S1	23	0	1	24
Tamat S2 atau lebih	11	0	0	11
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Begitu halnya dengan hubungan antara *advanced financial literacy* dan tingkat pendidikan lebih terkonsentrasi *advanced financial literacy* rendah dan terdistribusi pada tingkat pendidikan SMA ke atas hingga strata dua.

**Tabel 5.8 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Jenis Kelamin**

Gender	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
--------	--------	---------	--------	-------

Laki-laki	39	0	0	39
Perempuan	50	0	1	51
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan *gender*, *advanced financial literacy* juga rendah dan mayoritas adalah perempuan 98,04 persen hanya 1,96 persen yang memiliki *advanced financial literacy* tinggi.

Begitu halnya hubungan antara *advanced financial literacy* dan kepemilikan produk keuangan, juga menunjukkan konsentrasi pada kategori rendah dan banyak terdistribusi pada kepemilikan tabungan, deposito baik lembaga keuangan bank dan non-bank, asuransi, kartu kredit dan surat berharga.

**Tabel 5.9 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan**

Produk Keuangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Rekening Tabungan Bank	69	0	1	70
Deposito Bank	10	0	0	10
Tabungan Lembaga Non Bank	29	0	1	30
Deposito Lembaga Non Bank	89	0	1	90
Asuransi	17	0	0	17
Kartu Kredit	20	0	0	20
Saham	8	0	0	8
Surat Berharga Pemerintah	1	0	0	1
Private Bond	2	0	0	2
Reksadana	1	0	0	1
Tidak Memiliki	72	0	1	73

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

### 5.1.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember

Perilaku keuangan masyarakat berbeda tiap kategori tingkat literasi keuangan. Perilaku keuangan dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dalam mengelola keuangan diantaranya intensitas memeriksa saldo simpanan dan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan uang seperti cara mengatasi kesulitan keuangan, perencanaan keuangan dalam dana pensiun, pilihan terhadap beragam asuransi dan informasi yang selalu diikuti.

Pengelolaan keuangan menjadi faktor yang sangat penting bagi sebagian masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai arus kas keuangan dalam keseharian. Sementara bagi sebagian masyarakat lainnya hanya memerlukan gambaran umum mengenai keuangan mereka. Dengan demikian masyarakat dapat dengan baik mengatur dan mengelola keuangan yang diterima dengan alokasi yang teratur serta terencana. Perilaku dalam mengelola keuangan ditentukan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat.

**Tabel 5.10 Basic Financial Literacy Berdasarkan Frekuensi Checking Saldo Sebelum Penarikan**

<i>Checking</i>	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Selalu	9	4	9	22
Kadang-Kadang	15	5	14	34
Sering	5	8	1	14
Tidak pernah sama sekali	16	4	0	20
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Frekuensi memeriksa saldo sebelum melakukan penarikan uang pada *basic financial literacy*, terkonsentrasi pada kategori literasi rendah artinya masyarakat dengan *basic financial literacy* rendah paling banyak melakukan checking saldo dibandingkan dengan kategori literasi tinggi. Frekuensi selalu dan kadang-kadang memiliki konsentrasi terbesar. Begitu halnya dengan *advanced financial literacy*.

**Tabel 5.11 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Frekuensi Checking Saldo Sebelum Penarikan**

<i>Checking</i>	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Selalu	22	0	0	22
Kadang-Kadang	33	0	1	34
Sering	14	0	0	14
Tidak pernah sama sekali	20	0	0	20
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Pengelolaan keuangan juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam mencatat segala penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Pencatatan secara teratur dalam setiap anggaran akan memudahkan masyarakat dalam

mengelola keuangan dan membuat perencanaan keuangan yang akan datang. Pada literasi dasar (*basic financial literacy*), ternyata kelompok kategori rendah lebih banyak melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran diikuti kelompok masyarakat dengan literasi dasar tinggi. Namun disisi lain juga banyak kelompok masyarakat dengan literasi dasar rendah tidak melakukan pencatatan sama sekali, sementara kategori literasi dasar tinggi paling sedikit yang tidak pernah sama sekali melakukan pencatatan.

**Tabel 5.12 Basic Financial Literacy Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Ya	8	2	5	15
Tidak pernah sama sekali	26	18	17	61
Tidak sama sekali	8	1	2	11
Lainnya	3	0	0	3
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Sementara pada literasi lanjut (*advanced financial literacy*), ternyata kelompok kategori rendah lebih banyak melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran diikuti kelompok masyarakat dengan literasi lanjut tinggi. Namun disisi lain juga banyak kelompok masyarakat dengan literasi lanjut rendah yaitu 60 responden yang tidak melakukan pencatatan sama sekali.

**Tabel 5.13 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Ya	15	0	0	15
Tidak pernah sama sekali	60	0	1	61

Tidak sama sekali	11	0	0	11
Lainnya	3	0	0	3
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Seperti halnya dengan pengelolaan keuangan secara agregat, pengelolaan uang juga memerlukan perencanaan yang baik yang mencakup beberapa aspek salah satunya adalah cara mengatasi kesulitan keuangan baik untuk usaha atau bisnis maupun kesulitan yang dihadapi dalam keseharian. Selain itu perencanaan keuangan juga mencakup aspek bagaimana mengalokasikan kelebihan uang yang dimiliki dan kepemilikan terhadap dana pensiun.

**Tabel 5.14 Basic Financial Literacy Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Memangkas Pengeluaran	6	1	3	10
Meminjam di Bank	12	3	10	25
Meminjam dari Lembaga Non Bank	6	4	6	16
Meminjam dari Keluarga/Teman	12	3	5	20
Meminjam dari Rentenir	0	0	0	0
Mengambil Tabungan dan Deposito	3	4	0	7
Menjual Aset Lainnya	0	1	0	1
Kerjasama Bisnis	0	0	0	0
Menggunakan Kartu Kredit	0	0	0	0
Membeli Secara Kredit pada vendor	0	0	0	0
Lainnya	6	5	0	11
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Pada literasi dasar (*basic financial literacy*), ternyata kelompok kategori rendah lebih banyak memilih penyelesaian kesulitan usaha dengan menekan pengeluaran, meminjam dari bank, keluarga atau teman dan mengambil simpanan yang ada di bank diikuti kelompok masyarakat dengan literasi dasar tinggi, sedangkan kelompok literasi lanjut moderat sebagian juga ada yang menjual aset.

Seperti halnya pada literasi dasar, tingkat literasi lanjut (*advanced financial literacy*), ternyata kelompok kategori rendah lebih banyak memilih penyelesaian kesulitan usaha dengan menekan pengeluaran, meminjam dari bank, keluarga atau teman, mengambil simpanan yang ada di bank dan sebagian ada yang menjual aset diikuti kelompok masyarakat dengan literasi dasar tinggi yang lebih memilih meminjam dari lembaga non bank.

**Tabel 5.15 *Advanced Financial Literacy* Penyelesaian Keuangan Bisnis**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Memangkas Pengeluaran	10	0	0	10
Meminjam di Bank	25	0	0	25
Meminjam dari Lembaga Non Bank	15	0	1	16
Meminjam dari Keluarga/Teman	20	0	0	20
Meminjam dari Rentenir	0	0	0	0
Mengambil Tabungan dan Deposito	7	0	0	7
Menjual Aset Lainnya	1	0	0	1
Kerjasama Bisnis	0	0	0	0
Menggunakan Kartu Kredit	0	0	0	0
Membeli Secara Kredit pada vendor	0	0	0	0
Lainnya	11	0	0	11
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.16 *Basic Financial Literacy* Penyelesaian Keuangan Harian**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menekan Pengeluaran	17	7	11	35
Meminjam di Bank	4	1	0	5
Meminjam dari Lembaga Non Bank	3	2	2	7
Meminjam dari Keluarga/Teman	11	5	6	22
Meminjam dari Rentenir	0	0	0	0
Mengambil Tabungan dan Deposito	1	2	0	3
Menjual Aset Lainnya	0	0	0	0
Meminjam dari Pegadaian	0	0	0	0
Membeli Kredit pada Toko	0	0	0	0
Menggunakan Kartu Kredit	0	0	0	0

Menambah Jam kerja	1	0	0	1
Mengambil Tambahan Pekerjaan	3	1	2	6
Lainnya	5	3	3	11
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.17 *Advanced Financial Literacy* Penyelesaian Keuangan Harian**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menekan Pengeluaran	34	0	1	35
Meminjam di Bank	5	0	0	5
Meminjam dari Lembaga Non Bank	7	0	0	7
Meminjam dari Keluarga/Teman	22	0	0	22
Meminjam dari Rentenir	0	0	0	0
Mengambil Tabungan dan Deposito	3	0	0	3
Menjual Aset Lainnya	0	0	0	0
Meminjam dari Pegadaian	0	0	0	0
Membeli Kredit pada Toko	0	0	0	0
Menggunakan Kartu Kredit	0	0	0	0
Menambah Jam kerja	1	0	0	1
Mengambil Tambahan Pekerjaan	6	0	0	6
Lainnya	11	0	0	11
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.18 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Alokasi Uang**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menyimpan di Bank	20	10	11	41
Konsumsi	9	2	2	13
Menambah Modal Usaha	2	4	2	8
Membayar Hutang	1	0	2	3
Menyumbang Kegiatan Amal	1	0	1	2
Memulai Bisnis Baru	2	0	2	4
Menyimpan Tunai di Rumah	7	2	1	10
Investasi Membeli Aset	2	2	1	5
Menyimpan di Lembaga Non	1	1	2	4

Bank				
Lainnya	0	0	0	0
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Alokasi keuangan pada kelompok literasi tinggi yang dilakukan responden mayoritas adalah menyimpan uang di bank dan untuk konsumsi dan sebagian lainnya menyimpan tunai di rumah. Sementara untuk tingkat literasi keuangan tinggi lebih terdistribusi merata baik untuk disimpan, konsumsi, menambah modal usaha dan membeli investasi membeli aset.

**Tabel 5.19 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Alokasi Uang**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menyimpan di Bank	41	0	0	41
Konsumsi	13	0	0	13
Menambah Modal Usaha	7	0	1	8
Membayar Hutang	3	0	0	3
Menyumbang Kegiatan Amal	2	0	0	2
Memulai Bisnis Baru	4	0	0	4
Menyimpan Tunai di Rumah	10	0	0	10
Investasi Membeli Aset	5	0	0	5
Menyimpan di Lembaga Non Bank	4	0	0	4
Lainnya	0	0	0	0
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Perencanaan jangka panjang keuangan yang sangat penting adalah kepemilikan terhadap dana pensiun sebagai jaminan kehidupan pada saat pensiun.

**Tabel 5.20 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun**

Kepemilikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Punya	10	10	11	31
Tidak Punya	35	11	13	59
Total	45	21	24	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

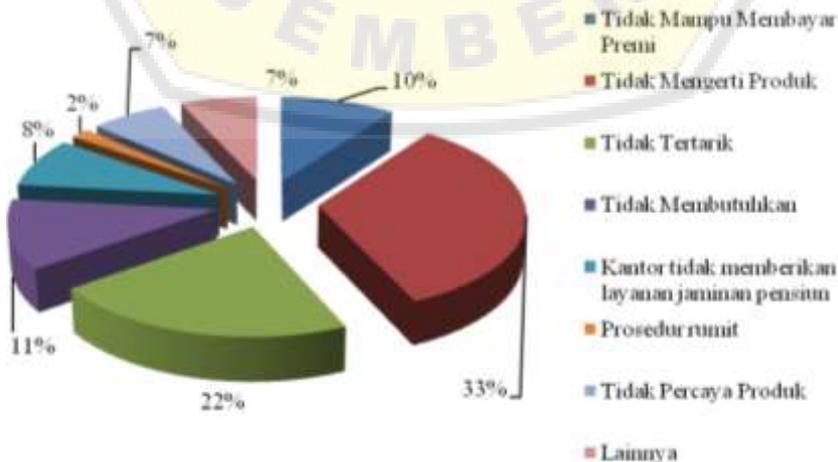
Pada literasi dasar, kepemilikan dana pensiun tertinggi yaitu pada kategori tinggi yaitu 35,48 persen dan terdistribusi sama pada literasi keuangan rendah dan moderat yaitu 32,26 persen. Mayoritas responden yang tidak memiliki dana pensiun berada pada kelompok literasi rendah sebesar 59,32 persen dan literasi tinggi 22,03 persen sementara tingkat moderat adalah 18,64 persen. Begitu halnya dengan literasi lanjut 58 responden tidak memiliki dana pensiun dan hanya 31 orang yang memiliki pada tingkat rendah.

**Tabel 5.21 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun**

Kepemilikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Punya	31	0	0	31
Tidak Punya	58	0	1	59
Total	89	0	1	90

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

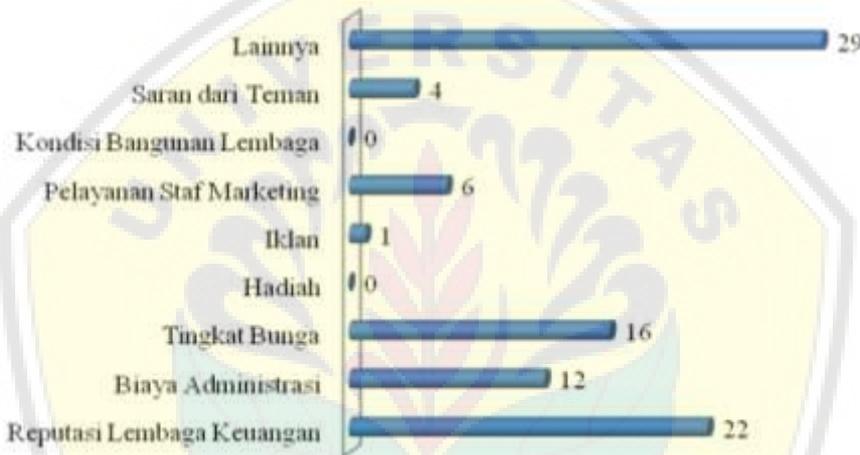
Terdapat beberapa alasan banyaknya responden yang tidak memiliki produk dana pensiun adalah 33 persen karena tidak mengerti mengenai produk dana pensiun, 22 persen karena tidak tertarik, 11 persen karena menganggap tidak membutuhkan, 10 persen karena tidak mampu membayar premi, delapan persen karena kantor tidak memberikan layanan jaminan pensiun, tujuh persen karena tidak percaya terhadap produk dana pensiun dan dua persen menganggap prosedur yang masih rumit.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.4 Komposisi Alasan Kepemilikan Produk Dana Pensiun**

Perencanaan masa datang juga dapat dilakukan melalui pilihan investasi yang ada. Investasi merupakan modal ditanam yang memberikan keuntungan dengan risiko tertentu. Oleh karena itu pemilihan jenis investasi sangat penting untuk dipertimbangkan secara matang untuk meminimalisir risiko yang timbul sebagaimana prinsip investasi “*do not put your eggs in one basket*”.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.5 Determinan Pemilihan Produk Keuangan**

Mayoritas responden memiliki pentingnya reputasi lembaga keuangan dalam memilih produk keuangan yang ditawarkan, tingkat bunga, biaya administrasi, pelayanan dari staf pemasaran dan iklan. Berbeda dengan produk dana pensiun, kepemilikan terhadap produk asuransi lebih banyak dan terkonsentrasi pada tingkat literasi lanjut rendah, namun untuk literasi dasar tinggi lebih pada pilihan asuransi jiwa. Jenis asuransi yang banyak dipilih adalah asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, kesehatan dan pendidikan.

**Tabel 5.22 Basic Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi**

Kepemilikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Asuransi Jiwa	4	1	5	10
Asuransi Kecelakaan	2	3	1	6
Asuransi Kesehatan	7	3	7	17
Asuransi Perhiasan	0	0	0	0

Asuransi Mobil	0	0	0	0
Asuransi Pertanian	0	0	0	0
Asuransi Pendidikan	4	1	0	5
Dana Pensiun	3	4	6	13
Total	20	12	19	51

Sumber : Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.23 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi**

<b>Kepemilikan</b>	<b>Rendah</b>	<b>Moderat</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Total</b>
Asuransi Jiwa	10	0	0	10
Asuransi Kecelakaan	6	0	0	6
Asuransi Kesehatan	17	0	0	17
Asuransi Perhiasan	0	0	0	0
Asuransi Mobil	0	0	0	0
Asuransi Pertanian	0	0	0	0
Asuransi Pendidikan	5	0	0	5
Dana Pensiun	13	0	0	13
Total	51	0	0	51

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Pengelolaan keuangan perlu pula didukung oleh kecukupan informasi yang dimiliki masyarakat. Semakin lengkap informasi keuangan yang dimiliki masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat.

**Tabel 5.24 Tipe Informasi yang diikuti Responden**

<b>Tipe Informasi</b>	<b>Rendah</b>	<b>Moderat</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Total</b>
Ekonomi dan Keuangan	14	0	0	14
Politik	14	0	1	15
Sosial	20	0	0	20
Budaya	1	0	0	1
Selebritis	7	0	0	7
Entertainment	12	0	0	12
Kriminal	1	0	0	1

Lainnya	20	0	0	20
Total	89	0	1	90

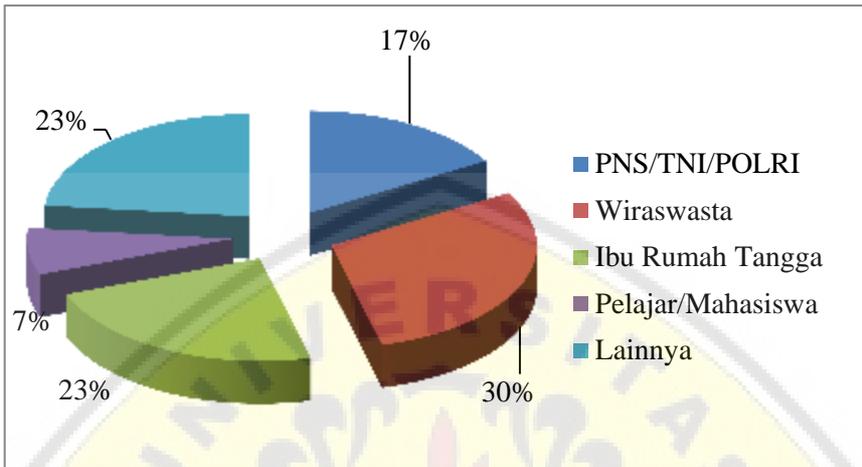
Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Tipe informasi sosial masih mendominasi pilihan informasi yang selalu diikuti oleh responden sebanyak 20 orang, diikuti informasi ekonomi dan keuangan sebanyak 14 responden. Konsentrasi informasi pada kelompok literasi rendah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi perilaku keuangan masyarakat untuk mengikuti informasi keuangan sehingga nantinya akan mempengaruhi tingkat literasi masyarakat.

### 5.2 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Bondowoso

Seperti halnya di Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso yang secara geografis berdekatan dengan Kabupaten Jember juga memiliki karakteristik sosial budaya masyarakat yang tidak jauh berbeda. Kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 1.560,10 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 756.989 jiwa memiliki potensi sumberdaya yang berperan penting dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu halnya dengan perkembangan sektor keuangan sejalan dengan perkembangan daerah dengan dengan beranekaragam karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.

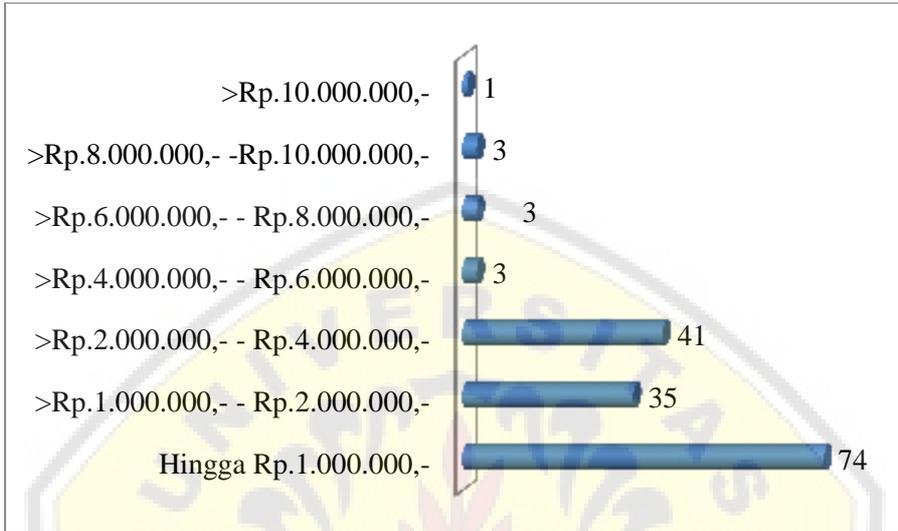
Kajian yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, dan Kecamatan Sumber Wringin. Alasan pemilihan ketiga daerah tersebut didasarkan pada letak daerah dari pusat kota. Kecamatan Bondowoso mewakili wilayah yang dekat dengan pusat kota. Kemudian Kecamatan Tenggarang mewakili wilayah dengan jarak menengah dari pusat kota dan Kecamatan Sumberwringin mewakili wilayah dengan jarak terjauh dari pusat kota. Jumlah total responden sebanyak 180 dengan proporsi ibu rumah tangga 23 persen, kalangan pekerja baik pemerintah maupun swasta 30 persen, pelajar atau mahasiswa 7 persen. Kemudian PNS/TNI/POLRI 17% dan sisanya 23 persen bekerja pada sektor lainnya.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.6 Komposisi Pekerjaan Responden**

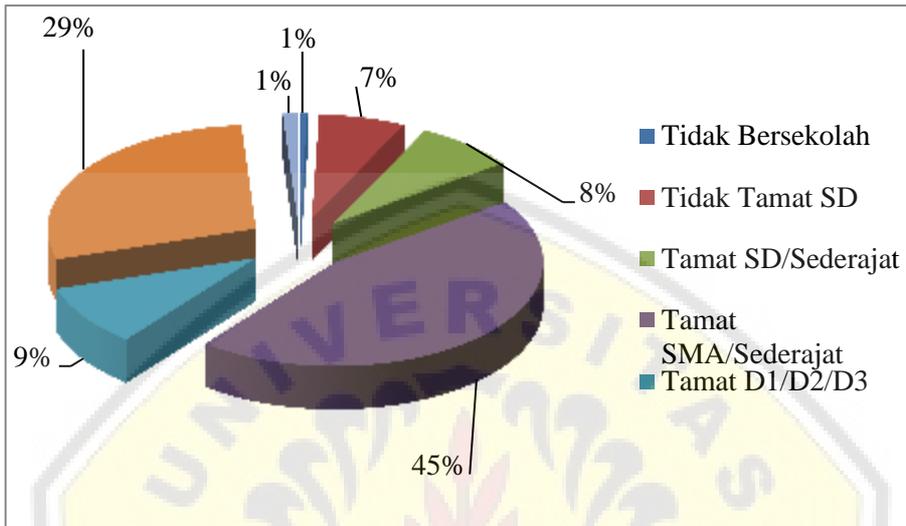
Secara garis besar, responden di Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat pendapatan yang rendah yaitu pada kisaran Rp. 1.000.000. Cerminan hasil pendapatan tersebut berhubungan dengan fakta bahwa sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga dan wiraswasta yang bekerja di sektor informal. Dari hasil kajian juga dapat diketahui bahwa responden dengan pendapatan pada kisaran Rp. 4.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- hanya berjumlah 10 responden atau sebesar 5,55 %. Terjadi ketimpangan atau *gap* yang relatif besar jika diperbandingkan antara jumlah responden yang berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.7 Distribusi Pendapatan Responden**

Berikutnya dengan menggunakan indikator pendidikan, kajian melakukan proporsi atas tingkat pendidikan responden di Kabupaten Bondowoso. Hasilnya sebanyak 45% responden sudah tamat SMA/ sederajat, 29% tamat S1 dan hanya 1% tidak bersekolah. Dari hasil proporsi diperoleh gambaran bahwa masyarakat secara umum telah menyadari akan pentingnya pendidikan sekaligus ini menjadi fakta yang menarik dikarenakan walaupun secara geografis Kabupaten Bondowoso terletak di wilayah utara Jawa Timur, tetapi tingkat pendidikan masyarakatnya sudah cukup tinggi.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Gambar 5.8** Komposisi Tingkat Pendidikan Responden

Selaras dengan Kabupaten Jember, dilakukan pula perhitungan dengan cara yang sama pada tingkat literasi keuangan di Kabupaten Bondowoso. Tingkat literasi dasar yaitu menggunakan 11 indikator atau kriteria mulai dari pengetahuan responden mengenai kelengkapan persyaratan dalam membuka rekening di bank hingga perhitungan bunga dan pengaruh inflasi dan *money illusion*. Untuk tingkat literasi keuangan, indikator pengetahuan yang digunakan lebih pada lembaga keuangan bank, mengingat mayoritas masyarakat lebih menggunakan jasa lembaga keuangan perbankan dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Sementara penilaian terhadap indikator tingkat literasi keuangan lanjut atau *advanced financial literacy* lebih menekankan pada pengetahuan mengenai instrumen produk-produk di pasar modal sebagai pasar keuangan terbesar lainnya selain pasar uang.

**Tabel 5.25**  
**Indikator Penilaian Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat**

No.	Indikator dan Bobot Tingkat Literasi keuangan			
	<i>Basic Financial Literacy</i>	Bobot	<i>Advanced Financial Literacy</i>	Bobot
1.	Kelengkapan KTP	0,09	Fungsi Pasar Modal	0,10
2.	Minimal jumlah uang pembukaan rekening tabungan awal	0,09	Tingkat Bunga dan Harga Surat Berharga atau Obligasi	0,10
3.	Minimum jumlah saldo rekening tabungan	0,09	Pendapatan Saham dan Obligasi	0,10
4.	Jaminan Simpanan dari Pemerintah	0,09	Resiko Saham dan Obligasi	0,10
5.	Perhitungan Tingkat Bunga Sederhana	0,09	Pengertian Membeli Saham	0,10
6.	Perhitungan Tingkat Bunga <i>Compounded Interest</i>	0,09	Pengertian Membeli Obligasi	0,10
7.	Perhitungan Tingkat Bunga Kredit	0,09	Penalti Menjual Obligasi Sebelum Jatuh Tempo	0,10
8.	Inflasi	0,09	Pilihan Investasi dengan Keuntungan Tinggi	0,10
9.	Diskon	0,09	Pilihan Investasi dengan Resiko Tinggi	0,10
10.	Nilai Uang	0,09	Diversifikasi Investasi	0,10
11.	<i>Money Illusion</i>	0,09		

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Secara agregat diperoleh tingkat literasi keuangan yang rendah yaitu sebesar 34,01 pada klasifikasi *basic financial literacy* dengan nilai indeks 49,90 berada pada kategori moderat atau sedang, sementara untuk *advanced financial literacy* juga berada pada kategori rendah yaitu sebesar 18,11.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan dinamika keuangan dengan jumlah lembaga keuangan baik bank maupun non bank dan segala ragam jasa serta produk keuangannya yang cukup pesat. Sementara untuk pengetahuan lanjut, memang pada umumnya masyarakat memiliki literasi rendah karena belum ditunjang atau masih minimnya jumlah lembaga sekuritas pasar modal di Kabupaten Bondowoso dan tidak semua masyarakat mendapatkan informasi mengenai pasar modal.

### 5.2.1 Basic Financial Literacy di Kabupaten Bondowoso

Kondisi sosial demografis masyarakat di Kabupaten Bondowoso dapat menyebabkan perubahan tingkat literasi keuangan. Indikator literasi keuangan di Kabupaten Bondowoso adalah pendapatan, pendidikan, jenis kelamin dan kepemilikan terhadap produk keuangan. Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilihat perubahan penilaian distribusi literasi keuangan masyarakat dalam tiga kategori yang ditentukan oleh kondisi sosial demografis masyarakat di Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 5.26 Basic Financial Literacy Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Pendapatan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Hingga Rp.1.000.000,-	46	13	15	74
>Rp.1.000.000,- - Rp.2.000.000,-	21	9	5	35
>Rp.2.000.000,- - Rp.2.000.000,-	22	6	13	41
>Rp.4.000.000,- - Rp.6.000.000,-	1	1	1	3
>Rp.6.000.000,- - Rp.8.000.000,-	3	0	0	3
>Rp.8.000.000,- - Rp.10.000.000,-	2	1	0	3
>Rp.10.000.000,-	1	0	0	1
Total	96	30	34	160

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Distribusi *basic financial literacy* berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Bondowoso, masyarakat yang memiliki literasi keuangan dasar rendah berada pada kelompok pendapatan antara Rp.6.000.000,- hingga Rp.8.000.000,- dengan persentase sebesar 100 persen, sedang untuk tingkat literasi moderat terkonsentrasi pada kelompok pendapatan antara Rp. 4.000.000,- hingga Rp.6.000.000,- dan tingkat literasi tinggi juga berada pada kelompok Rp. 4.000.000,- hingga Rp. 6.000.000,-. Pola distribusi hubungan antara *basic financial literacy* di Kabupaten Bondowoso sama dengan di Kabupaten Jember yang memiliki tingkat pendapatan berbanding

lurus dengan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan melalui jasa keuangan. Hal ini mencerminkan, tingginya tingkat pendapatan memengaruhi tingginya tingkat literasi keuangan.

**Tabel 5.27 Basic Financial Literacy Berdasarkan Tingkat Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Tidak Bersekolah	1	0	0	1
Tidak Tamat SD	10	2	0	12
Tamat SD/Sederajat	9	2	3	14
Tamat SMA/Sederajat	53	12	16	81
Tamat D1/D2/D3	10	0	7	17
Tamat S1	27	15	9	51
Tamat S2 atau lebih	1	1	0	2
Total	111	32	35	178

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Pola literasi keuangan memiliki distribusi yang tidak merata di Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat literasi keuangan yang rendah terkonsentrasi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah yaitu tidak bersekolah, sedangkan tingkat literasi keuangan moderat terkonsentrasi pada tamat strata dua (S2). Tingkat literasi keuangan yang tinggi di Kabupaten Bondowoso memiliki konsentrasi yang tidak merata, yaitu beberapa kelompok dengan tingkat pendidikan tamat SD, sebagian tamat SMA 19.75 persen, dan terbanyak pada kelompok dengan strata dan diploma. Berdasarkan indikator tingkat pendidikan di Kabupaten Bondowoso menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan, namun *well literacy* dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah.

**Tabel 5.28 Basic Financial Literacy Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Laki-laki	49	18	14	81
Perempuan	62	15	22	99
Total	111	21	24	180

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Dengan melihat faktor *gender*, kelompok masyarakat dengan tingkat literasi rendah adalah laki-laki yaitu 49,60 persen dan perempuan 62,63 persen. Tingkat literasi moderat berada pada kelompok laki-laki tertinggi

yaitu 22.22 persen dan perempuan 15.15 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tinggi terdistribusi pada perempuan yaitu 22.22 persen dan laki-laki 17.28 persen, hal ini sejalan dengan peran perempuan seperti ibu rumah tangga yang memegang penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

**Tabel 5.29 Basic Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan**

Produk Keuangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Rekening Tabungan Bank	81	26	32	139
Deposito Bank	20	0	3	23
Tabungan Lembaga Non Bank	29	9	8	46
Deposito Lembaga Non Bank	5	0	1	6
Asuransi	11	3	5	19
Kartu Kredit	15	2	2	19
Saham	7	0	0	7
Surat Berharga Pemerintah	10	0	0	10
<i>Private Bond</i>	3	0	0	3
Reksadana	2	0	0	2
Tidak Memiliki	10	1	0	17

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan kepemilikan produk keuangan, tingkat literasi keuangan rendah di Kabupaten Bondowoso terkonsentrasi pada kelompok produk saham, surat berharga pemerintah, *private bond* dan reksadana yaitu sebesar 100 persen. Tingkat literasi keuangan moderat terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang memiliki tabungan di lembaga *non bank* sebesar 19.57 persen dan rekening tabungan bank sebesar 18.71 persen. Dan kelompok masyarakat dengan tingkat literasi tinggi terkonsentrasi pada kepemilikan produk keuangan dalam bentuk asuransi sebesar 26.32 persen dan rekening tabungan bank sebesar 23.02 persen.

## 5.2.2 Advanced Financial Literacy di Kabupaten Bondowoso

*Advanced financial literacy* didasarkan pada pengetahuan lanjut mengenai instrumen produk pasar modal. Pada literasi lanjut juga dilihat hubungannya dengan pendapatan, pendidikan, gender dan kepemilikan produk keuangan.

**Tabel 5.30 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Pendapatan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Hingga Rp.1.000.000,-	73	1	0	74
>Rp.1.000.000,- - Rp.2.000.000,-	35	0	0	35
>Rp.2.000.000,- - Rp.2.000.000,-	41	0	0	41
>Rp.4.000.000,- - Rp.6.000.000,-	3	0	0	3
>Rp.6.000.000,- - Rp.8.000.000,-	3	0	0	3
>Rp.8.000.000,- - Rp.10.000.000,-	3	0	0	3
>Rp.10.000.000,-	1	0	0	1
Total	159	1	0	160

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan tingkat pendapatan, tingkat *advanced financial literacy* di Kabupaten Bondowoso lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah yaitu hampir mencapai 73%, sementara yang memiliki *advanced financial literacy* dengan kategori moderat hanya 1.35 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi keuangan lanjut di Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 5.31 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Tidak Bersekolah	1	0	0	1
Tidak Tamat SD	12	0	0	12
Tamat SD/Sederajat	14	0	0	14
Tamat SMA/Sederajat	78	3	0	81
Tamat D1/D2/D3	17	0	0	17
Tamat S1	51	0	0	51
Tamat S2 atau lebih	2	0	0	2
Total	175	3	0	178

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berbeda dengan hubungan antara literasi keuangan dasar dan tingkat pendidikan, hubungan antara *advanced financial literacy* dan tingkat pendidikan lebih terkonsentrasi pada *advanced financial literacy* rendah dan terdistribusi pada tingkat pendidikan SMA ke atas hingga strata dua. Sedangkan tingkat pendidikan yang rendah (tidak bersekolah – SD/ sederajat) juga memiliki tingkat *advanced financial literacy* yang rendah pula.

**Tabel 5.32 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Laki-laki	81	0	0	81
Perempuan	96	3	0	99
Total	177	3	0	180

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Berdasarkan *gender*, *advanced financial literacy* juga rendah dan mayoritas adalah laki-laki sebesar 100 persen dan hanya 3.03 persen perempuan yang memiliki *advanced financial literacy* tinggi. Hal ini mengingat perempuan umumnya berperan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Begitu halnya hubungan antara *advanced financial literacy* dan kepemilikan produk keuangan, juga menunjukkan konsentrasi pada kategori rendah dan banyak terdistribusi pada kepemilikan tabungan dan deposito baik lembaga keuangan bank dan non-bank, kartu kredit, saham, surat berharga, *private bond*, dan reksadana

**Tabel 5.33 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan**

Produk Keuangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Rekening Tabungan Bank	136	3	0	139
Deposito Bank	22	1	0	23
Tabungan Lembaga Non Bank	46	0	0	46
Deposito Lembaga Non Bank	19	0	0	19
Asuransi	18	1	0	19
Kartu Kredit	7	0	0	7
Saham	10	0	0	10
Surat Berharga Pemerintah	3	0	0	3
Private Bond	2	0	0	2
Reksadana	11	0	0	11
Tidak Memiliki	72	0	0	72

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

## 5.2.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso

Pengelolaan keuangan menjadi faktor yang sangat penting bagi sebagian masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai arus kas keuangan dalam keseharian. Sementara bagi sebagian masyarakat lainnya hanya memerlukan gambaran umum mengenai keuangan mereka. Dengan demikian masyarakat dapat dengan baik mengatur dan mengelola keuangan yang diterima dengan alokasi yang teratur serta terencana. Perilaku dalam mengelola keuangan ditentukan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat.

**Tabel 5.34 Basic Financial Literacy Berdasarkan Frekuensi Checking Saldo Sebelum Penarikan**

<i>Checking</i>	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Selalu	25	3	14	42
Kadang-Kadang	41	22	19	82
Sering	5	2	0	7
Tidak pernah sama sekali	23	6	2	31
Total	94	33	35	162

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Frekuensi memeriksa saldo sebelum melakukan penarikan uang pada *basic financial literacy*, terkonsentrasi pada kategori literasi rendah artinya masyarakat dengan *basic financial literacy* rendah paling banyak melakukan *checking* saldo dibandingkan dengan kategori literasi tinggi. Frekuensi selalu dan kadang-kadang memiliki konsentrasi terbesar. Begitu halnya dengan *advanced financial literacy*.

**Tabel 5.35 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Frekuensi Checking Saldo Sebelum Penarikan**

<i>Checking</i>	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Selalu	41	1	0	42
Kadang-Kadang	80	2	0	82
Sering	7	0	0	7
Tidak pernah sama sekali	31	0	0	31
Total	159	0	1	162

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Pengelolaan keuangan juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam mencatat segala penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Pencatatan secara teratur dalam setiap anggaran akan memudahkan masyarakat dalam mengelola keuangan dan membuat perencanaan keuangan yang akan datang.

Pada literasi dasar (*basic financial literacy*), ternyata kelompok kategori rendah lebih banyak melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran diikuti kelompok masyarakat dengan literasi dasar tinggi. Namun disisi lain juga banyak kelompok masyarakat dengan literasi dasar rendah tidak melakukan pencatatan sama sekali, sementara kategori literasi dasar tinggi paling sedikit yang tidak pernah sama sekali melakukan pencatatan.

**Tabel 5.36 Basic Financial Literacy Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Ya	33	9	11	53
Tidak pernah sama sekali	59	19	23	101
Tidak sama sekali	16	5	1	22
Lainnya	0	0	1	1
Total	108	33	36	177

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Sementara pada literasi lanjut (*advanced financial literacy*), ternyata kelompok kategori rendah lebih banyak melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran diikuti kelompok masyarakat dengan literasi lanjut tinggi.

**Tabel 5.37 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Ya	53	0	0	53
Tidak pernah sama sekali	98	3	0	101
Tidak sama sekali	22	0	0	22
Lainnya	1	0	0	1
Total	174	3	0	177

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Seperti halnya dengan pengelolaan keuangan secara agregat, pengelolaan uang juga memerlukan perencanaan yang baik yang mencakup beberapa aspek salah satunya adalah cara mengatasi kesulitan keuangan baik untuk usaha atau bisnis maupun kesulitan yang dihadapi dalam keseharian. Selain itu perencanaan keuangan juga mencakup aspek bagaimana mengalokasikan kelebihan uang yang dimiliki dan kepemilikan terhadap dana pensiun.

**Tabel 5.38 Basic Financial Literacy Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Memangkas Pengeluaran	16	6	7	29
Meminjam di Bank	30	8	11	49
Meminjam dari Lembaga Non Bank	8	0	2	10
Meminjam dari Keluarga/Teman	27	10	8	45
Meminjam dari Rentenir	1	1	0	2
Mengambil Tabungan dan Deposito	9	3	3	15
Menjual Aset Lainnya	3	0	0	3
Kerjasama Bisnis	2	0	0	2
Menggunakan Kartu Kredit	4	3	4	11
Membeli Secara Kredit pada vendor	1	0	1	2
Lainnya	1	0	0	1
Total	102	31	36	169

Sumber : Data Primer, diolah, 2015

Pada literasi dasar (*basic financial literacy*), kelompok kategori rendah lebih banyak memilih penyelesaian kesulitan usaha dengan menjual aset lainnya dan meminjam dari lembaga non bank. Kemudian kelompok masyarakat dengan literasi dasar tinggi lebih memilih untuk meminjam dari keluarga/teman, memangkas pengeluaran, mengambil tabungan dan deposito, dan meminjam di bank. Sedangkan kelompok literasi lanjut moderat sebagian juga ada yang menggunakan kartu kredit dan membeli secara kredit pada vendor.

**Tabel 5.39 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Memangkas Pengeluaran	29	0	0	29
Meminjam di Bank	48	1	0	49
Meminjam dari Lembaga Non Bank	10	0	0	10
Meminjam dari Keluarga/Teman	43	2	0	45
Meminjam dari Rentenir	2	0	0	2
Mengambil Tabungan dan Deposito	15	0	0	15
Menjual Aset Lainnya	3	0	0	3
Kerjasama Bisnis	2	0	0	2
Menggunakan Kartu Kredit	11	0	0	11
Membeli Secara Kredit pada vendor	2	0	0	2
Lainnya	1	0	0	1
Total	166	3	0	169

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Seperti halnya pada penyelesaian kesulitan keuangan pada bisnis, kesulitan keuangan sehari-hari yang dihadapi responden terkonsentrasi pada kelompok literasi rendah dengan menekan pengeluaran, meminjam dari teman/keluarga dan mengambil tabungan baik untuk *basic financial literacy* maupun *advanced literacy*.

**Tabel 5.40 Basic Financial Literacy Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Harian**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menekan Pengeluaran	43	16	28	87
Meminjam di Bank	7	1	2	10
Meminjam dari Lembaga Non Bank	7	0	0	7
Meminjam dari Keluarga/Teman	17	8	4	29
Meminjam dari Rentenir	4	0	0	4
Mengambil Tabungan dan Deposito	8	2	0	10
Menjual Aset Lainnya	2	0	0	2
Meminjam dari Pegadaian	1	2	0	3
Membeli Kredit pada Toko	2	0	0	2
Menambah Jam kerja	2	0	01	3
Mengambil Tambahan Pekerjaan	9	4	1	14
Lainnya	3	0	0	3
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>174</b>

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.41 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Harian**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menekan Pengeluaran	85	0	0	85
Meminjam di Bank	10	0	0	10
Meminjam dari Lembaga Non Bank	7	0	0	7
Meminjam dari Keluarga/Teman	29	0	0	29
Meminjam dari Rentenir	4	0	0	4
Mengambil Tabungan dan Deposito	10	0	0	10
Menjual Aset Lainnya	2	0	0	2
Meminjam dari Pegadaian	3	0	0	3
Membeli Kredit pada Toko	1	1	0	2
Menambah Jam kerja	3	0	0	3
Mengambil Tambahan Pekerjaan	14	1	0	14
Lainnya	3	0	0	3
<b>Total</b>	<b>171</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>172</b>

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Selain pengelolaan keuangan dengan solusi optimal dalam menyelesaikan setiap kesulitan keuangan, pengelolaan juga bagaimana alokasi keuangan. Sebagian besar masyarakat lebih banyak mengalokasikan keuangannya di perbankan, dan sebagian ada yang menyimpan uang tunai di rumah dan sebagian lainnya lebih banyak menggunakan untuk menambah modal usaha dan membayar hutang.

**Tabel 5.42 Basic Financial Literacy Berdasarkan Alokasi Uang**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menyimpan di Bank	50	17	20	87
Konsumsi	6	0	2	8
Menambah Modal Usaha	13	4	7	24
Membayar Hutang	12	1	4	17
Menyumbang Kegiatan Amal	2	3	1	6
Memulai Bisnis Baru	2	0	0	2
Menyimpan Tunai di Rumah	16	5	1	22
Investasi Membeli Aset	4	2	1	7
Menyimpan di Lembaga Non Bank	1	1	0	2
Lainnya	1	0	0	1
Total	107	33	36	176

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.43 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Alokasi Uang**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Menyimpan di Bank	86	1	0	87
Konsumsi	8	0	0	8
Menambah Modal Usaha	22	2	0	24
Membayar Hutang	17	0	0	17
Menyumbang Kegiatan Amal	6	0	0	6
Memulai Bisnis Baru	2	0	0	2
Menyimpan Tunai di Rumah	22	0	0	22
Investasi Membeli Aset	7	0	0	7
Menyimpan di Lembaga Non Bank	2	0	0	2
Lainnya	1	0	0	1
Total	173	3	0	176

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Alokasi keuangan pada kelompok literasi rendah yang dilakukan responden mayoritas adalah memulai bisnis baru. Selanjutnya untuk kelompok literasi moderat lebih memilih untuk melakukan penyimpanan di lembaga non bank dan menyumbang pada kegiatan amal. Sementara untuk tingkat literasi keuangan tinggi lebih terdistribusi merata baik untuk

menyimpan di bank, konsumsi, menambah modal usaha, membayar hutang, menyumbang kegiatan amal, menyimpan tunai di rumah, dan investasi membeli aset.

**Tabel 5.44 Basic Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Punya	19	8	12	39
Tidak Punya	84	25	23	132
Total	103	33	35	171

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

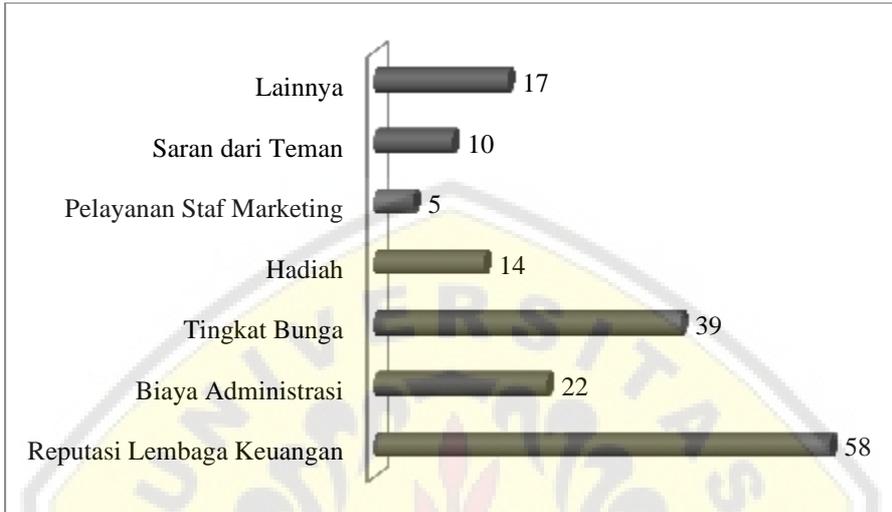
Perencanaan jangka panjang keuangan yang sangat penting adalah kepemilikan terhadap dana pensiun sebagai jaminan kehidupan pada saat pensiun. Pada literasi dasar, kepemilikan dana pensiun tertinggi yaitu pada kategori rendah yaitu 48.72 persen. Mayoritas responden yang tidak memiliki dana pensiun berada pada kelompok literasi rendah sebesar 63.64 persen dan literasi tinggi 17.42 persen sementara tingkat moderat adalah 18.94 persen. Begitu halnya dengan literasi lanjut 58 responden tidak memiliki dana pensiun dan hanya 31 orang yang memiliki pada tingkat rendah.

**Tabel 5.45 Advanced Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Punya	39	0	0	39
Tidak Punya	129	3	0	132
Total	168	3	0	171

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Perencanaan masa datang juga dapat dilakukan melalui pilihan investasi yang ada. Mayoritas responden memiliki pentingnya reputasi lembaga keuangan dalam memilih produk keuangan yang ditawarkan, tingkat bunga, biaya administrasi, pelayanan dari staf pemasaran dan iklan.



Sumber: Data Primer, diolah, 2015

### Gambar 5.9 Determinan Pemilihan Produk Keuangan

Berbeda dengan produk dana pensiun, kepemilikan terhadap produk asuransi lebih banyak dan terkonsentrasi pada tingkat literasi lanjut rendah, namun untuk literasi dasar tinggi lebih pada dana pensiun. Jenis asuransi yang banyak dipilih adalah asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan.

**Tabel 5.46 Basic Financial Literacy Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi**

Keterangan	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Asuransi Jiwa	13	5	3	21
Asuransi Kecelakaan	4	0	0	4
Asuransi Kesehatan	29	11	16	56
Asuransi Pertanian	1	1	0	2
Asuransi Pendidikan	11	7	7	25
Dana Pensiun	1	0	1	2
Total	59	24	27	110

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.47 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi**

	<b>Rendah</b>	<b>Moderat</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Total</b>
Asuransi Jiwa	21	0	0	21
Asuransi Kecelakaan	4	0	0	4
Asuransi Kesehatan	54	2	0	56
Asuransi Pertanian	2	0	0	2
Asuransi Pendidikan	24	1	0	25
Dana Pensiun	2	0	0	2
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Pengelolaan keuangan perlu pula didukung oleh kecukupan informasi yang dimiliki masyarakat. Semakin lengkap informasi keuangan yang dimiliki masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat. Tipe informasi politik, sosial, kriminal, serta ekonomi dan keuangan menjadi pilihan informasi yang selalu diikuti oleh masyarakat tingkat literasi rendah. Selanjutnya hanya informasi ekonomi dan keuangan yang diikuti oleh kelompok masyarakat tingkat literasi moderat.

**Tabel 5.48 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Tipe Informasi yang diikuti Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Rendah</b>	<b>Moderat</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Total</b>
Ekonomi dan Keuangan	36	11	18	65
Politik	12	6	3	21
Sosial	9	5	4	18
Budaya	3	0	0	3
Selebritis	15	2	3	20
Entertainment	13	7	3	23
Kriminal	5	2	1	8
Lainnya	2	0	3	5
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>163</b>

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

**Tabel 5.49 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tipe Informasi yang diikuti Responden**

	Rendah	Moderat	Tinggi	Total
Ekonomi dan Keuangan	62	3	0	65
Politik	21	0	0	21
Sosial	18	0	0	18
Budaya	3	0	0	3
Selebritis	20	0	0	20
Entertainment	23	0	0	23
Kriminal	8	0	0	8
Lainnya	5	0	0	5
Total	160	3	0	163

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Tingkat *advanced financial literacy* di Kabupaten Bondowoso dengan melihat tipe informasi yang diikuti oleh masyarakat memiliki literasi keuangan lanjut yang rendah. Tingkat moderat *advanced financial literacy* berada pada informasi ekonomi dan keuangan. Sedangkan tipe informasi politik, sosial, budaya, selebritis, dan kriminal memiliki tingkat literasi keuangan lanjut yang rendah. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, maka pengelolaan keuangan masyarakat perlu ditingkatkan melalui akses informasi yang memadai. Semakin banyaknya kelengkapan informasi keuangan yang diterima oleh masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat *advanced financial literacy*.

## BAB ENAM

### STRATEGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO

#### 6.1 Pengembangan Kebijakan Inklusi Keuangan di Indonesia

Indonesia berperan aktif dalam pembahasan inklusi keuangan dalam forum internasional. Sebagai anggota G-20, Indonesia memastikan 9 prinsip inovasi inklusi keuangan diimplementasikan di tingkat nasional. Indonesia juga telah berkomitmen dalam forum OECD untuk mengembangkan edukasi keuangan termasuk didalamnya penyusunan strategi nasional inklusi keuangan dan kegiatan *survei* literasi keuangan. Selain itu, Indonesia turut berperan aktif dalam forum APEC untuk memberikan *knowledge sharing* berbagai isu dan topik inklusi keuangan. Di tingkat regional, Indonesia turut aktif menekankan pentingnya inklusi keuangan salah satunya melalui *penyelenggaraan The 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion* untuk menjajaki pembentukan forum *financial inclusion* tingkat ASEAN. Dalam *Alliance for Financial Inclusion (AFI)*, Indonesia berkomitmen dalam *Maya Declaration* yang bertujuan mendukung pengembangan, inovasi dan implementasi program inklusi keuangan, serta peran aktif sebagai anggota *steering committee AFI*.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui cetak biru literasi keuangan dengan misi adalah untuk memberikan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan. Beberapa strategi dalam menciptakan inklusi dan literasi keuangan adalah pertama, penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh. Penekanan strategi ini ada pada pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan. Strategi kedua adalah penguatan dan pengembangan pasar dan industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar dan perluasan akses atas produk dan jasa layanan keuangan melalui perluasan jalur distribusi dan sinergi antarsektor di industri jasa keuangan. Strategi ketiga adalah pengembangan ekosistem yang lebih optimal

dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomis strategis serta pengembangan kualitas, efisiensi, dan daya tarik keuangan syariah. Sedangkan strategi keempat berupa penguatan tingkat literasi masyarakat dan penyempurnaan infrastruktur pendukung bagi perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang baik.

### **6.2 Strategi Kebijakan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso**

Inklusi keuangan merupakan strategi pembangunan nasional dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Dari hasil analisa deskriptif dan ekonometris maka dapat dirumuskan beberapa strategi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, antara lain:

#### **1. Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan**

Strategi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso secara eksplisit menasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk, yaitu:

- a. **Miskin Berpendapatan Terendah:** kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.
- b. **Miskin Bekerja:** kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.
- c. **Bukan Miskin:** kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

#### **2. Jenis kelamin**

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses produk perbankan, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Jember dan Bondowoso, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening

tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan dan kesehatan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

### 3. Penduduk Pedesaan dan daerah terpencil

Sekitar 52 persen penduduk di Jember dan Bondowoso hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari lingkungan, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional inklusi keuangan untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso yang terdiri dari:

1. Edukasi keuangan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan. Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas terutama bagi individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat yaitu 1) memberikan pendidikan literasi keuangan untuk generasi yang akan datang melalui sistem pendidikan formal; 2) meningkatkan akses informasi dan instrumen serta sumberdaya pengelolaan keuangan; dan 3) mendorong peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui beragam program dan bantuan.
2. Fasilitas keuangan publik mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM.
3. Pemetaan informasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan *tidak layak* untuk

menjadi *layak* atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi nasabah potensial.

4. Pelaksanaan program inklusi keuangan membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) menyusun kajian yang berkaitan dengan inklusi keuangan untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.
5. Perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d) edukasi konsumen.

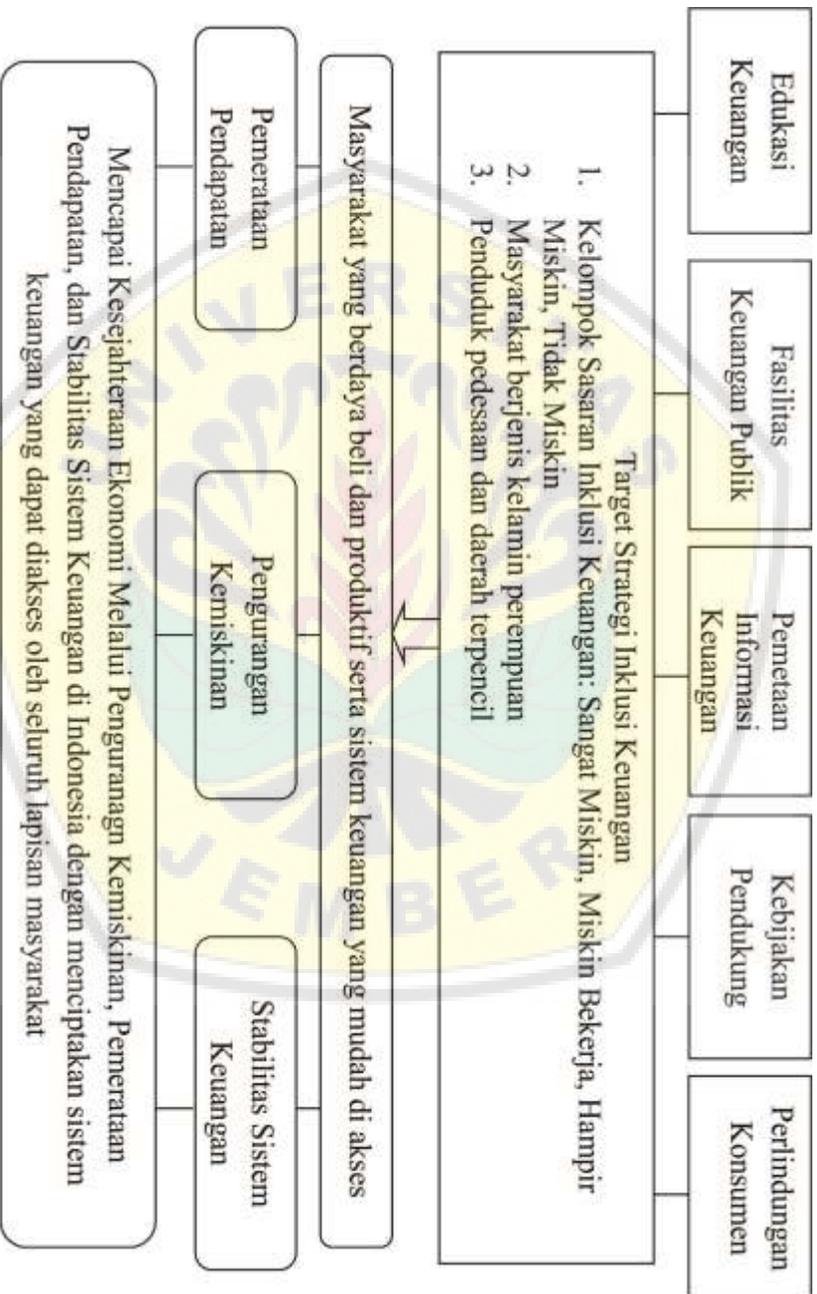
Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan pada suatu ukuran kinerja, maka berdasarkan hasil analisa indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah daerah dalam mengembangkan inklusi keuangan adalah:

1. mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan.
4. mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa

Berbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kementerian/instansi terkait dalam rangka implementasi strategi inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen dari berbagai kementerian/instansi terkait untuk secara aktif berupaya mengimplementasikan rencana-rencana masa depan serta program-program akan datang yang berkaitan dengan strategi inklusi

keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu melaksanakan implementasi strategi inklusi keuangan melalui peranan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif.
2. Pemetaan potensi daerah antara lain dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program dan stakeholder terkait.
3. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif yang akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penetapan program dan prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil pemetaan potensi daerah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaannya, dibuat pedoman pelaksanaan program keuangan inklusif.
4. Bank Indonesia menjadi *focal point* dengan fokus pada edukasi, perlindungan konsumen, pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran; edukasi perencanaan keuangan; pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk keuangan inklusif; serta pengembangan akses keuangan UMKM.
5. Mensosialisasikan program kegiatan keuangan inklusif, khususnya kepada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia serta pemangku kepentingan terkait.
6. Dalam rangka memperluas pengembangan keuangan inklusif diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
7. Melaksanakan kegiatan keuangan inklusif yang relevan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
8. Bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi perkembangan keuangan inklusif untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa datang.



**Gambar 6.1** Pilar Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso

## 6.3 Strategi Peningkatan Literasi Keuangan

Literasi keuangan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dan menjadi perhatian penting bagi pemerintah, industri perbankan, konsumen dan organisasi lainnya. Hal ini mengingat pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerentanan rumah tangga terhadap potensi terjadinya krisis keuangan. Ketepatan dalam pengelolaan bukan hanya berdampak pada tingkat mikro namun juga pada tataran makro yaitu stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui cetak biru literasi keuangan dengan misi adalah untuk memberikan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan. Beberapa strategi dalam menciptakan inklusi dan literasi keuangan adalah pertama, penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh. Penekanan strategi ini ada pada pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan. Strategi kedua adalah penguatan dan pengembangan pasar dan industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar dan perluasan akses atas produk dan jasa layanan keuangan melalui perluasan jalur distribusi dan sinergi antarsektor di industri jasa keuangan. Strategi ketiga adalah pengembangan ekosistem yang lebih optimal dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomis strategis serta pengembangan kualitas, efisiensi, dan daya tarik keuangan syariah. Sedangkan strategi keempat berupa penguatan tingkat literasi masyarakat dan penyempurnaan infrastruktur pendukung bagi perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas terutama bagi individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat yaitu 1) memberikan pendidikan literasi keuangan untuk generasi yang akan datang melalui sistem pendidikan formal; 2) meningkatkan akses informasi dan instrumen serta sumberdaya pengelolaan keuangan; dan 3) mendorong peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui beragam program dan bantuan.

Pertama, upaya meningkatkan literasi keuangan melalui pendidikan formal dapat dilakukan melalui beberapa hal antara lain mengintegrasikan dengan kurikulum pendidikan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dalam program pelatihan pembelajaran profesional, mengembangkan sumberdaya pengajar dan peserta didik melalui kurikulum

khusus untuk ekonomi dan bisnis, meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan vokasi pendidikan dan pelatihan.

Kedua, upaya dalam meningkatkan akses informasi, penyediaan instrumen dan pengembangan sumberdaya keuangan antara lain dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi mengenai pengelolaan keuangan dan mengembangkan *workplace-based financial literacy*. Dalam hal ini masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses segala informasi mengenai produk-produk keuangan berikut dengan tata kelolanya. Maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan wajib menyediakan infrastruktur penunjang sektor keuangan dalam berbagai tingkatan masyarakat dan kewilayahan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pendalaman dan perluasan akses atas produk dan jasa layanan keuangan.

Ketiga, meningkatkan kualitas literasi keuangan melalui beragam program dan bantuan antara lain melalui *good practice* khususnya sasaran pada kelompok masyarakat yang masih rentan terhadap perubahan atau sulit terjangkau baik secara kewilayahan maupun pemahaman. Hal ini ditunjang pula dengan memperkuat kapasitas tenaga pemberi informasi atau penyuluh dalam berbagai program literasi keuangan pada kelompok masyarakat tersebut.

Keempat, meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan peluang kerjasama antar sektor dan antar daerah dan kerjasama internasional melalui berbagai kegiatan *workshop* dan forum nasional mengenai literasi keuangan.

Kelima, meningkatkan riset dan evaluasi terhadap berbagai program literasi keuangan melalui partisipasi aktif dalam seminar internasional, mengembangkan riset terkait tingkat literasi keuangan dan determinan literasi keuangan yang ada di masyarakat, *good practice* baik dalam implementasi program hingga tahapan evaluasi, meningkatkan keahlian dan *sharing* pengetahuan serta mendorong riset dalam mendukung efektivitas dan dampak program literasi keuangan.

## BAB TUJUH

### STRATEGI PENGEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO

#### 7.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse 2006). Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keadaan konsumen yang memungkinkan untuk melakukan pembelian lebih baik (Mishkin 2008). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang bergantung terhadap situasi ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global turut pula menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Sehingga penguatan sistem keuangan diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Ketahanan keuangan menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara.

Inklusi keuangan telah menjadi diskusi menarik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah rekening tabungan di dunia lebih besar dari jumlah penduduk dunia namun separuh dari masyarakat dewasa masih belum memiliki tabungan atau *unbanked*. Dalam tataran makro, perkembangan keuangan adalah mengukur kedalaman jasa keuangan seperti proporsi jumlah kredit sektor swasta terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Oleh karena itu inklusi keuangan terkait langsung dengan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Inklusi keuangan juga memiliki peran penting terhadap pembangunan kualitas manusia. Sementara pada tataran mikro, adalah membantu masyarakat terhadap jasa keuangan dapat memitigasi resiko pada saat terjadi kejutan perekonomian. Adanya kejutan dapat menjadi *catastrophic*. Jasa keuangan membantu masyarakat dalam menabung dan mendapatkan keuntungan bunga sehingga menjadi modal produktif dan nantinya memberikan implikasi bagi stabilitas keuangan secara keseluruhan (Beck, *et al.*, 2006).

Dalam hal untuk meningkatkan strategi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso, identifikasi terhadap potensi dan

masalah menjadi sangat penting dalam memetakan strategi inklusi keuangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis *Strengths, Weakness, Opportunity* dan *Threats* (SWOT). Analisis SWOT adalah identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threatness*) (Rangkuti, 2000).

Pemetaan potensi atau posisi strategis inklusi keuangan mencakup 23 faktor yang terdiri dari 13 faktor internal dan 8 faktor eksternal. Faktor kekuatan internal mencakup banyaknya kegiatan sosial budaya masyarakat, banyaknya masyarakat yang memiliki alat komunikasi, besarnya minat masyarakat dalam menabung, besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit, potensi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat, ketertarikan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta berkembangnya UMKM. Sementara kelemahan internal antara lain adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal, masih tingginya minat masyarakat terhadap jasa keuangan non formal, tingginya kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit dari perbankan, masih tingginya penawaran pinjaman dari lembaga keuangan non formal dengan bunga tinggi namun dengan prosedur mudah, masih adanya pandangan atau budaya sebagian masyarakat yang tabu terhadap lembaga keuangan, serta masih rendahnya sosialisasi produk jasa keuangan secara persuasif.

Faktor eksternal peluang mencakup perkembangan jumlah penduduk, dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan global, perkembangan teknologi informasi di masyarakat, peningkatan mobilitas dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, dan dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan. Sedangkan kendala eksternal adalah meningkatnya jumlah lembaga keuangan non formal yang menawarkan kemudahan prosedur meskipun dengan bunga yang tinggi, rendahnya tingkat keterbukaan pada sebagian masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan formal, serta rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan masyarakat.

**Tabel 7.1**  
**Diagram SWOT Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten**  
**Jember dan Bondowoso**

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	<p><b>STRENGTHS (S)</b></p> <p>Faktor kekuatan internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya kegiatan sosial budaya masyarakat</li> <li>2. Banyaknya masyarakat yang memiliki alat komunikasi</li> <li>3. Besarnya minat masyarakat dalam menabung</li> <li>4. Besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit</li> <li>5. Potensi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat</li> <li>6. Ketertarikan masyarakat terhadap lembaga keuangan</li> <li>7. Berkembangnya UMKM</li> </ol>	<p><b>WEAKNESS (W)</b></p> <p>Faktor kelemahan internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya literasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal</li> <li>2. Masih tingginya minat masyarakat terhadap jasa keuangan non formal</li> <li>3. Tingginya kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit dari perbankan</li> <li>4. Masih tingginya penawaran pinjaman dari lembaga keuangan non formal dengan bunga tinggi namun dengan prosedur mudah</li> <li>5. Masih adanya pandangan atau budaya sebagian masyarakat yang tabu terhadap lembaga keuangan</li> <li>6. Masih rendahnya sosialisasi produk jasa keuangan secara persuasif</li> </ol>

<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b>                  Faktor peluang eksternal:                  1. Perkembangan jumlah penduduk                  2. Dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan global                  3. Perkembangan teknologi informasi di masyarakat                  4. Peningkatan mobilitas dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat                  5. Dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan</p>	<p><b>Strategi S-O</b>                  Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.</p>	<p><b>Strategi W-O</b>                  Strategi yang meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang:</p>
<p><b>THREATS (T)</b>                  Faktor tantangan eksternal:                  1. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan non formal yang menawarkan kemudahan prosedur meskipun dengan bunga yang tinggi                  2. Rendahnya tingkat keterbukaan pada sebagian masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan formal                  3. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan masyarakat</p>	<p><b>Strategi S-T</b>                  Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p>	<p><b>Strategi W-T</b>                  Strategi yang meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman</p>

## 7.1.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil identifikasi strategi internal inklusi keuangan di Kabupaten Jember, faktor kekuatan yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi internal sangat baik dari kondisi minat masyarakat dalam menabung dan memanfaatkan pendapatan mereka, serta potensi ekonomi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan sebagai strategi kebijakan inklusi keuangan.

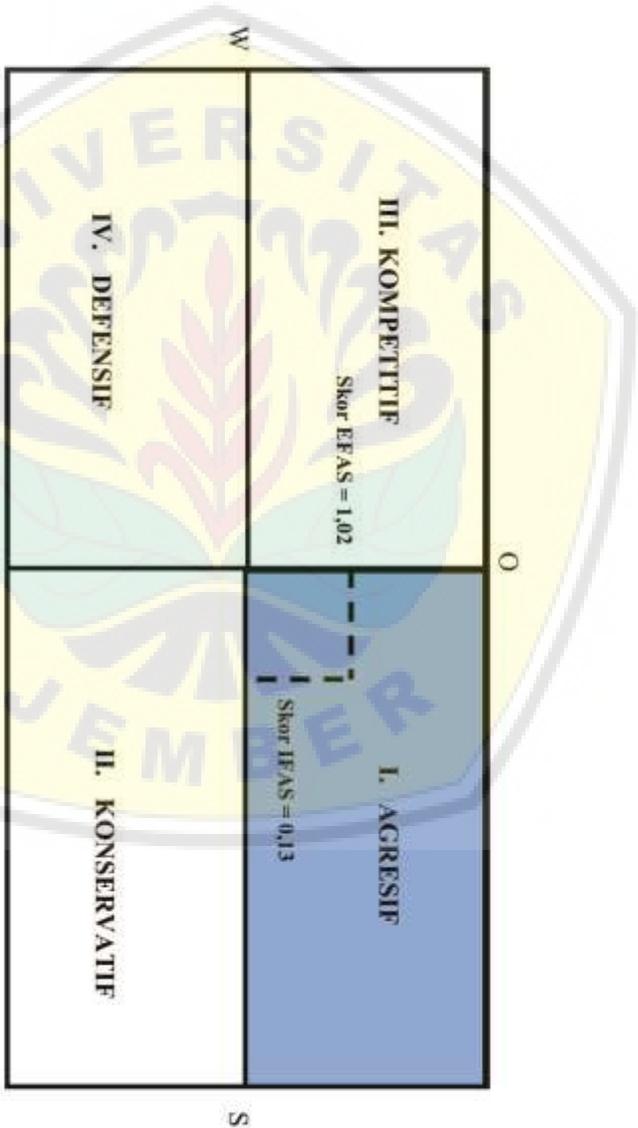
**Tabel 7.2 Hasil Pemetaan Faktor Internal Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember**

Komponen Faktor Internal (IFAS)		Bobot	Skor	Nilai
<b>Kekuatan</b>				
1	Banyaknya kegiatan sosial budaya masyarakat	0,07	2,98	0,21
2	Banyaknya masyarakat yang memiliki alat komunikasi	0,08	3,38	0,27
3	Besarnya minat masyarakat dalam menabung	0,08	3,22	0,25
4	Besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit	0,07	3,08	0,23
5	Potensi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat	0,07	3,08	0,23
6	Ketertarikan masyarakat terhadap lembaga keuangan	0,08	3,35	0,27
7	Berkembangnya UMKM	0,07	3,07	0,22
<b>Jumlah</b>		<b>0,53</b>		<b>1,68</b>
<b>Kelemahan</b>				
1	Masih rendahnya literasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal	0,08	3,32	0,26
2	Masih tingginya minat masyarakat terhadap jasa keuangan non formal	0,08	3,30	0,26
3	Tingginya kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit dari perbankan dengan persyaratan yang dianggap masih sulit	0,08	3,32	0,26
4	Masih tingginya penawaran pinjaman dari lembaga keuangan non formal dengan bunga tinggi namun dengan prosedur mudah	0,06	2,65	0,17
5	Masih adanya pandangan atau budaya sebagian masyarakat yang tabu terhadap lembaga keuangan	0,08	3,52	0,30
6	Masih rendahnya sosialisasi produk jasa keuangan secara persuasif	0,08	3,55	0,30
<b>Jumlah</b>		<b>0,475</b>		<b>1,55</b>
<b>Selisih Kekuatan dan Kelemahan</b>				<b>0,13</b>

Sementara berdasarkan hasil identifikasi strategi eksternal inklusi keuangan di Kabupaten Jember, faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi dan dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan tinggi serta cukup mampu dalam menangkap peluang eksternal dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman eksternal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi eksternal baik dari perkembangan dinamika global serta berkembangnya sistem dan teknologi informasi merupakan strategi untuk mengatasi ancaman dari luar. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif dari perbankan dalam memperkuat dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Jember.

**Tabel 7.3 Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember**

Komponen Faktor Eksternal (EFAS)		Bobot	Skor	Nilai
<b>Peluang</b>				
1	Perkembangan jumlah penduduk	0,125	3,40	0,42
2	Dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan global	0,126	3,45	0,44
3	Perkembangan teknologi informasi di masyarakat	0,132	3,60	0,48
4	Peningkatan mobilitas dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat	0,122	3,33	0,41
5	Dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan	0,133	3,63	0,48
<b>Jumlah</b>		<b>0,64</b>		<b>2,23</b>
<b>Hambatan</b>				
1	Meningkatnya jumlah lembaga keuangan non formal yang menawarkan kemudahan prosedur meskipun dengan bunga yang tinggi	0,101	2,750	0,28
2	Rendahnya tingkat keterbukaan pada sebagian masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan formal	0,126	3,433	0,43
3	Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan masyarakat	0,135	3,683	0,50
<b>Jumlah</b>		<b>0,36</b>		<b>1,21</b>
<b>Selisih Peluang dan Hambatan</b>				<b>1,02</b>



Sumber: Data Primer, diolah, 2016

Gambar 7.1 Posisi Strategis Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, maka posisi strategis peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Jember berada di daerah agresif yang mengindikasikan kebutuhan strategi yang komprehensif dan integrative, diantaranya (1) strategi meningkatkan kapasitas teknologi informasi kepada masyarakat; (2) strategi meningkatkan produksi layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat; (3) strategi memperkuat kelembagaan perbankan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan; serta (4) strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan non bank.

### **7.1.2 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso**

Hasil pemetaan strategi inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso pada sisi internal memiliki selisih yang lebih besar (0,52) daripada Kabupaten Jember (0,13). Hal ini mengindikasikan faktor kekuatan yang dimiliki Kabupaten Bondowoso lebih rendah daripada Kabupaten Jember, meskipun kekuatan internal masih menjadi faktor utama daripada kelemahannya. Kondisi ini memberi arti bahwa potensi internal di Kabupaten Bondowoso cukup baik dari kondisi minat masyarakat dalam memanfaatkan produk perbankan, berkembangnya kegiatan sosial ekonomi, serta ketertarikan masyarakat terhadap lembaga keuangan cukup tinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kapasitas produk dan akses informasi mengenai produk lembaga keuangan.

**Tabel 7.4 Hasil Pemetaan Faktor Internal Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso**

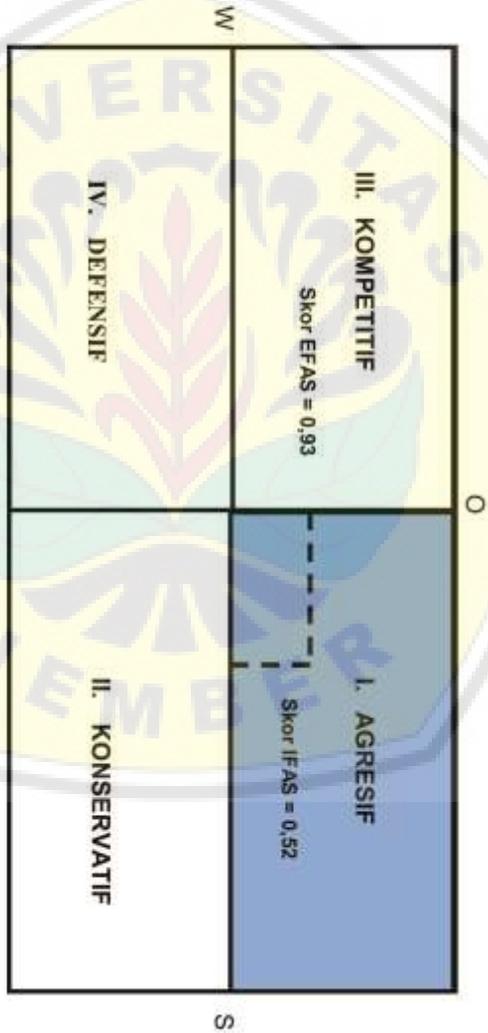
Komponen Faktor Internal (IFAS)		Bobot	Skor	Nilai
<b>Kekuatan</b>				
1	Banyaknya kegiatan sosial budaya masyarakat	0,077	2,60	0,20
2	Banyaknya masyarakat yang memiliki alat komunikasi	0,099	3,37	0,33
3	Besarnya minat masyarakat dalam menabung	0,082	2,77	0,23
4	Besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit	0,067	2,27	0,15
5	Potensi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat	0,086	2,90	0,25
6	Ketertarikan masyarakat terhadap lembaga keuangan	0,077	2,60	0,20
7	Berkembangnya UMKM	0,082	2,77	0,23
<b>Jumlah</b>		<b>0,57</b>		<b>1,59</b>
<b>Kelemahan</b>				
1	Masih rendahnya literasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal	0,07	2,517	0,19
2	Masih tingginya minat masyarakat terhadap jasa keuangan non formal	0,08	2,800	0,23
3	Tingginya kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit dari perbankan dengan persyaratan yang dianggap masih sulit	0,07	2,300	0,16
4	Masih tingginya penawaran pinjaman dari lembaga keuangan non formal dengan bunga tinggi namun dengan prosedur mudah	0,07	2,300	0,16
5	Masih adanya pandangan atau budaya sebagian masyarakat yang tabu terhadap lembaga keuangan	0,06	2,067	0,13
6	Masih rendahnya sosialisasi produk jasa keuangan secara persuasif	0,08	2,633	0,20
<b>Jumlah</b>		<b>0,43</b>		<b>1,06</b>
<b>Selisih Kekuatan dan Kelemahan</b>				<b>0,52</b>

Sementara berdasarkan hasil identifikasi strategi eksternal inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso, faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman dan selisih faktor eksternal Kabupaten Bondowoso lebih kecil (0,93) daripada Kabupaten Jember (1,02). Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam hal memanfaatkan produk pelayanan perbankan tinggi yang disertai dengan berkembangnya akses mobilitas sosial ekonomi di masyarakat. Selain itu di Kabupaten Bondowoso yang tipologi masyarakat dan daerahnya jauh dari pusat

ekonomi menjadikan banyaknya ragam pola pikir terhadap jasa keuangan. Tingginya perkembangan akses informasi masyarakat terhadap lembaga keuangan di Kabupaten Bondowoso cukup mampu dalam menangkap peluang eksternal dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman eksternal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi eksternal baik dari perkembangan dinamika global serta berkembangnya pola pikir masyarakat yang sadar akan fungsi dan tujuan perbankan merupakan strategi untuk mengatasi ancaman dari luar. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif dari perbankan dalam memperkuat dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 7.5 Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso**

Komponen Faktor Eksternal (EFAS)		Bobot	Skor	Nilai
<b>Peluang</b>				
1	Perkembangan jumlah penduduk	0,11	2,35	0,25
2	Dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan global	0,13	2,90	0,39
3	Perkembangan teknologi informasi di masyarakat	0,16	3,45	0,55
4	Peningkatan mobilitas dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat	0,13	2,75	0,35
5	Dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan	0,12	2,62	0,31
<b>Jumlah</b>		<b>0,65</b>		<b>1,85</b>
<b>Hambatan</b>				
1	Meningkatnya jumlah lembaga keuangan non formal yang menawarkan kemudahan prosedur meskipun dengan bunga yang tinggi	0,11	2,38	0,26
2	Rendahnya tingkat keterbukaan pada sebagian masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan formal	0,10	2,28	0,24
3	Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan masyarakat	0,14	3,03	0,42
<b>Jumlah</b>		<b>0,35</b>		<b>0,92</b>
<b>Selisih Peluang dan Hambatan</b>				<b>0,93</b>



Sumber: Data Primer, diolah, 2016

Gambar 7.2 Posisi Strategis Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal dengan nilai EFAS sebesar 0,93 dan nilai IFAS sebesar 0,52 memberikan arti posisi strategis peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso berada di daerah agresif. Posisi ini memberikan arti bahwa strategi peningkatan Inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso, diantaranya (1) strategi meningkatkan akses informasi mengenai produk lembaga keuangan ke masyarakat; (2) strategi meningkatkan kapasitas layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat; (3) strategi memperkuat kebijakan perbankan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan; serta (4) strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan non bank.

### **7.1.3 Strategi Inklusi Keuangan Lembaga Perbankan**

Hasil pemetaan strategi inklusi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso menunjukkan faktor internal kekuatan memiliki posisi yang cukup kuat dalam memengaruhi strategi internal lembaga perbankan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Hal ini mengindikasikan faktor kekuatan yang dimiliki perbankan di Kabupaten Jember dan Bondowoso lebih besar daripada faktor kelemahan yang dimiliki. Kondisi ini memberi arti bahwa faktor komponen internal perbankan cukup baik dari sisi kekuatan seperti produk lembaga keuangan yang mempunyai brand image yang baik dan dapat menjangkau ke daerah terpencil. Faktor ini dapat maksimal jika didukung oleh monitoring perbankan terhadap pengguna jasa dan produk keuangan serta meningkatkan promosi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai perkembangan layanan perbankan.

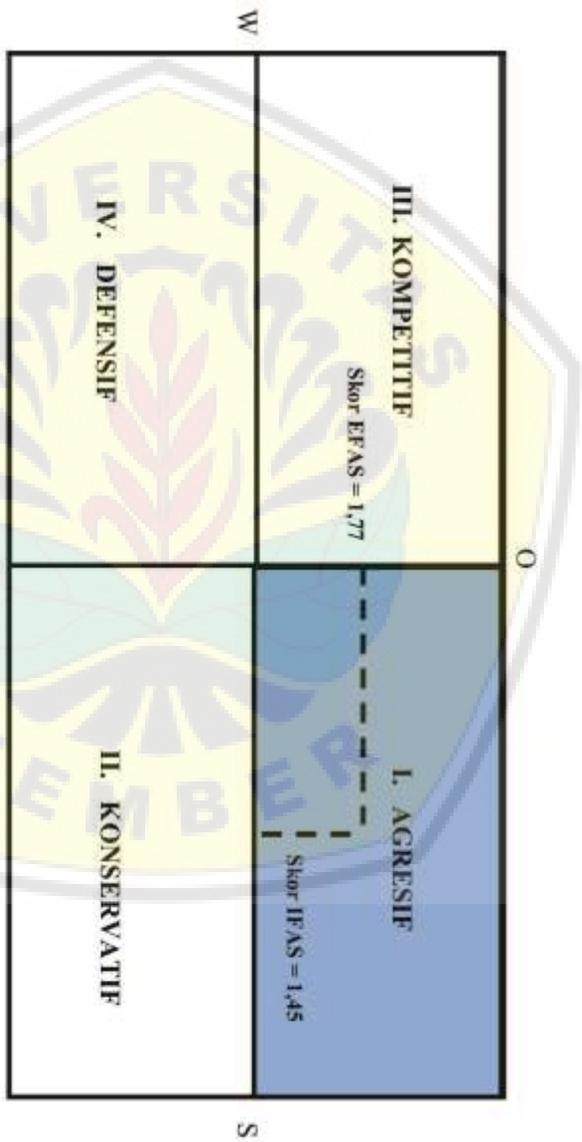
**Tabel 7.6 Hasil Pemetaan Faktor Internal Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso**

		Bobot	Skor	Nilai
<b>Kekuatan</b>				
1	Brand Image produk keuangan yang kuat	0,121	4,000	0,48
2	Meningkatnya jumlah dana pihak ketiga	0,106	3,500	0,37
3	Meminimumkan biaya operasional	0,106	3,500	0,37
4	Menjangkau nasabah di daerah terpencil	0,114	3,750	0,43
5	Mudah melakukan penarikan tunai dan transfer	0,114	3,750	0,43
6	Adanya <i>cell centre</i> dalam 24 jam	0,121	4,000	0,48
<b>Jumlah</b>		<b>0,68</b>		<b>2,56</b>
<b>Kelemahan</b>				
1	Tidak dapat memonitoring nasabah	0,106	3,50	0,37
2	Produk instan sehingga rentan penipuan	0,098	3,25	0,32
3	Kurangnya promosi dan sosialisasi	0,114	3,75	0,43
<b>Jumlah</b>		<b>0,32</b>		<b>1,12</b>
<b>Selisih Kekuatan dan Kelemahan</b>				<b>1,45</b>

Faktor Eksternal perbankan dalam peningkatan Inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman dan selisih faktor eksternal sebesar 1,77. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya landasan regulasi yang jelas mengenai strategi nasional yang inklusif dapat menaikkan optimisme perbankan dalam melakukan akses keuangan kepada masyarakat. Selain itu, kondisi demografi masyarakat yang jauh akan akses informasi menjadi peluang tersendiri oleh perbankan dalam mengembangkan akses produk layanannya serta adanya kebijakan perluasan pengembangan UKM di Indonesia menjadi poin penting untuk lembaga keuangan dalam menumbuhkan inklusi keuangan di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya insentif dari perbankan dan bank sentral dalam memperkuat dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Jember dan Bondowoso.

**Tabel 7.7 Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso**

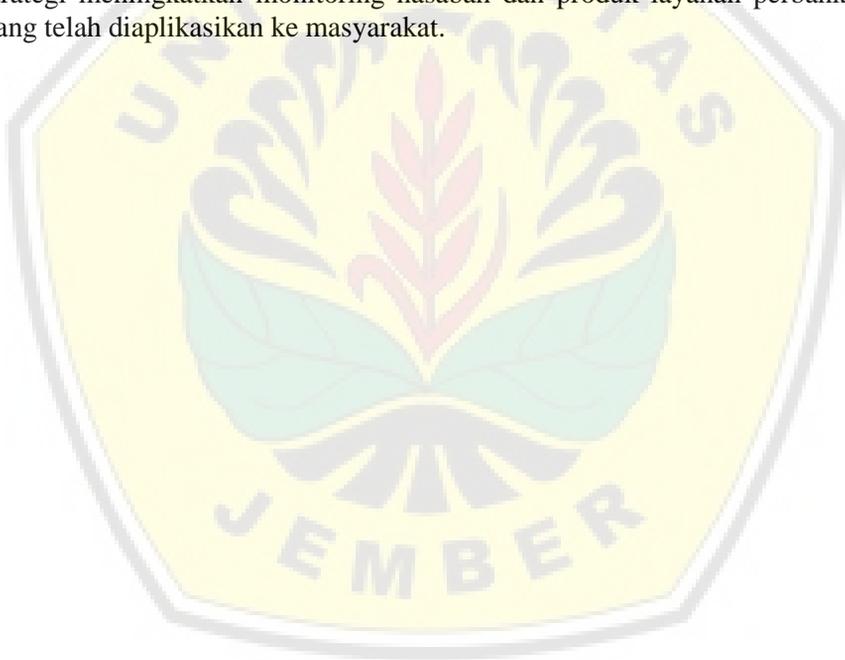
		<b>Bobot</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>
<b>Peluang</b>				
<b>1</b>	Adanya landasan jelas berupa strategi nasional keuangan inklusif	0,11	3,75	0,43
<b>2</b>	Banyak masyarakat yang belum terakses layanan jasa keuangan	0,11	3,75	0,43
<b>3</b>	Potensi pembiayaan pada UKM	0,12	4,00	0,48
<b>4</b>	Luasnya jaringan keagenan di seluruh daerah	0,11	3,75	0,43
<b>5</b>	Penggunaan mobile banking yang tinggi	0,12	4,00	0,48
<b>6</b>	Regulasi branchless banking	0,12	4,00	0,48
<b>Jumlah</b>		<b>0,70</b>		<b>2,73</b>
<b>Hambatan</b>				
<b>1</b>	Tingkat literasi keuangan yang rendah	0,09	3,00	0,27
<b>2</b>	Penipuan dari nasabah	0,11	3,50	0,37
<b>3</b>	Pelanggaran oleh agen	0,10	3,25	0,32
<b>Jumlah</b>		<b>0,30</b>		<b>0,96</b>
<b>Selisih Peluang dan Hambatan</b>				<b>1,77</b>



Sumber: Data Primer, diolah, 2016

Gambar 7.3 Posisi Strategis Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso

Berdasarkan kondisi faktor internal dan eksternal perbankan dalam pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowos, perhitungan nilai EFAS sebesar 1,77 dan nilai IFAS sebesar 1,45 memberikan arti posisi strategis perbankan dalam peningkatan inklusi keuangan berada di daerah agresif. Posisi ini memberikan arti bahwa strategi perbankan dalam peningkatan Inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso, diantaranya (1) strategi meningkatkan akses informasi dan produk perbankan ke masyarakat; (2) strategi meningkatkan penerapan branchless banking di masyarakat; (3) strategi meningkatkan kemudahan masyarakat dalam penggunaan produk perbankan; serta (4) strategi meningkatkan monitoring nasabah dan produk layanan perbankan yang telah diaplikasikan ke masyarakat.



## BAB DELAPAN

### PENUTUP

Pemahaman atas kerangka kerja inklusi keuangan dari tataran konseptual hingga mencermati impiantasinya di lapangan menjadi tidak saja penting tetapi juga urgent dalam proses pembangunan keuangan masyarakat. Kenyataan terkadang memiliki banyak anomali dengan konsepsi dan kebijakan yang ada. Namun demikian evaluasi dan monitoring dalam rupa yang intensif dan berkelanjutan menjadi perlu mendapat penekanan. Sebagaimana paparan dalam bab-bab diatas dari ranah konseptual, rancangan kebijakan hingga anaisis empiris menyadarkan perlunya secara konsisten membedah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kepentingan memahami aset keuangan yang dimilikinya hingga aku cerdas dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada. Berangkat dari hal ini paling tidak beberapa poin mendasar yang dapat dirangkum dalam Bab. Penutup mengenai tingkat inklusi keuangan dan determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Bondowoso, dipaparkan sebagai berikut :

1. Secara agregat inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso menunjukkan karakteristik pola inklusi yang sama dan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan ketersediaan jumlah lembaga perbankan yang cukup dengan fasilitas pelayanan keuangannya, kebutuhan masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan formal dan intensitas keterlibatan masyarakat dalam penggunaan jasa lembaga keuangan formal. Namun sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau keuangan yang disebabkan oleh tingkat literasi keuangan yang masih rendah dan tertutupnya informasi dari masyarakat akibat ketakutan dan kekhawatiran dengan pemberi jasa keuangan individu lainnya. Sementara akses masyarakat terhadap fasilitas kredit keuangan khususnya kredit usaha cukup tinggi dan menjadi indikasi potensial dalam mengembangkan sektor riil.
2. Determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember adalah usia, tingkat pendidikan, literasi keuangan dan jarak lembaga keuangan pada keterjangkauan masyarakat. Beberapa hal menarik dari temuan penelitian bahwa peluang laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan perempuan karena dominasi perempuan dalam pengelolaan keuangan, begitu halnya dengan tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan tidak terdapat kesenjangan pendapatan yang mempengaruhi inklusi, masyarakat dengan strata pendapatan berbeda

memiliki pola yang sama dalam menjangkau jasa keuangan. Sementara di Kabupaten

Bondowoso, beberapa determinan utama dalam inklusi keuangan masyarakat adalah jenis kelamin, pendidikan dan literasi masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Jember, perempuan masih memiliki pengaruh cukup besar terhadap keterjangkauan keuangan, begitu halnya dengan pendidikan. Namun hal menarik adalah pengaruh literasi masyarakat di Kabupaten Bondowoso lebih besar dibandingkan Kabupaten Jember. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya kelompok usia muda di Kabupaten Bondowoso dengan literasi keuangan dan minat terhadap jasa lembaga keuangan yang cukup tinggi.

3. Inklusi keuangan merupakan strategi pembangunan nasional dan daerah yang berpusat pada masyarakat ini perlu memfokuskan pada kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Maka kerangka strategi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso terdiri dari (1) Edukasi keuangan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. (2) Fasilitas keuangan publik mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. (3) Pemetaan informasi keuangan. (4) Pelaksanaan program inklusi keuangan membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. (5) Perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan.
4. Secara agregat baik pada tingkat *basic financial literacy* dan *advanced financial literacy* dipengaruhi tingkat pendapatan, pendidikan, *gender*, kepemilikan terhadap produk keuangan dan perilaku masyarakat terhadap jasa keuangan. Kepemilikan produk keuangan dana pensiun masih rendah yang disebabkan masih minimnya pengetahuan mengenai dana pensiun dan berbanding terbalik dengan kepemilikan pada produk asuransi.
5. Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas terutama bagi individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat yaitu 1) memberikan pendidikan literasi keuangan untuk generasi yang akan datang melalui sistem pendidikan formal; 2) meningkatkan akses informasi dan instrumen serta sumberdaya pengelolaan keuangan; dan 3) mendorong peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui beragam program dan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adasme, Osvaldo., Majnoni, Giovanni., and Uribe, Myriam. 2006. Acces and Risk: Friend or Foes? *World Bank Policy Research Working Paper* 4003.
- Alejandro, Carlos F. Diaz. 1985. Good-Bye Financial Repression, Hello Financial Crash. *Working Paper* 24 August.
- Alliance for Financial Inclusion. 2011. G20 Principles for Innovative Financial Inclusion. Online access on <http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20Principles%20for%20Innovative%20Financial%20Inclusion%20-%20AFI%20brochure.pdf>
- Alquist, J. S. 2006. Economic Policy, Institution, and Capital Flows: Portofolio and Direct Investment in Developing Countries. *International Studies Quarterly*, 50 (1): 681-704.
- Andrianaivo M, Kpodar K. (2012). Mobile phones, financial inclusion, and growth. *Review of Economics and Institution*. Vol.3 No.2.
- Arestis, Philip and Glickman, Murray. 2002. Financial Crisis in Southest Asia: Dispelling Illusion The Minskyan Way. *Cambridge Journal of Economics* 26, 237-260.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Breakthrough Strategy Pembangunan Jember*.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Jember dalam Angka 2015.
- Bank Indonesia. 2015. Keuangan inklusif : Apa, Mengapa, Bagaimana, & Siapa. Online access on <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuangan>

- Basu, P. 2006. *Improving access to finance for India's rural poor*. Washington, DC: The World Bank
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. 2007. Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12, 27-49.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Peria, M., & Soledad, M. 2006. *Banking services for everyone? Barriers to bank access and use around the world*. Working Paper Series No. 4079. World Bank Policy Research.
- Bencivenga, Valerie R and Smith, Bruce D. 1991. Financial Intermediation and Endogenous Growth. *The Review of Economics Studies* Vol.58 No.2.
- Bikker, J. & Wesseling, S. 2003. Intermediation, Integration and Internalisation : A survey On Banking in Europe. *Occasional Studies De Nederlandsche Bank*, Vol. I No. 3, 2003.
- Bindseil, U. & Jablecki, J. 2011. A Structural Model of Central Bank Operations and Bank Intermediation. *Working Paper Series*, No. 1312 : European Central Bank.
- Braunstein, Sandra and Welch, Carolyn. 2002. Financial Literacy: An Overview of Practice, Research, and Policy. *Federal Reserve Bulletin*.
- Bumcrot, Christopher, Judy Lin and Annamaria Lusardi. 2013. The Geography of Financial Literacy. *Numeracy : Advancing Education in Quantitative Literacy*. Article 2 Volume 6 Issue 2.
- Campello, Murillo. 2002. Internal Capital Markets in Financial Conglomerates: Evidence From Small Bank Responses to Monetary Policy. *The Journal of Finance*. Vol. LVII No.6.
- Chami, R., C. Fullenkamp, and S. Sharma. 2009. A Framework for Financial Market Development, IMF Occasional Paper No. WP/09/156 (Washington: International Monetary Fund, July).
- Chattopadhyay, Sadhan Kumar. 2011. Financial Inclusion in India : A Case – study of Bengal. RBI Working Paper WPS (DEPR) : 8

- Cheng, X., Degryse, H.A., 2006. The Impact of Bank and Non-Bank Financial Institutions on Local Economic Growth in China, Discussion Paper 2006-2009.
- Claessens, S. 2006. Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives, *The World Bank Research Observer* 21 (2), 207-240
- Cole, Shawn, Thomas Sampson, and Bilal Zia. 2008. Money or knowledge? What drives the demand for financial services in developing countries? Harvard Business School Working Paper, No. 09-117.
- Cole, Shawn, Thomas Sampson, and Bilal Zia. 2008. Money or knowledge? What drives the demand for financial services in developing countries? Harvard Business School Working Paper, No. 09-117
- Cull, R., Ehrbeck, T., & Hollo, N. 2014. Financial Inclusion and Development : Recent Impact Evidence. *Focus Note OCGAP*, No. 92.
- Definit, Sedi dan OJK. 2013. *Developing Indonesian Financial Literacy Index*. Financial Report
- Diamond, Douglas W. 1984. Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *Review of Economic Studies*. LI, 393-414.
- Diamond, Douglas W and Rajan, Raghuram G. 2001. Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking. *Journal of Political Economy*. Vol. 109 No.2 PP 287-327.
- Fritzer, Friedrich. 2004. "Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective." *Monetary Policy and The Economy* 2nd Quarter, pp. 72-87.
- Goldberg, Linda S. 2009. Micro, Macro, and Strategic Forces in Invoicing International Trade. *NBER Working Paper* 15470.
- Goldsmith, Elizabeth B., and Ronald E. Goldsmith. 1997. Sex Differences in Financial Knowledge: A Replication and Extension. *Psychological Report* 81: 1169-1170

- Goswami, M. and S. Sharma, 2011. The Development of Local Debt Markets in Asia. IMF Occasional Paper No. WP/11/132 (Washington: International Monetary Fund, June).
- Gregorio, Jose. (1999). Financial Integration, Financial Development, and Economic Growth, Eutudios de Economfa. Vol.26.
- Hannig, A., Janses, S. 2010. Financial Inclusion and Financial Stability. ADBI Working Paper.259. Social Science Research Network.
- Hannig, Alfred, and Stefan Jansen. 2010. *Financial Inclusion and Financial Stability*. Working Paper, Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Hart, Oliver. 1995. Corporate Governance Some Theory and Implications. *The Economic Journal* 678-689.
- Hart, Oliver and Moore, John. 1998. Default Renegotiation: A Dynamic Model of Debt. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. CXIII Issue 1.
- Hogarth, Jeanne M., and Kevin H. O'Donnell. 1999. Banking Relationships of Lower-income Families and the Governmental Trend toward Electronic Payment. *Federal Reserve Bulletin* 86 (July): 459-473
- Houben, A., Kakes, J., and Schinasi, G. 2004. Towards a Framework for Safeguarding Financial Stability, IMF Occasional Paper (WP/04/101).
- Hubbard, G. 2002. *Money The Financial System And The Economy*. Fourth Edition, International Edition. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. USA.
- Hung, Angela A., Andrew M.Parker and Joanne K. Yoong. 2009. Defining and Measuring Financial Literacy. Working Paper RAND Labor and Population. September
- Huston, Sandra. 2010. Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs* 44 (summer): 271-275

- Inderst, Roman. & Mueller, Holger M. 2008. Bank Capital Structure and Credit Decisions. *Journal of Financial Intermediation* : No. 17. [inklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx](http://inklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx).
- Insukindro. 1990. Komponen Koefisien Regresi Jangka Panjang Model Ekonomi: Sebuah Studi Kasus Barang Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1-11.
- Jaising, Naushita. 2013. Financial Inclusion in Ghana : A Pre-Diagnostic Study. Master Thesis IE School of International Relations.
- Kashyap, Anil K and Stein, Jeremy C. What Do A Million Observations on Banks Say About The Transmission of Monetary Policy?. *NBER Working Paper*.
- Kar, M., Pentecost. E. 2000. "The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence", Economic Research Paper, Department of Economics, Loughborough University, No: 00/27
- Kar, M., Agir, H. and Peker, O. (2010) "Financial development and poverty reduction in Turkey", *Conference Proceedings*, pp.681-703. Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics. Turkey.
- Kempson, E. & Whyley, C. 1999. *Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion*. Bristol: Policy Press.
- Kempson E., Collard S., and Moore N. 2005. *Measuring Financial Capability : An Exploratory Study*. Financial Service Authority. Consumer Research Report. No. 37
- Kempson E., Collard S., and Moore N. 2005. *Measuring Financial Capability : An Exploratory Study*. Financial Service Authority. Consumer Research Report. No. 37
- Kharchenko, Olga. 2011. *Financial Literacy in Ukraine : Determinants and Implications for Saving Behavior*. Thesis MA in Economics. Kyiv School of Economics
- Khan, Kanwal Iqbal. 2011. Can Dividend Decisions Affect the Stock Prices: A Case of Dividend Paying Companies of KSE. *International*

*Research Journal of Finance and Economics* ISSN 1450-2887  
Issue 76.

- Kharchenko, Olga. 2011. *Financial Literacy in Ukraine : Determinants and Implications for Saving Behavior*. Thesis MA in Economics. Kyiv School of Economics
- King R.G and R. Levine. 1993. "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right," *Quarterly Journal of Economics*, 108:715-735
- Kishan, Ruby P. & Opiela, Timothy P. 2000. Bank Size, Bank Capital and the Bank Lending Channel. *Journal of Money, Credit and Banking* : Vol. 32
- Kiyotaki, Nobuhiro and Moore, John. 2005. Financial Deepening. *Journal of The European Economic Assosiation*. 3(2-3):701-713
- Klapper, Leora, and Georgios A. Panos. 2011. Financial Literacy and Retirement Planning in View of a Growing Youth Demographic: the Russian Case. CeRP Working Paper, No. 114/11
- Klasen, S. 2010. Measuring and Monitoring Inclusive Growth : Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No.12.
- Kraay, A. 2004. When Is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence. IMF Working Paper No. 04/47.
- Kularatne, Chandana. 2002. "An Examination of the Impact of Financial Deepening on Long-Run Economic Growth : An Application of a VECM Structure to a Middle-Income Country Context.
- Levine, R. 1997. "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda", *Journal of Economic Literature*, 35: 688-726.
- Levine, R., Zervos, S. 1998. Stock markets, bank, and economic growth. *American economic review*. Vol.88 No.3. pp 537-558
- Levine, R., N. Loayza and T. Beck. 2000. "Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes", *Journal of Monetary Economics*, 46: 31-77.

- Liu, Z. 2003. Sustainable Tourism Development: A Critique. *Journal of Sustainable Tourism*, 11 (6). Pp. 459-475. ISSN 0966-9582
- Lucas, R.E. 1988. On the Mechanism of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22 (1), 3-42.
- Lusardi, Annamaria and Olivia S. Mitchell. 2006. Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing. MRRC Working Paper, No. 2006- 144
- Lusardi, Annamaria and Olivia S. Mitchell. 2008. Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare?. *American Economic Review* 98 (February): 413-417
- Lynch, David. 1996. Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia Pacific Countries. *Developing Economics* No. XXXIV.
- McFarlane, I.J. 1999. The Stability of the Financial System, Reserve Bank of Australia, Bulletin.
- McKinnon R.I. 1973. "Money and Capital in Economic Development", Washington D.C., The Brookings Institution.
- Meier, G.M., Seers, D. 1984. *Pioneers in Development*. New York: Oxford University Press.
- Miller, Merton H. 1986. Behavioral Rationallity in Finance: The Case of Dividends. *The Journal of Business*. Vol. 59 No. 4 Part 2: The Behavioral Foundations of Economic Theory. PPP S451-S468.
- Mishkin, F. S. 2008. *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*, 8<sup>th</sup> Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Mishkin, F.S, 2001, "*The Economics of Money, Banking and Financial Markets*", 6th Edition, Addison Wesley Logman, New York.
- Mohan, G. & Hickey, S. 2004. *Relocating Participation Within A Radical Poitics of Development: Critical Modernism and Citizenship*. In S. Hickey and G. Mohan eds. *Participation: From Tyranny to Transformation*. London and Newyork: Zed Books, pp. 159-174.

- Mohan, Ramesh. 2006. Causal Relationship Between Savings and Economic Growth in Countries with Different Income Levels. *Economics Bulletin*. Vol.5, No.3 pp. 1-12.
- Munyanyi, W. 2014. Women Financial Inclusion in Zimbabwe: A Descriptive Comparison of Rural and Urban Populations. *International Journal of Education and Research*, Vol 2, No. 6.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nguena, C.L., Abimbola, T.M. 2013. Financial Deepening Dynamics and Implication for Financial Policy Coordination in a Monetary Union: the case of WAEMU. African Economic Conference. African Development Bank.
- Nkoro, E. & Uko, A. K. 2012. Foreign Capital Flows and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Approach. *Asian Journal of Empirical Research*,2(5):149-161.
- Park, C. Y. & Mercado, R. V. 2015. Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia . ADB Economics Working Paper Series, No. 426.
- Priyarsono *et.al*. 2011. Struktur pasar persaingan perbankan Indonesia dalam periode konsolidasi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol.8.No.2
- Rajan, R.G., and L. Zingales, 1998. Financial Dependence and Growth. *American Economic Review*, Vol. 88, No. 3, pp. 559-86.
- Ravalion , M. & Chen, S. 2002. Measuring Pro-Poor Growth. *Economics Letters*, 78, PP. 93-99.
- Remund, D L. 2010. *Financial literacy explicated: the case for a clearer definition in an increasingly complex economy*. *Journal of Consumer Affairs* Volume 44 Issue 2
- Rowlingson, K. & McKay, S. 2014. Financial Inclusion Annual Monitoring Report 2013. Working Paper University of Birmingham, pp 1 – 40.
- Sabirin, Syahril. 2002. *Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Mendukung Proses Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Samans, R., Blanke, J., Corrigan, G., & Drzeniek, M. 2015. The Inclusive Growth and Development Report 2015. World Economic Forum Insight Report.
- Sarma, Mandira, and Jesim Pais. 2008. *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis*. Indian Council for Research on International Economic Relations, Madras School of Economics.
- Sarma, Mandira. 2010. Index of Financial Inclusion. Discussion Papers in Economics. November.
- Sarma Mandira. (2012). Index of financial inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working papers on money, finance, trade and development. Working paper No.07/2012.
- Saunders, Drew. 2008. Understanding “Instability” in Aggregate Money Demand: An Approach based on A Life-Cycle Model of Household Portfolio Choice (Preliminary and Incomplete). *Working Paper*. Purdue University.
- Schinasi, Garry. 2006. Safeguarding of Financial Stability: Theory and Practice, International Monetary Fund, Washington.
- Scholtens, B. & Wensveen, D. 2003. The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (Not) Explain. *The European Money and Finance Forum*, Vienna, 2003.
- Schumpeter J.A. 1934. “The Theory of Economic Development”, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Shankar, S. 2013. Financial Inclusion in India: Do Microfinance Institutions Address Access Barriers?. *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, Vol. 2, Issue 1, pp. 60 -74.
- Sharma, M. 2008. Index of Financial Inclusion. Working Paper no. 215, ICRIER.

Siringoringo, Renniwaty. 2012. Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2012.

Ummah. (2012). Analisis keterkaitan inklusi keuangan dengan pembangunan di Asia. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Van der Werff AD, Hogarth JM, Peach ND. 2012. A Cross-country analysis of financial inclusion within the OECD. *Consumer Interest Annual*. Volume 59.

Wachira MI, Kihiu EN. (2012). Impact of financial literacy on access to financial services in Kenya. *International Journal of Business and Social Science*. Vol 3 No.19.

World Bank. 1994. *East Asia's Trade and Investment: Regional and Global Gains from Liberalization*. United States of America: The International Bank for Reconstruction and Development-The World Bank.

Worthington, Andrew C. 2004. The Distribution of Financial Literacy in Australia. In *Discussion Paper*, No. 185. Queensland University of Technology, Brisbane.

<http://worldbank.org>

<http://ekbis.sindonews.com/read>.

## INDEKS NAMA

---

### A

Adasme, Osvaldo, Giovanni Majnoni, and Myriam Uribe · 15  
Alberto Chaia · 56  
Alejandro · 28  
Alquist · 35  
Andrianaivo dan Kpodar · 7, 28  
Arestis dan Glickman · 33

---

### B

Beck et al. · 7  
Beck, Demirguc-Kunt · 2  
Beck, *et, al,* · 3  
Bencivenga dan Smith · 29  
Bikker & Wesseling · 31, 33  
Bindseil dan Jabtecki · 30

---

### C

Campello · 33  
Chami, *et, al* · 37  
Chattopadhyay · 6  
Cheng dan Degryse · 23  
Cole et · 83  
Cole et al · 83  
Collins, Daryl, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, and Orlanda  
Ruthven · 14  
*cost of fund* · 30  
Cull *et. al* · 2

## *D*

Diamond · 31

Diamond dan Rajan · 31

---

## *G*

Garman and Forgue · 82

Gerrans & Hershey · 11

Goldberg · 33

Goldsmith dan Goldsmith · 83

Goswami dan Sharma · 37

Gregorio · 28

---

## *H*

Hannig dan Jansen · 3, 15, 38, 56

Hanning dan Jensen · 5

Hart · 31

Hart dan Moore · 31

Houben · 19, 22, 34

Huston · 82

---

## *I*

Inderst & Mueller · 34

Insukindro · 30

---

## *J*

Jaising · 7

---

## *K*

Kahsyap dan Stein · 33

Kar dan Pentecost · 35  
Kar, Agir, dan Peker · 35  
Kempson dan Whyley · 35  
Khan · 15  
Kharchenko · 7, 83  
Kim · 82  
Kishan dan Opiela · 31, 33  
Kiyotaki dan Moore · 28  
Kraay · 8

---

## *L*

Levine · 18, 23, 28, 34, 37  
Liu · 28  
Lusardi dan Mitchell · 83  
Lynch · 28

---

## *M*

Mackinnon & Shaw · 29  
Mandell · 83  
Mc Kinnon, · 37  
McFarlane · 22, 34  
Miller · 31  
Mishkin · 22, 23, 28, 30, 33  
Mohan · 28  
Munyanyi · 2  
Murphy · 30

---

## *N*

Nasution · 29  
Nkoro dan Uko · 35

## **P**

Ponties dan Siregar · 33  
Prasad · 15  
Park & Mercado · 1  
Priyarsono *et,al* · 19

---

## **Q**

Qi · 31

---

## **R**

Rajan dan Zingales · 37  
Ravallion & Chen · 8  
Rowlingson & McKay · 2

---

## **S**

Sabirin · 29  
Samans *et al* · 8  
Sarma · 4, 6, 38  
Saunders · 30  
Schinasi · 22, 34  
Scholtens & Wensveen, · 31  
Shankar, · 2  
Siringoringo · 32

---

## **U**

Ummah · 6  
USAID · 7

## V

Van der Werff et al. · 7

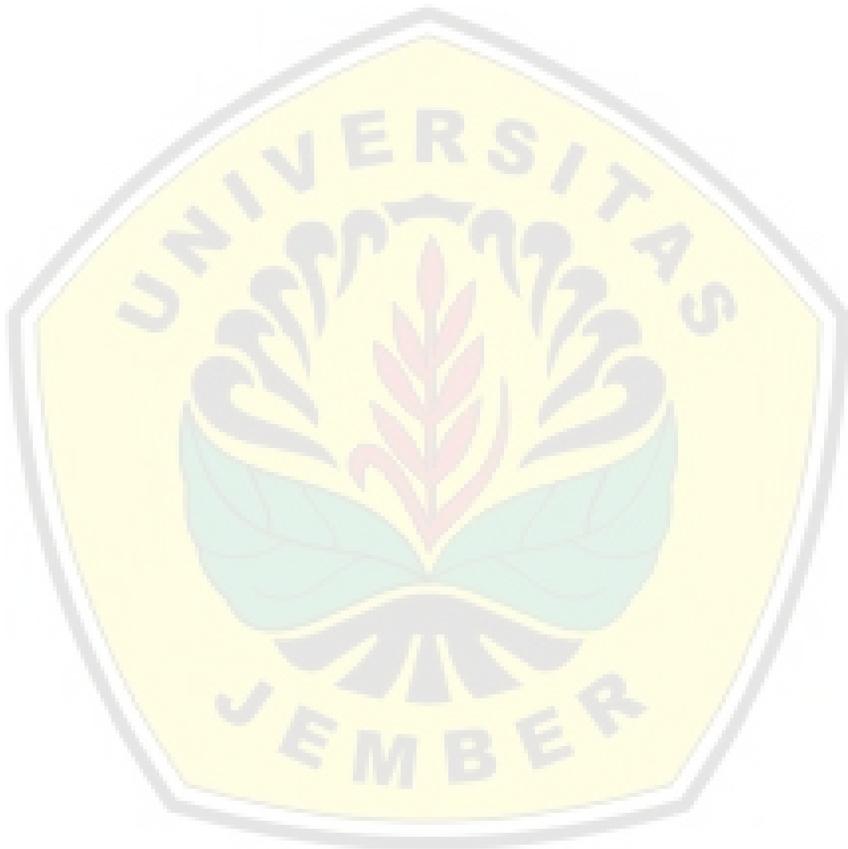
---

## W

Wachira dan Kihiu · 6

Worthington · 83





## INDEKS SUBYEK

### A

- Advanced Financial Literacy* · 92, 110  
Aglomerasi · 25  
Akses Keuangan · 2, 4, 15, 35, 57, 62, 65, 74, 76, 78, 126  
Aksesibilitas · 6, 12, 15, 57, 66  
*Arsitektur Perbankan Indonesia* · 22  
ASEAN · 12, 122  
Asuransi · 4, 5, 20, 27, 32, 33, 36, 39, 57, 74, 92, 94, 95, 102, 110, 119, 124, 131
- 

### B

- Bank Indonesia · 1, 2, 6, 12, 15, 22, 23, 26, 27, 31, 125, 126, 131  
Bank Umum · 20, 22, 27  
*Basic Financial Literacy* · 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 107, 108, 113, 115, 116, 131  
Bondowoso · 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 66, 67, 69, 77, 78, 79, 80, 82, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 121, 123, 124, 127, 130, 131  
BOPO · 22, 23  
*Borrower/Spender* · 19  
Broker · 20
- 

### C

- CAR · 7, 22, 23  
*Cost Of Fund* · 31

## **D**

Dana Pensiun · 20, 95, 97, 100, 101, 102, 114, 118, 119, 131  
Defisit · 19, 20, 31, 32  
*Demand* · 2, 4, 15  
Deposito Bank · 38, 92  
Deregulasi · 20, 28, 32  
*Direct Finance* · 19  
Distribusi Pendapatan · 49, 53, 86

---

## **E**

Edukasi Keuangan · 2, 15, 17, 37, 122, 124  
Efek Pendapatan · 82  
Efek Substitusi · 82  
Efisiensi Ekonomi · 2  
Eksklusi Keuangan · 2  
Era Deregulasi · 20

---

## **F**

*Financial Deepening* · 23, 29  
*Financial Development* · 30  
*Financial Stability Report* · 21  
Fundamental Ekonomi · 24  
Fungsi Kebijakan · 20

---

## **G**

*Governance Index* · 8  
*Gross Domestic Product (GDP)*. · 4, 57

---

## **H**

Harapan Lama Sekolah (HLS) · 42

## **I**

- Ibu Rumah Tangga · 48, 53, 54, 65, 74, 85, 86, 91, 104, 105, 110  
Indeks Pembangunan Manusia · 8, 41, 45  
*Indirect Finance* · 19  
Indonesia · 1, 17, 26, 28, 38, 84  
Industri · 17, 21, 27, 28, 29, 42, 45, 46, 47, 69, 83, 122, 128  
Inflasi · 44, 87, 88, 106  
Informasi Dan Teknologi · 121  
Infrastruktur · 6, 8, 12, 83, 123, 128, 129  
Inklusi Keuangan · 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 29, 35, 36, 38, 48, 52, 57, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131  
Inovasi · 2, 4, 19, 28, 32, 63, 65, 74, 122  
Intermediasi · 23, 30  
Intermediasi Keuangan · 5, 19, 20, 31, 32, 35  
Investasi · 19, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 83, 84, 100, 101, 118
- 

## **J**

- Jasa Keuangan · 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 28, 36, 38, 39, 47, 57, 59, 64, 68, 73, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 90, 109, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131
- 

## **K**

- Kabupaten Jember · 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 94, 104, 106, 108, 123, 124, 127, 130, 131  
Kebijakan Fiskal · 30  
Kebijakan Moneter · 16, 30  
Kementerian · 125, 126  
Kesenjangan Pendapatan · 2, 4, 131  
Keterjangkauan · 12, 15, 76, 79, 125, 130, 131  
Keuangan Formal · 15, 37, 38, 39, 88, 124, 131  
Keuangan Syariah · 123, 128

Konsumen · 2, 6, 15, 24, 26, 37, 65, 66, 74, 83, 123, 124, 125, 126, 128, 131

Koordinasi · 126, 129

Kredit · 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 57, 64, 65, 66, 73, 74, 88, 92, 94, 112, 115, 124, 125, 130

Krisis Keuangan Global · 1

Kualitas Manusia · 4, 7, 8, 57

Kualitas, · 6, 123, 128

---

## *L*

Lembaga Keuangan · 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 87, 89, 94, 102, 106, 108, 112, 118, 130, 131

Lembaga Keuangan Formal · 12, 27, 58, 66, 79, 130

Lembaga Keuangan Non Bank · 37, 92

*Lender/Savers* · 19

Letak Geografis · 26

Likuiditas · 16, 20, 30, 31, 34

*Liquidity Risk* · 16

Literasi Keuangan · 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 58, 66, 76, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131

---

## *M*

Makroekonomi Regional · 42, 46

Makroprudensial · 15, 17, 21

Menabung · 4, 8, 57, 60, 69, 74, 77, 79, 124

*Middle East* · 10, 11

Mitigasi Risiko · 4

*Mobile Money Account* · 10

Model Logit · 75, 77, 82

*Money Illusion* · 87, 106

---

## **N**

Negara-Negara Berkembang · 1, 11

*Non Performing Loan* · 16

Non-Bank · 24, 33, 94, 112

---

## **O**

OECD · 8, 10, 11, 12, 122

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) · 12, 36, 79, 122, 128

---

## **P**

Pasar Modal · 30, 33, 87, 88, 90, 92, 106, 108, 110

PDRB · 42, 43, 46, 47

Pelajar Atau Mahasiswa · 48, 53, 85, 104

Pelayanan Keuangan · 5, 7

Pemahaman Keuangan · 124, 128, 132

Pemanfaatan · 6, 14

Pembangunan Ekonomi · 24, 25, 27, 35, 36, 37

Pembangunan Keuangan · 29, 130

Pembangunan Manusia · 7

Pembayaran · 4, 5, 6, 14, 20, 23, 24, 27, 30, 35, 39, 51, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 74, 126

Pembiayaan Langsung · 19

Pembiayaan Semi Langsung · 19

Pengawasan · 8, 28, 34, 122, 126, 128

Pengelolaan Keuangan · 95, 96, 103, 112, 113, 120

Pengentasan Kemiskinan · 9, 123

Pengetahuan Keuangan · 37, 83, 84

Penggunaan Pelayanan Keuangan · 5

Penyedia Jasa · 2

Penyertaan Modal · 26

Perbankan · 2, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 92, 106, 117, 123, 125, 128, 130

Perencanaan Keuangan · 95, 96, 97, 113, 114, 126

Perluasan Akses Asset Perekonomian Dan Pasar · 9

Perluasan Skala Ekonomi · 9

Pertumbuhan Berkelanjutan · 30

Pertumbuhan Ekonomi · 24, 42, 47

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif · 9

Pinjaman · 9, 14, 16, 20, 34, 36, 38, 64, 73, 83

Pola Keuangan · 86

Pola Konsumsi · 86

*Primary Market* · 19

*Pro Growth* · 2

*Pro Poor*, · 2

Prosklikalitas · 17

---

## **R**

*Random Sampling* · 84

*Remittance* · 14

Risiko Kredit · 16

Risiko Sistemik · 16, 17, 21

ROA · 22, 23

---

## **S**

*Secondary Market* · 20

*Shadow Banking* · 2, 15

Sistem Keuangan · 2, 4, 5, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 57, 74, 79, 122, 128

Sistem Keuangan Formal · 2, 4, 5, 39, 57, 74

Sosial Budaya · 84, 90, 104

Sosial Demografi · 75

*South Asia* · 10, 11

Stabilitas Keuangan · 1, 4, 16, 84, 128

Stabilitas Moneter · 30

Stabilitas Sistem Keuangan · 1, 2, 15, 17, 20, 21, 23, 30, 37, 122,  
123, 128

Strategi Inklusi Keuangan · 126

*Supply* · 2, 4

Surplus · 19, 20, 31, 32

---

## **T**

Tabungan · 4, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 39, 49, 57,  
59, 60, 61, 69, 83, 89, 92, 94, 107, 110, 112, 115, 116, 124

Terbatasnya Informasi · 2, 37

Terintegrasi · 1, 35, 37

*The Commission On Growth And Development* · 9

---

## **U**

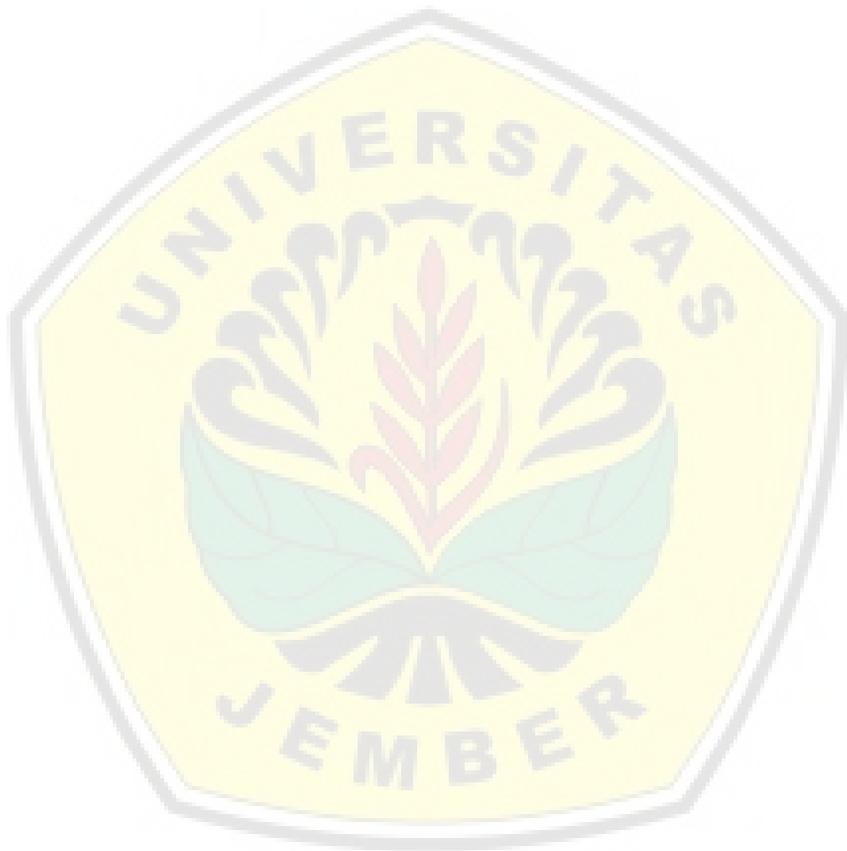
UMK · 41

*Unbanked* · 1, 2, 4, 10, 16, 57, 74, 79

---

## **W**

*World Bank* · 1, 9, 25





Anggota IKAPI No. 127/JTI/2015

Jember University Press  
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121  
Telp. 0331-330224, psw. 0319  
E-mail: [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

ISBN: 978-602-61803-9-1

